

Volume 7 Nomor 1
Januari-Juni 2017

ISSN: 2088-0308

JURNAL

Pendidikan IPS



Diterbitkan Oleh:

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU PENDIDIKAN TAMAN SISWA BIMA

JPI

JURNAL PENDIDIKAN IPS

SUSUNAN REDAKSI

Ketua Penyunting

Asriyadin, M.Pd.Si.

Penyunting Pelaksana

Zuriatin, S.S., M.Pd.

Tati Haryati, M.Pd

Syahbudin, M.Pd

A. Gafar Hidayat, S.Pd.

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, M.A

Prof. Dr. Juraid

Desain Cover

Asriyadin, M.Pd.Si.

Alamat Redaksi

Redaksi Jurnal Pendidikan MIPA

LPPM STKIP Taman Siswa Bima

Jln. Lintas Bima - Tente Palibelo. Tlp (0374) 42891

Email: lppmtamansiswabima@gmail.com

Jurnal Pendidikan IPS STKIP Taman Siswa Bima, terbit 2 kali setahun dengan edisi Januari-Juni dan Juli-Desember. Sebagai media informasi, pemikiran dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pendidikan sosial dan ilmu sosial.

JURNAL PENDIDIKAN IPS
Volume 7 No. 1, Januari-Juni 2017
ISSN : 2088-0308

DAFTAR ISI

Upaya Soeharto Memotong Pilar-Pilar Kekuasaan Soekarno Syhabuddin	1-11
Konflik Sosial antar Desa Dalam Perspektif Sejarah di Bima Ahmadin	12-20
Pembentukan Kultur Sekolah Melalui Pembelajaran IPS (Studi Deskriptif di SMPN 5 Sape) Ida Waluyati	21-28
Analisis Ekonomi Terhadap Hukum dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Ady Irawan	29-36
Pengaruh Penerapan Komparasi Metode Number Head Together (NHT) dan Metode Driil terhadap Pemahaman Mahasiswa pada Mata Kuliah Sejarah Indonesia Abad XIX-XX Zuriatin, Roni Irawan	37-43
Peran Kesultanan Bima Pada Masa Sultan Ismail Tahun 1819-1854 Dewi Ratna Muchlisa Mandyara	43-48
Analisis Konflik antar Desa Samili dengan Masyarakat Desa Dadibou di Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun 2016 M. Tahir	49-54
Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu Suherman	55-65

UPAYA SOEHARTO MEMOTONG PILAR-PILAR KEKUASAAN SOEKARNO

Syabuddin

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima
syabuddin41201@gmail.com

ABSTRAK

Paska proklamasi kemerdekaan Indonesia dihadapkan pada masalah-masalah yang besar. Bangsa Indonesia harus berhadapan dengan Belanda dalam revolusi fisik tahun 1945-1950. Indonesia yang baru merdeka juga dihadapkan dengan masalah dalam negeri; perekonomian dengan inflasi yang besar, masalah politik dan disintegrasi bangsa. Kemelut politik 1959 mendorong Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 dan era Demokrasi Terpimpin dimulai. Demorasi terpimpin merupakan upaya Soekarno menghimpun kekuatan Nasionalis, Agama dan Komunisme (Nasakom). Konsep Nasakom mendapat sambutan yang baik dari PKI karena memberikan ruang kepada mereka untuk berkembang. Paska Gerakan 30 September 1965 terjadi perubahan konstelasi politik. Soeharto menghancurkan Partai Komunis Indonesia sebagai pilar penting kekuasaan Soekarno, maka pertarungan politik nasional saat itu berpusat pada Soekarno dan Soeharto. Soeharto kemudian naik ke panggung kekuasaan nasional setelah menghancurkan pilar-pilar lainnya seperti menangkap para menteri yang terlibat dalam Gerakan 30 September, membersihkan tentara yang terlibat atau dipandang Soekarno dan membersihkan MPRS/DPR-GR yang kelak mengangkatnya menjadi presiden.

Kata kunci: Soeharto, Soekarno, Pilar Kekuasaan.

PENDAHULUAN

Kancah kehidupan politik di Indonesia sejak masa kerajaan diwarnai munculnya beberapa tokoh yang kemudian naik ke permukaan sebagai pemimpin. Kehadiran beberapa tokoh ini menarik dicermati, misalnya, Kertanegara dengan gelar Siwabudha yang menjadi raja Singosari sejak tahun 1266-1292. Singosari runtuh oleh serangan Jaya Katwang pada tahun 1292. Kertanegara diserang dikala sedang menikmati minuman keras dan wafat sedangkan patihnya yang memberikan perlawanan kemudian meninggal di Manguntur (Purwadi, 2007:52). Kekuasaan Jaya Katwang kemudian dihancurkan oleh serangan gabungan tentara Tartar dan Majapahit.

Manusia lahir dan mati, negeri timbul dan tenggelam demikian juga memasuki lembaran sejarah Indonesia kontemporer. Soekarno yang menjabat presiden pertama Indonesia (1945-1966). Dalam sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 dan melantik Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden

Berbagai jorgan politik dan ekonomi dicanangkan Manipol-Usdek, Nasakom, Marhaenis, Revolusi belum selesai, Trisaktiyang kesemuanya dalam rangka mempertahankan kekuasaan itu sendiri.

Paska peristiwa Gerakan 30 September 1965, konstelasi politik di Jakarta khususnya dan Indonesia mulai berubah. Salah satu tokoh yang baru muncul di permukaan dan menarik perhatian penulis adalah Mayjend. Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Setelah mendapat kekuasaan baru lewat Supersemar, Soeharto mulai menghancurkan “pilar-pilar” kekuasaan Soekarno terutama dengan membubarkan dan menghancurkan PKI. Hal dapat terjadi karena menurut teori kekuasaan Max Weber bahwa kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya (Maran, 2001:190).

Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengkajinya dalam sebuah tulisan yang berjudul; Upaya Soeharto Memotong Pilar-Pilar

Kekuasaan Soekarno. Kiprah Soeharto di atas panggung politik Nasional merupakan hal yang menarik untuk disimak. Soeharto merupakan tokoh yang amat penting selama abad 20 di Asia (Elson, 2001:vii).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian sejarah sehingga metode yang digunakan adalah metode sejarah. Gottschalk (1985:32) menjelaskan metode sejarah adalah proses menguji, menganalisis sertaperbandingan secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau sedangkan rekonstruksi dengan menempuh proses *historiografi* atau penulisan sejarah. Sulasman (2014:90-91) menjelaskan metode sejarah mencakup empat langkah yaitu *heuristic*, *kritik sumber*, *interpretasi* dan *historiografi*. Tahap *heuristic* adalah mengumpulkan data atau sumber sejarah. Sumber sejarah dapat berupa data lisan, tulisan maupun benda. Kaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan data tertulis berupa buku-buku. Buku-buku tersebut antara lain: *Sejarah Indonesia Modern* karangan MC. Ricklefs tahun 2018, *Politik Militer Indonesia 1945-1947*, karangan Ulf Sundhaussen tahun 1986 dan sumber-sumber lain yang relevan dengan obyek penelitian ini.

Tahap kedua adalah kritik sumber atau *verifikasi*. Kritik ini bertujuan untuk memperoleh keabsahan sumber (Abdurrahman, 2007:68). Kritik sumber dibagi dua yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern penulis melakukan kritik siapa yang membawa berita dan menulis sumber mengenai buku yang dijadikan bahan dalam penulisan ini. Kritik intern penulis melakukan kritik terhadap suatu sumber dengan membandingkan isi data atau isi buku sejarah yang telah ditulis pengarang tersebut. Tahap ketiga adalah *interpretasi* atau penafsiran. *Interpretasi* terdiri dari analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Keduanya dipandang sebagai metode utama di dalam interpretasi (Abdurrahman, 2007:73). Tahap keempat adalah *historiografi* atau penyajian. *Historiografi* dari sudut pandang etimologis berasal dari kata *historia* yang artinya penyelidikan gejala alam

fisik dan *grafein* yang artinya gambaran, lukisan, tulisan dan uraian. Secara harafiah *Historiografi* dapat diartikan sebagai uraian atau tulisan tentang hasil penelitian mengenai gejala alam (Sulasman, 2014:147). Dalam kaitan dengan penelitian ini, penulis akan menyajikan dalam bentuk tulisan secara kronologis sebagai kisah sejarah suatu sintesa yang kausalitas dan komperhensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik. Dimana memandang peristiwa sejarah oleh kejadian politik seperti perang, diplomasi dan tindakan tokoh-tokoh politik (Abdurrahman, 2007: 30). Pendekatan politik untuk menyorot pertarungan politik antara dua tokoh Soekarno dan Soeharto. Soekarno merangkul PKI sebagai menyeimbang Angkatan Darat (AD) sedangkan Soeharto menggunakan tentara AD dan kekuatan massa untuk menghancurkan Soekarno.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latarbelakang Munculnya Soeharto ke Panggung Politik Nasional

Paska proklamasi kemerdekaan, Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan besar seperti perjuangan mempertahankan kemerdekaan, perekonomian, dan ancaman disintegrasi bangsa yang ditandai dengan pergolakan di berbagai daerah. Setelah Jepang menyerah, Belanda yang sudah bertahun-tahun lamanya mencengkeram dan menanamkan kekuasaannya di Indonesia tidak dengan suka rela bersedia melepaskan kekuasaan itu (Gie, 129-130). Masa ini dikenal dengan revolusi fisik yaitu perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda baik melalui diplomasi maupun perjuangan dengan senjata. Masalah dalam negeri, dimana terjadi pergantian kabinet yang terus menerus pada masa parlementer yang berlangsung tahun 1945-1959. Tercatat tujuh kali terjadi pergantian kabinet, ini berarti umur rata-rata berkisar lebih kurang 15 bulan saja, namun ada yang mampu bertahan sampai dua tahun. Demokrasi parlementer ternyata tidak cocok dengan dengan kepribadian bangsa. Bagi Soekarno, Demokrasi Parlementer yang dipakai bangsa Indonesia merupakan produk impor yang

tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat kita dandemokrasi tersebut tidak menjiwai cita-cita bangsa Indonesia (Soerojo, 1988:127). Menurut Soekarno, syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah dengan mewujudkan dasar permusyawaratan dan perwakilan yang menjadi asas dari Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin

Menghadapi situasi politik tersebut, Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit tersebut mengubah tatanan kenegaraan dan politik yang telah terbentuk sebelumnya yaitu Parleментар menuju Demokrasi Terpimpin. menurut Soekarno, demokrasi terpimpin bukanlah diktator kaum proletar demokrasi atau menurut istilah undang-undang dasar 1945 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” (Soekarno, 2001:90). Perubahan politik di Indonesia pada masaitu bukan mendirikan kekuatan segolonganatasan saja juga tidak mendirikan kekuasaan diktatorial kaum proletar, tapi harus mendirikan kekuasaan gotong-royong, kekuasaan menerapkan demokrasi yang menjamin terkonsentrasinya seluruh kekuatan nasional, seluruh kekuatan rakyat (Abdulgani, 1961:149).

Satu hal mendasar yang membedakan antara sistem demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin adalah kekuasaan Presiden. Dalam Demokrasi Liberal, parlemen memiliki kewenangan yang terbesar terhadap pemerintahan dan pengambilan keputusan negara. Sebaliknya, dalam sistem Demokrasi Terpimpin presiden memiliki kekuasaan hampir seluruh bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin sebagai landasannya Soekarno merumuskan konsepsi Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis), ketiganya menjadi kekuatan presiden dalam mempertahankan kekuasaannya. Melalui Demokrasi Terpimpin, presiden Soekarno telah memberikan tempat bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam sistem perpolitikan nasional karena menurut Soekarno, PKI telah terbukti mempunyai basis masa terbesar di Indonesia daripada partai-partai lain. Pada pemilu tahun 1955, Partai Komunis Indonesia

menempati empat besar perolehan suara. Nasakom merupakan perpaduan nasional, agama dan komunisme merupakan suatu sarana menyeimbangkan, mengacaukan serta mengekang kekuatan militer (Angkatan Darat) yang makin besar dan mengancam dengan cara membuka jalan bagi PKI (Elson, 2009: 346). Namun sampai dengan tahun 1960, antara Angkatan Darat dan Presiden Soekarno disebut sebagai hubungan “konflik yang stabil” yang ditandai oleh kerjasama, kompetisi dan ketegangan di antara lawan-lawan tanding yang setara (Crouch, 1986:47).

Hubungan antara Soekarno dan PKI selanjutnya merupakan simbiosis, PKI memberikan dukungan lewat MPRS kepada Soekarno sebagai presiden seumur hidup pada bulan Mei 1963 sedangkan Soekarno memberikan jalan bagi PKI untuk membentuk angkatan ke-V. Suasana antagonis inilah yang terdapat di tanah air Indonesia menjelang pemberontakan Gerakan 30 September 1965 (Notosusanto, 1995:26). Namun menurut Leanne S. Mint, sikap PKI seperti itu dikarenakan PKI belum kuat untuk menentang presiden akan tetapi para pemimpin partai lain dan musuh-musuh menyadari fakta bahwa dengan seluruh cabang-cabangnya mengontrol dukungan massa yang terbesar dan terorganisir rapi di tanah air (Mint, 2002:283). Berdasarkan pendapat di atas maka PKI akan mengambil alih kekuasaan pemerintah pada saat mereka memiliki sumber daya yang cukup.

Partai Komunis Indonesia mulai melancarkan aksi-aksi sepihak, yakni tindakan-tindakan illegal oleh anggota-anggota organisasi massanya seperti BTI untuk menguasai tanah yang bukan haknya. PKI pula melancarkan pula dengan apa yang dinamakan *ofensif revolusioner*, dengan jalan menyerang secara pribadi, *character assassination* pihak-pihak yang dianggap sebagai lawannya melalui media massa, demonstrasi, poster-poster dan alat-alat agitasi propaganda lainnya (Notosusanto, 1995:25-2). Aksi-aksi PKI di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali pada tahun 1963, PKI secara agresif dengan ormas-ormasnya terutama Barisan Tani Indonesia (BTI)

dan Pemuda Rakyat melakukan kampanye aksi sepihak. PKI menjalankan *Landreform* dengan cara menguasai tanah-tanah pertanian yang melanggar UU Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 untuk dibagikan kepada petani penggarap dan melaksanakan Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH). Hal ini memberikan legitimasi bagi PKI untuk melakukan teror dan pembunuhan diperbagai daerah sehingga menimbulkan ketakutan

Posisi PKI semakin kuat dengan dibentuknya kabinet Dwikora pada tanggal 27 Agustus 1964, yang didalamnya duduk beberapa tokoh PKI sebagai menteri. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena menurut William Abenstein dan Edwin Fogelman, ada tiga cara klasik yang dipergunakan untuk mendapatkan kekuasaan sebagai berikut: (1) Mereka menyatakan diri dalam propaganda sebagai partai milik rakyat yang mengabdikan pada kebebasan demokrasi, keadilan sosial dan menentang semua bentuk reaksi serta ketidakadilan sosial; (2) mengadakan infiltrasi atau penyusupan ke dalam partai politik, serikat buruh, dewan tentara dan pemerintah daerah; (3) kekerasan atau kudeta (Abenstein dkk., 1990:28).

Gerakan 30 September 1965

Kemelut politik di atas mencapai puncak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 dengan dilancarkan Gerakan 30 September 1965. Secara fisik-militer gerakan akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Bataliyon I Resimen Cakrabirawa (sekarang Paspampres) selaku pimpinan formal seluruh gerakan. Mereka mulai bergerak pada tanggal 1 Oktober 1965 yang didahului dengan gerakan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Kesemuanya dibawa ke sebuah desa Lubang Buaya sebelah Selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusumah Jakarta. Secara kejam mereka dianiaya dan akhorna dibunuh oleh anggota-anggota Pemuda Rakyat, Gerwani dan lain-lain organisasi setelit PKI. Setelah puas dengan kekejamannya, semua jenazah dimasukan ke dalam sebuah sumur tua lalu ditimbun sampah dan tanah (Poespanegoro dkk., 1992:389-340).

Melalui siaran RRI yang mereka kuasai, Untung menyiarkan tujuan gerakannya yaitu untuk melindungi presiden Soekarno dari suatu kudeta yang direncanakan oleh suatu dewan yang terdiri dari jenderal-jenderal Jakarta yang korup dan menikmati penghasilan tinggi yang menjadi kaki tangan Neokolim. Namun pada siaran radio jam 11.00, Untung menyiarkan tentang Dewan Revolusi yang telah mengambil alih seluruh kekuasaan negara dan kabinet yang telah demisioner. Sedangkan pada siaran jam 14.00, Untung menyiarkan susunan Dewan Revolusi. Keseluruhan anggota yang tercantum dalam susunan Dewan Revolusi Keputusan No. 1 berjumlah 45 orang (Komando Operasi Tertinggi, 1965:148). Susunan Dewan Revolusi tersebut tidak mencantumkan nama Soekarno.

Dukungan terhadap gerakan tersebut datang dari Oemar Dhani selaku Panglima Angkatan Udara. Angkatan Udara telah dan selalu mendukung seluruh gerakan yang progresif revolusioner (Crouch, 1986:109). Dukungan dari Jawa Tengah datang dari Kolonel Sahirman yang disiarkan melalui RRI Semarang pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 13.00 menyatakan dukungannya terhadap Gerakan 30 September dan dibentuknya Dewan Revolusi Daerah Jawa Tengah dan ia sendiri yang akan memimpin Dewan Revolusi Jawa Tengah. Pengumuman itu kemudian disusul dengan Keputusan No.1 yang menyatakan bahwa ia mengangkat Letkol. Inf. Usman Sastrodibroto sebagai pimpinan Kodam VII/Diponegoro. Dukungan dari Jawa Timur datang dari Rustomo dengan pengumuman melalui RRI Surabaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Dukungan pula datang dari daerah-daerah lain seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bali disaat Gerakan 30 September di Jakarta sudah dinyatakan gagal.

Paska meninggal Yani, Soeharto karir militer dan politik Soeharto semakin bersinar, secara *de facto* Soeharto telah menguasai AD. Soeharto kemudian memberlakukan keadaan darurat dan menghubungi panglima angkatan lainnya seperti Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya R.E. Martadinata, Panglima Angkatan Kepolisian Jenderal (Pol) Soetjipto Judodiharjo, dan Deputi Operasi Angkatan Udara Kommodor Leo

Wattimena. Melalui telepon, Soeharto memberi tahu bahwa untuk sementara pimpinan Angkatan Darat dipegang olehnya dan meminta kepada mereka untuk tidak menggerakkan pasukan tanpa sepengetahuan Panglima Kostrad.

Operasi penumpasan Gerakan 30 September 1965 mulai dilakukan dengan mengambil langkah pertama yaitu menetralsir pasukan-pasukan yang ada di sekitar Medan Merdeka yang dipergunakan oleh kaum pemberontak. Pasukan dari Batalyon 530 Brawijaya berhasil diinsafkan namun batalyon 545/Diponegoro berhasil ditarik oleh Gerakan 30 September 1965 ke wilayah Halim Perdanakusumah. Sasaran selanjutnya adalah Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah. Melalui kurirnya, Soeharto meminta kepada Soekarno agar meninggalkan Halim karena pasukannya akan menyerang pangkalan udara dan membersihkan seluruh kekuatan Gerakan 30 September. Soekarno kemudian meninggalkan Halim menuju istana Bogor. Pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 06.10 Pangkalan Udara Halim telah berhasil dikuasai oleh RPKAD (Komando Operasi Tertinggi, 1965:7).

Surat Perintah 11 Maret

Situasi politik yang kacau balau akibat Gerakan 30 September 1965 ditambah lagi keadaan ekonomi dimana laju inflasi pada tahun 1966 mencapai angka 660% (Wanandi, 2014:59). Menghadapi kesulitan perekonomian pemerintah padatanggal 13 Desember 1965 melakukan devaluasi uang rupiah, akibatnya nilairupiah merosot tajam dan harga kebutuhan pokok melonjak naik di pasaran. Hal ini menimbulkan gelombang demonstran itu terdiri dari KAPPI, KAMI, KAPI kemudian muncul juga KABI dari kalangan Buruh, KASI (Sarjana), KAWI (Wanita), KAGI (Guru).

Pada tanggal 6 Oktober 1965 dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Bogor ditetapkan Kebijakan Presiden Soekarno mengenai Penyelesaian G-30 S/PKI. Presiden menggariskan kebijakan: *“Bahwa aspek-aspek Gerakan 30 September akan diselesaikan sendiri oleh Presiden; aspek militer administratif diserahkan penyelesaiannya kepada Mayor Jendral Pranoto, Pelaksanaan Tugas sehari-hari Men/Pangad,*

sedangkan penyelesaian aspek militer teknis masalah keamanan dan ketertiban diserahkan kepada Mayor Jendral Soeharto” (Sekretariat Negara, 1980: 51).

Para demonstran menuntut penyelesaian masalah ini secepatnya namun sampai dengan terbentuknya Front Pancasila tanggal 26 Oktober 1965 presiden Soekarno belum memenuhi tuntutan itu. Front Pancasila kemudian pada tanggal 12 Januari 1966 mendatangi DPR-GR mengajukan tuntutan yang disebut Tritura (Tri Tuntutan Rakyat): Pembubaran PKI, Pembersihan kabinet dari unsur-unsur gerakan 30 September dan perbaikan ekonomi/penurunan harga barang.

Suasana di Jakarta masih tidak menentu dan ketegangan masih terjadi dimana-mana karena pemimpin PKI masih menduduki jabatan di kabinet dan secara resmi. Memang sudah lama TNI AD menghendaki agar Presiden Soekarno melarang secara resmi PKI dan memberhentikan menteri-menterinya yang bergaris kiri, seperti Subandrio. Pada saat yang bersamaan, TNI AD juga menyadari ketidakmungkinannya untuk berhadapan frontal secara langsung dengan Soekarno (Kasenda, 1991: 169). Jika TNI AD berhadapan langsung dengan Soekarno maka akan menimbulkan perlawanan yang semakin banyak dari para pendukung Soekarno, seperti TNI AU, AL, kepolisian, pasukan kawal presiden, dan para pendukung Soekarno. Masih ditambah lagi dukungan Soekarno dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh sebab itu, Sarwo Edhie bersama tentara RPKAD berusaha menekan Soekarno dengan cara memanfaatkan para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi KAMI.

Pada tanggal 10 Maret 1966 presiden Soekarno mengumpulkan beberapa elemen masyarakat yang bergabung dalam partai politik dan ormas agar mengutuk Tritura. Permintaan tersebut tentu saja ditolah oleh Front Pancasila sehingga pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil terutama yang berkaitan dengan pembubaran PKI. Sehingga pada keesokan harinya kabinet mengadakan sidang paripurna untuk membahas krisis yang memuncak. Sidang diboikot oleh demonstran dengan melakukan pengempesan ban mobil sepanjang jalan yang

menuju istana tempat sidang kabinet berlangsung. Sewaktu Presiden berpidato dia diberi tahu oleh Brigadir Jenderal Subur (Cakrabirawa) bahwa di luar istana ada pasukan tanpa tanda pengenal pada seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Mayor Jenderal Amir Machmud selaku Panglima Kodam V/Jaya namun Presiden meninggalkan sidang dan menyerahkan pimpinan sidang kepada J. Leimena. Presiden kemudian menuju istana Bogor bersama Waperdam I Dr. Subandrio, Waperdam III Dr. Chaerul Saleh. Kemudian J. Leimena menutup sidang tersebut kemudian meninggalkan Jakarta dengan mobil menyusul Presiden Soekarno menuju istana Bogor.

Soekarno disusul oleh Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Mayor Jenderal M. Yusuf dan Mayor Jenderal Amir Machmud atas perintah Jenderal Soeharto selaku Menteri/ Pangad. Motivasinya adalah agar presiden tidak merasa terpengaruh dan supaya yakin bahwa angkatan darat tetap siap sedia asalkan diberi kepercayaan penuh. Sebelum berangkat ketiga Jenderal itu menanyakan pesan untuk Presiden. Jenderal Soeharto menjawab "Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya, beliau akan mengerti" (Poespanegoro, dkk, 1992, 412). Latar belakang ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah meletusnya Gerakan 30 September 1965 antara Soekarno dan Soeharto terdapat perbedaan kunci bagi usaha meredakan ketegangan. Menurut Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan berhenti sebelum rasa keadilan rakyat terpenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan. Sebaliknya Soekarno tidak mungkin membubarkan PKI karena bertentangan dengan Dokrin Nasakom yang telah dicanangkan keseluruh dunia.

Namun pada pertemuan selanjutnya Jenderal Soeharto menyatakan bersedia menjadi bempere dalam membubarkan PKI untuk meredakan pergolakan, asal diberi kebebasan bertindak oleh presiden. Pesan Mayjen. Soeharto yang disampaikan kepada tiga perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor itu pada dasarnya berkaitan dengan kesanggupan tersebut

(Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1994:139).

Presiden di dampingi oleh tiga dari empat orang Wakil Perdana Menteri yaitu Subandrio, Chaerul Saleh, Leimena dan salah seorang dari isterinya yaitu Hartini. Putusan yang dihasilkan dalam pertemuan itu adalah Surat Perintah 11 Maret 1965 (Supersemar). Dimana di dalamnya Presiden memerintahkan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggapnya perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan, stabilitas pemerintahan dan revolusi, serta juga menjamin keselamatan pribadi serta kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi kesatuan Republik Indonesia dan untuk meneruskan segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi (Crouch, 1986:209). Walaupun Supersemar bukan berarti peralihan kekuasaan namun secara *de facto*, Soeharto membubarkan PKI dan membubarkan kabinet Dwikora.

Kedudukan Soeharto makin kuat setelah MPRS mengadakan Sidang Umum ke IV padatanggal 20 Juni 1966. Salah satu ketetapan penting adalah, TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris MPRS RI, yang berisi mengukuhkan adanya Surat Perintah Sebelas Maret tersebut. Dengan demikian Soekarno tidak dapat mencabut kembali Supersemar dan memberikan landasan yang kuat kepada Soeharto untuk melakukan kegiatan kenegaraan.

Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden Soekarno menyampaikan Pelengkap Nawaksara di hadapan pimpinan MPRS. Dan, dalam musyawarah tanggal 21 Januari 1967 MPRS menyatakan bahwa presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan konstitusi sehingga pada tanggal 9 Pebruari 1967 mengeluarkan resolusi bahwa apa yang dilakukan oleh presiden dapat membahayakan negara. Oleh karena itu MPRS harus mengadakan sidang Istimewa untuk memberhentikan Soekarno dari jabatan presiden dan memerintahkan kepada Kehakiman untuk

mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan secara hukum (Joeniarso, 1990:131).

Memotong Pilar-Pilar Kekuasaan Soekarno Membubarkan PKI

Sikap Soekarno tetap tidak mau membubarkan Partai Komunis Indonesia dan tetap menolak ketetapan MPRS dan penjabarannya. Hal ini menyebabkan Soeharto dan Nasution serta didukung oleh angkatan lainnya kecuali Angkatan Udara sampai pada kesimpulan bahwa presiden tidak mau menyesuaikan dengan kondisi yang memerlukan kebijakan baru.

Soeharto tidak secara terbuka mengeluarkan perintah kepada panglima-panglima daerah untuk menahan pimpinan-pimpinan Partai Komunis Indonesia dan membubarkannya. Soeharto tidak mengirimkan perintah resmi dan tertulis kepada panglima-panglima daerahnya untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia, tetapi melalui pesan bahwa Partai Komunis Indonesia harus dihancurkan. Oleh karena itu para panglima daerah memberikan reaksi yang berbeda-beda, cara yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Di Jakarta, sampai dengan 16 Oktober, sudah 1.334 orang yang ditahan dengan alasan terlibat PKI (Elson, 2001:239). Pada pertengahan Nopember 1965 jumlah itu meningkat menjadi 2.200 orang.

Daerah-daerah lain seperti Jawa Barat dimana para pejabat militer menciduk para pimpinan dan aktivis Partai Komunis Indonesia sehingga sampai dengan bulan Desember telah ditahan sebanyak 10.000 orang. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Angkatan Darat bergerak lebih cepat dan keras karena basis utama pendukung Partai Komunis Indonesia dan Soekarno. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Bali tidak luput dari penumpasan PKI. Di daerah, Soeharto bergerak dengan hati-hati menindak Partai Komunis Indonesia dengan memanfaatkan kebencian berbagai elemen masyarakat baik dari kalangan nasionalis maupun agama. Pada pertemuan di Jakarta tanggal 9-11 Nopember 1965, Muhammadiyah mengumumkan bahwa pembasmian Gertapu/PKI sama dengan perang sabilillah

(Ricklefs, 2008:595). Tentara juga melatih beladiri agar bisa membantu dalam usaha pembersihan oknum-oknum Gerakan 30 September yang berada dalam instansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan/pendidikan (Ramadhan, 2014:37). Masyarakat yang terlatih ini juga dilibatkan dalam gerakan penumpasan PKI yang menyebabkan gerakan lebih cepat.

Penangkapan dan pembunuhan terhadap PKI lebih masif setelah dikeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar maka pada tanggal 12 Maret 1966 Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS menandatangani Surat Keputusan Presiden/Pangti/Mandataris MPRS/PBR No.1/3/1966, yaitu membubarkan PKI dan organisasi-organisasi yang bernaung dan berlingung di bawahnya di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Pada bulan Oktober 1966, pembunuhan terjadi di Jawa Tengah, selanjutnya pada bulan November merembet ke Jawa Timur, dan baru pada bulan Desember terjadi di Pulau Bali” (Wardaya, 2006:172). Pembasmian terhadap PKI pada saat itu digambarkan sebagai salah satu pembunuhan massal terburuk sepanjang abad ke-20. Dan, dengan hancurnya PKI maka hancur pula pilar penting kekuasaan Soekarno.

Penangkapan Para Menteri

Menghadapi gelombang aksi masa maka Soekarno mengadakan *reshuffle* kabinet pada tanggal 21 Pebruari 1966 yang diberi nama Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Pada hari pelantikan Kabinet tersebut tanggal 24 Pebruari 1966 terjadi demonstrasi yang memprotes susunan kabinet dimana presiden mengangkat orang-orang yang diragukan untuk menyelesaikan peristiwa Gerakan 30 September seperti Dr. Soebandrio, Ir. Surachman, Oei Tjoe Tat, SH., sedangkan nama Jenderal Nasution disingkirkan.

Soeharto kemudian menahan para menteri yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Tindakan Soeharto ini juga dipicu oleh aksi yang dilakukan oleh Waperdam III Chaerul Saleh membacakan pengumuman tertulis presiden Soekarno pada tanggal, 17 Maret 1966 yang menegaskan bahwa Supersemar

bukan berarti penyerahan kekuasaan Presiden kepada Menpangad. Dampaknya, pada tanggal 18 Maret 1966, Menpangad selaku Komkamtib melakukan penahanan terhadap 15 orang menteri. Kelimabelas menteri itu adalah sebagai berikut: Dr. Soebandrio (Waperdam I, Kompartemen Luar Negeri); Dr. Chaerul Saleh (Waperdam III, Ketua MPRS); Ir. Setiadi Reksoprodo (Menteri urusan Listrik dan Ketenagaan); Sumardjo (Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan); Oei Tjoe Tat, SH. (Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet); Ir. Surachman (Menteri Pengairan Rakyat dan Pembangunan Desa); Yusuf Muda Dalam (Menteri Urusan Bank Sentral, Gubernur Bank Indonesia); Armunanto (Menteri Pertambangan); Sutomo Martopradoto (Menteri Perburuhan); A. Astrawinata, SH. (Menteri Kehakiman); Mayjen. Achmadi (Menteri Penerangan); Drs. Moh. Achadi (Menteri Transmigrasi dan Koperasi); Letkol. Imam Safe'i (Menteri Khusus Urusan Keamanan); J.K. Tamukaka (Menteri Sekretaris Jenderal Front Nasioanal); Mayjen. Dr. Soemarmo (Menteri/Gubernur Jakarta Raya). Salah satu anggota kabinet yang lolos adalah Surachman tetapi akhirnya terbunuh di Blitar Selatan pada tahun 1968. Sedangkan Chaerul Saleh mati di penjara pada tahun 1967 (Ricklefs, 2008:598).

Para menteri itu kemudian diajukan ke pengadilan diawali dengan terdakwa Menteri Menteri Urusan Bank Sentral, Gubernur Bank Indonesia, Yusuf Muda Dalam pada tanggal 30 Agustus 1966 dengan dakwaan melakukan korupsi, subversi, mengacaukan perekonomian, penyelundupan senjata dan mempunyai enam isteri. Menurut Sundhaessen (1968:428), "tidak diragukan lagi bahwa sampai tingkat tertentu Soebandrio setidak-tidaknya telah membantu, pada awal 1965, desas-desus tentang adanya sebuah Dewan Jenderal yang sedang berkomplot untuk menggulingkan pemerintah dan dia bahkan tidak berusaha menutup-nutupi peran yang dimainkannya dalam surat Gilchrist, yang nampaknya telah membantu meyakinkan anggota-anggota persekongkolan kudeta di sekitar Untung, pimpinan PKI".

Pada tanggal 1 Oktober 1966, Subandrio diajukan ke Mahmillub atas tuduhan terlibat dalam kudeta Untung dan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang terlibat setelah bulan Oktober 1965 dan oditur militer menjatuhkan hukuman mati kepada Soebandrio. Hal ini menyebabkan posisi Soekarno mulai goyah. Hal ini tak dapat dipungkiri karena Soebandrio menduduki posisi penting dalam struktur kabinet Dwikora yaitu sebagai Waperdam I dan Kompartemen Luar Negeri serta Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI).

Pengadilan atas Oemar Dhani dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1966, oditur militer mengemukakan bahwa Marsekal Udara itu yang keterlibatannya dalam kudeta Untung hampir-hampir tidak diperdebatkan lagi. Dimana dalam persidangan terungkap bahwa Oemar Dhani telah memberitahukan kepada Presiden sebelum adanya pembunuhan terhadap enam jenderal tentang adanya Gerakan 30 September 1965 yang sudah siap mencegah kudeta yang hendak dilancarkan oleh Dewan Jenderal. Hal ini bertentangan dengan pernyataan tertulis yang disampaikan oleh presiden Soekarno kepada Mahmillub dimana dia menegaskan bahwa kudeta Untung itu diluar dugaannya sama sekali.

Rangkaian sidang-sidang itu merupakan senjata yang ampuh untuk mengikis kekuasaan Soekarno karena setelah sidang-sidang itu berlangsung berbagai elemen masyarakat berkumpul di Bandung Jawa Barat dan menuntut agar presiden dihadapkan pada pengadilan.

Pembersihan juga dilakukan dalam departemen-departemen. Pada tanggal 29 Oktober 1966, Brigjen Syarif Thayeb selaku Menteri Pendidikan Tinggi, menskors anggota akademik maupun administratif yang terlibat PKI ataupun organisasi afiliasi PKI yang ada di lingkungan departemennya (Elson, 2001:243).

Pembersihan Tentara

Di kalangan militer sendiri serangkaian pembersihan dan alih tugas dilaksanakan. Pada tanggal 14 Oktober 1965 Mayjend. Pranoto Reksosamudro ditangkap karena dituduh terlibat dalam Gerakan 30 September (Sularto,

2001:307). Di Jawa Barat yang pandang penting Mayjen. Adjie yang bersikap mendua terhadap perubahan politik terakhir ditugaskan mengikuti kursus-kursus di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) tetapi berhasil menolak. Sehingga perwira-perwira anti Soekarno di Bandung membentuk apa yang dianggap sebagai komando tandingan dan dengan cepat dapat menguasai seluruh divisi. Sehingga tanggal 20 Juli 1966 Mayjen. Adjie secara resmi digantikan oleh Mayjen. Dharsono.

Langkah pembersihan di jajaran Kodam Diponegoro menurut panglima Diponegoro yang baru, Mayor Jenderal Surono, kira-kira 20% dari divisi telah dianggap terlibat dalam gerakan 30 September. Banyak perwira dan prajurit biasa ditahan dan akhirnya kira-kira 1.500 orang dipecat dengan tidak hormat sedangkan 1.100 ditanggihkan kenaikan pangkatnya, dipensiunkan dan dihukum (Crouch, 1986:260). Keadaan yang berbeda dengan divisi Brawijaya Jawa Timur, dimana hanya sedikit perwira yang bersangkutan paut dengan gerakan 30 September 1965, sehingga langkah pembersihan merupakan lanjutan dari kekalahan gerakan tersebut. Hal ini disebabkan karena para Soekarno tidak seperti perwira-perwira di Jawa Tengah, mereka tetap anti komunisme sehingga banyak perwira Brawijaya tetap memegang komando lokal. Akhirnya pembersihan Angkatan Darat terhadap PKI tahun 1965 dan keberhasilannya dalam menurunkan Presiden Soekarno dari kedudukannya, menjadikan Angkatan Darat sebagai kekuatan dominan satu-satunya di atas panggung politik Indonesia (Crouch, 1986:389).

Sedangkan dalam jajaran Angkatan Udara di bawah tekanan Soeharto, Sri Muljono Herlambang digantikan oleh Rusmin Nurjadin yang tidak mempunyai hubungan dekat dengan Soekarno sebagai panglima yang baru. Pengangkatan ini memungkinkan dilaksanakannya pembersihan besar-besaran terhadap Soekarno dalam tubuh Angkatan Udara (Sundhaessen, 1968:412-413). Pada bulan Maret 1966, sebanyak 306 perwira ditahan, termasuk Omar Dhani dan Sri Mulyono Herlambang. Cakrabirawa, pasukan pengaman

presiden sebagai batalion yang terlibat langsung dalam pemberontakan itu dibekukan.

Angkatan Kepolisian termasuk mengalami pembersihan yang lunak dimana dalam pertengahan tahun 1966 sebanyak 713 orang pecat dan sebagian diberhentikan sementara termasuk 2 perwira senior dan 35 perwira menengah. Sebagian besar anggota yang kena pembersihan adalah personil yang berpangkat rendah terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah dimana polisi sering memihak PKI dalam percaturan politik yang berskala kecil.

Pembersihan di tubuh Angkatan Laut baru dimulai sejak tahun 1968 setelah naiknya Laksamana Muda Sudoarmo menggantikan Muljadi yang dipindahtugaskan menjadi Duta Besar RI untuk Uni Soviet. Hal ini terjadi karena Angkatan Laut dengan tulang punggungnya Korps Marinir (KKO) Letnan Jenderal Hartono dan Panglima Angkatan Laut Muljadi menolak untuk melakukan pembersihan sebesar tuntutan Angkatan Darat.

Setelah naiknya Sudomo, beberapa perwira Angkatan Laut lainnya seperti Puguh mantan Menteri Urusan Maritim, Laksamana Jatidjan dan Kepala Pusat Penerangan Angkatan Laut Komodor Samsu Sutjipto dikenakan tahanan rumah.

Perwira-perwira lainnya yang dipandang Soekarno dialih-tugaskan ke jabatan baru seperti duta besar atau jabatan lainnya yang menguntungkan.

Pembersihan MPRS/DPR-GR

Menyusul penangkapan para menteri yang salah satunya adalah Waperdam III Chaerul Saleh yang juga sebagai Ketua MPRS, pimpinan MPRS segera membersihkan majelis itu dari unsur-unsur Komunis beserta simpatisannya. DPR-GR memecat 36 orang anggotanya dari Partai Komunis Indonesia. Sebagai penggantinya Soeharto menunjuk anggota baru parlemen untuk mengganti anggota yang telah disingkirkan dan menggelar sidang pada bulan Maret 1967 (Ricklefs, 2008:605). Pada sidang tanggal 20 Juni 1966, majelis memilih Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai ketua. Sidang tersebut merupakan kemenangan besar bagi Soeharto dan sebaliknya merosotnya kekuasaan

Soekarno karena dalam sidang selanjutnya pada tanggal 21 Juni 1966, majelis yang sudah “dibersihkan” itu menyetujui dan memperkuat Surat Perintah 11 Maret menjadi Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Sehingga dengan adanya ketetapan itu presiden Soekarno tidak dapat menarik kembali *Supersemar*.

Legitimasi baru itu menempatkan Soeharto pada posisi yang kuat sehingga tanggal 25 Juli 1966 bersama dengan Soekarno menyusun Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) dimana dalam susunan kabinet itu Soekarno duduk sebagai Presiden sedangkan Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet. Dalam komposisi kabinet baru itu tentu saja peranan Soeharto sangat besar seperti yang dipaparkan Ulf Sundhaessen, kabinet baru terdiri dari sebuah Presidium yang beranggotakan lima orang menteri utama di dalam kabinet duduk 12 anggota ABRI, 6 di antaranya dari Angkatan Darat. Sebanyak 84 jabatan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal, 32 dipegang oleh ABRI sehingga secara *de facto*, Soeharto bertindak sebagai Perdana Menteri (Sundhaessen, 1968:417).

Hal ini menyebabkan dualisme kepemimpinan sehingga tanggal 7 Pebruari 1967 mengirim surat kepada Ketua Presidium Kabinet agar diadakannya pembagian tugas yang jelas. Namun surat itu ditolak oleh Soeharto sehingga tanggal 22 Pebruari 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Jenderal Soeharto selaku pemegang kekuasaan Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 dan tanggal 12 Maret 1967 Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden. Selanjutnya pada bulan Maret 1968 dilakukan Sidang Umum MPR Ke-V, Salah satu ketetapan yang dihasilkan adalah Ketetapan MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968 pada 27 Maret 1968 yang pengukuhan Soeharto sebagai Presiden.

KESIMPULAN

Kemelut politik pada tahun 1959 memberikan peluang kepada Soekarno untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Dalam demokrasi Terpimpin ada tiga kekuatan yang bersaing: Soekarno, PKI dan Angkatan Darat

(AD). Soekarno merangkul PKI untuk mengimbangi kekuasaan AD, sehingga hubungan antara Soekarno dengan PKI bersifat simbiosis. Titik nadir persaingan ini dengan dilancarkannya Gerakan 30 September 1965. Gerakan tersebut memberikan peluang kepada Soeharto dan Angkatan Darat untuk menghancurkan lawan-lawannya dalam Demokrasi Terpimpin.

Soeharto menghancurkan pilar-pilar kekuasaan Soekarno setelah mendapatkan Surat Perintah Sebelas Maret (*Supersemar*). Pilar-pilar kekuasaan Soekarno terdiri dari: (1) PKI yang dalam MPRS mengangkatnya sebagai presiden seumur hidup; (2) Menteri dalam Kabinet Dwikora yang terdiri dari 15 orang yang dipandang Sukarnois dan terlibat dalam Gerakan 30 September 1965; (3) Tentara, dimana Soeharto melaksanakan serangkaian pembersihan dan alih tugas di ke empat angkatan; (4) Pembersihan anggota MPRS/DPR-GR dengan memecat 36 orang anggotanya dari Partai Komunis Indonesia dan menggantikan dengan anggota baru yang ditunjuk Soeharto.

Rangkaian pembersihan itu telah menghancurkan pilar-pilar kekuasaan Soekarno, sebaliknya mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roslan, 1961, Penjelasan Manipol-Usdek, *Bahan-bahan Indoktrinasi*, A. Reachim. Djember: Penerbit Sumber Ilmu.
- Abdurrahman, Dudung, 2007, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Crouch, Harold, 1986, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Elson, R.E. 2001, *Soeharto, sebuah Biografi Politik*, Jakarta: Pustaka Minda Utama.
- _____, 2009, *Soeharto, sebuah Biografi Politik*, Jakarta: Pustaka Minda Utama.
- Fic M, Fictor, 2005, *Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Studi tentang Konspirasi*, Jakarta: Obor.
- Gootschalk, 1985, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Hidayat, Iman, 2009, *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara Press.

- Joeniarto, 1990, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasenda, Peter, 1991, *Sarwo Edhie Wibowo dan Operasi Militer: Penghancuran Gestapu/dan Pendobrak Orde Lama*, Jakarta: Prisma.
- Komando Operasi Tertinggi, 1965, *Tjataan Kronologis di Sekitar Peristiwa G30S*, Keputusan No. 1 tentang Susunan Dewan Revolusi Indonesia, Jakarta: Seksi Penerangan.
- Maran, Rafael Raga, 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Mint, Jeanne S. 2002, *Marx, Marhaen, akar Sosialisme di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Na'imah, Hayatun, 2015, *Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Khazanah, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1, Juni 2015.
- Notosusanto, Nugroho, 1995, *Angkatan Bersenjata dalam Percaturan Politik Indonesia. Dalam Analisa Kekuatan Politik di Indonesia. Pilihan Artikel Prisma*, Jakarta: LP3ES.
- Ramadhan, Gandhi, 2014, *Peranan Sarwo Edhie Wibowo dalam Penumpasan Gerakan 30 September 1965 di Jakarta dan Jawa Tengah*, Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ricklefs, MC, 2008, *Sejarah Indonesia Modern*, Jakarta: Serambi.
- Sekneg. Republik Indonesia, 1994, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*: Jakarta.
- Sholehuddin, Abi, 2015, "Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965", AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 3, No 1, Maret 2015, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.
- Soekarno, 2001, *Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato Soekarno)*, dihimpun oleh Wawan Tunggul Alam, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerojo, Soegiarso, 1988, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30S-PKI dan Peran Bung Karno*, cet ke 4, Jakarta: Intermedia.
- Subroto, Hendro, 2009, *Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*, Jakarta: Kompas.
- Sularto, St., 2001, *Dialog dengan Sejarah; Soekarno Seratus Tahun*, Jakarta: Buku Kompas.
- Sunarso, 2012, *Perkembangan Politik Pendidikan di Indonesia (Kajian Era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi)*, Laporan Penelitian, Jurusan PKnH FIS Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sundhaeusson, Ulf, 1986, *Politik Militer Indonesia 1945-1947*, Jakarta: LP3ES.
- Wanandi, Sofyan, 2014, *Menyibak Tabir Orde Baru, memoar politik Indonesia 1965-1998*, Jakarta: Buku Kompas.
- Wardaya, Baskara. T. 2006, *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G30S*. Yogyakarta: Galangpress.

KONFLIK SOSIAL ANTAR DESA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DI BIMA

Ahmadin

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima
madin_uni15@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pemikiran yang membuat kita terpengaruh, hal ini yang menjadikan konflik dalam diri setiap manusia. Dalam tulisan ini adalah yang diangkat konflik sosial dalam perspektif sejarah di Bima dengan metodologi kualitatif. Penyebab terjadinya konflik sosial adalah *pertama*, faktor kenakalan remaja. *kedua*, watak keras masyarakat karena masing-masing setiap pribadi mempunyai karakter dan sifat bawaan. *ketiga*, pergeseran budaya. *keempat*, kinerja struktur pemerintah setempat yang belum maksimal. dan *kelima*, lambanya tindakan pihak keamanan. Dampak konflik sosial antar Desa Secara positif atas peristiwa ini mengharuskan peningkatan kinerja pemerintah sesuai kewenangannya karena dalam sisi negatif menghambat proses perekonomian, pendidikan, politik, dan adanya tekanan sosial secara psikologis. secara pengetahuan upaya penyelesaian konflik hanya bersifat yaitu islah. sejarah mencatat konflik sosial yang terjadi di Bima sudah sangat mengawatirkan karena pada setiap *moment* dalam Desa masing-masing sudah mengalami *mental down* atau terkikisnya keimanannya untuk menggunakan akal sehat dalam menerima dan memberi pemikiran. Kemudian usaha para tokoh untuk memberikan konsep penyelesaian konflik dengan cara musyawarah mufakat dalam rangka penyatuan persepsi kemajemukan masyarakat. Pandangan sejarah bagi orang Bima masalah konflik waktu dulunya sebagaimana dicontohkan oleh para tokoh-tokoh yang diprakarsainya dari peradaban selalu diperlihatkan oleh para pejuang akan berpandangan kontra produktif terhadap konflik antar Desa dan ini merupakan sebuah kesalahan fatal karena muatan konflik berbentuk perang ini sangat tidak manusiawi, sebab meliputi rentetan saling melukai, menghancurkan, menyerang bahkan saling membunuh satu sama lain.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Perspektif Sejarah dan di Bima

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi pada masyarakat disebabkan masalah perbedaan kepentingan yang sering kali membuat Ketakutan, keresahan, kehilangan, dan kehancuran. salah satu efek konflik adalah masyarakat tidak dapat beraktifitas sebagaimana keharusan untuk mencari rezeki. Meskipun demikian, hanya karena sesuatu yang berbeda, misalnya sebuah kelompok atau persoalan pribadi yang pada dasarnya tidak terlalu membuat terjadinya konflik akan tetapi dengan mudahnya menciptakan suasana konflik terhadap kelompok atau pribadi lain tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan.

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode kualitatif. Dalam pantauan peneliti yang menjadi hal utama sebagai pematik dalam memilih judul ini bahwa konflik antar Desa yang sudah lajim merutinitaskan konflik sosial

dalam bentuk tawuran, sehingga membuat efek-efek negatif yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Kesulitan masyarakat adalah dalam hal melaksanakan aktifitas kesehariannya yang berahir pada kesenjangan sosial, tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi, mandeknya proses pendidikan, tertekannya generasi terhadap perkembangan psikologis dan meningkatkan rasa dendam antar Desa. Disamping itu, konsekuensi negatif yang samajuga akan dialami oleh Desa-Desa tetangga dan semua masyarakat pengguna jalan raya penghubung kedua Desa yang mutlak diblokir jika konflik sedang terjadi.

Deskripsi Geografis dan Peta Wilayah

Bima adalah daerah yang terletak di pulau Sumbawa. pulau Sumbawa merupakan salah satu pulau dari Propinsi Nusa Tenggara Barat. tepatnya terletak di sebelah pulau Timur Pulau Lombok dan sebelah Barat pulau Nusa Tenggara Timur atau Berseberangan dengan Kabupaten

Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur dan pada sebelah selatannya terdapat Samudera Australia.

Pulau Sumbawa didiami oleh masyarakat yang sukunya berbeda yaitu suku samawa dan suku mbojo atau di singkat dengan Sambo dan ada juga suku pendatang tapi tidak terlalu eksis apalagi berkembang. penyebaran mereka tidak bisa dilepaskan dari suku Mbojo. menurut sejarah Bima, Bima dulunya ditempati oleh beberapa kerajaan seperti kerajaan sanggara yang berada di wilayah sanggar dan sekarang menjadi salah satu Kecamatan yang berada di daerah Kabupaten Bima dan kerajaan Bima yang berada dalam wilayah Kota Bima.

Bima, mayoritas masyarakatnya adalah suku Mbojo dan menganut agama Islam dan dikenal dengan kuat agamanya. pada tahun 2003 secara administrative Bima terbagi menjadi dua daerah yaitu Kota (baru) dan Kabupaten Bima. Nama Bima dalam sejarahnya adalah sang Bima yang berpetualang mengelilingi wilayah kekuasaan para ncuhi seluruh wilayah Pulau Sumbawa. dalam pewayangan Jawa, Bima identik dengan orang yang sangat kuat, badannya besar, ulet dan lain sebagainya.

Orang Bima punya watak religius yang khas. Sejarawan Belanda Dr. Peter Carey (1986) yang dikutip dari bukunya Muslimin Hamzah memuji daerah ini sebagai kesultanan di Indonesia Timur yang tersohor karena ketaatannya pada Agama Islam. Pujian itu tidak berlebihan. Banyak ulama terkemuka dari Bima. Di kalangan Ashhab Al-Jawiiyin atau saudara kita orang Jawi - demikian sumber arab - di Mekkah sekitar abad ke-18, Syekh Abdulgani Bima telah menjadi guru besar di madrasah Haramayn. Salah satu muridnya adalah KH. Hasyim Asy'ary, pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Islam demikian melekat, antara lain karena peranan kesultanan yang begitu kuat, yang menjadikan Islam sebagai agama raja dan kerajaan. Seluruh elemen kekuasaan didayagunakan untuk kepentingan Islam. Raja misalnya menetapkan aturan untuk membangun Masjid Jami di tiap kecamatan. Dananya dari hasil menggarap tanah negara baik itu *Dana Pajakai* dan *Dana Ngaji*. Sultan juga menunjuk pemimpin agama di tiap kecamatan

yakni *Lebe Na'e*. Yang mengesankan, seperti cara Sultan Muhammad Salahuddin.

Teori Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Dalam sosiologi, kita mengenal adanya teori konflik yang berupaya memahami konflik dari sudut pandang ilmu sosial. Teori konflik adalah sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat.

Teori konflik yang terkenal adalah teori yang disampaikan oleh Karl Mark, bagi Mark, konflik adalah sesuatu yang perlu karena merupakan sebab terciptanya perubahan. Teori konflik Mark yang terkenal adalah teori konflik kelas dimana dalam masyarakat terdapat dua kelas yaitu kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin (proletar). Kaum borjuis selalu mengeksploitasi kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi yang dilakukan kaum borjuis terhadap kaum proletar secara terus menerus pada akhirnya akan membangkitkan kesadaran kaum proletar untuk bangkit melawan sehingga

terjadilah perubahan sosial besar, yaitu revolusi sosial.

Dalam perkembangannya teori konflik dibahas lebih spesifik dengan lahirnya cabang baru sosiologi yang membahas tentang konflik yaitu sosiologi konflik. Istilah sosiologi konflik diungkapkan oleh George Simmel tahun 1903 dalam artikelnya *The Sociology of conflict*. George Simmel kemudian dikenal sebagai bapak dari sosiologi konflik. Dalam tulisan berikutnya akan dibahas beberapa tokoh dan pandangannya mengenai teori konflik seperti Max Weber, Emile Durkheim, Ibnu Khaldun dan George Simmel.

Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa bagaimana dinamika konflik dalam sejarah manusia sesungguhnya ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial (*ashobiyah*) berbasis pada identitas, golongan, etnis, maupun *tribal*. Kelompok sosial dalam struktur sosial mana pun dalam masyarakat dunia memberi kontribusi terhadap berbagai konflik (Novri Susan 2009: 34). Dari sini dapat kita lihat bagaimana Ibnu Khaldun yang hidup pada abad ke-14 juga telah mencatat dinamika dan konflik dalam perebutan kekuasaan.

Max Weber berpendapat konflik timbul dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya (Novri Susan 2009: 42). Weber berpendapat bahwa relasi-relasi yang timbul adalah usaha-usaha untuk memperoleh posisi tinggi dalam masyarakat. Weber menekankan arti penting *power* (kekuasaan) dalam setiap tipe hubungan sosial. *Power* (kekuasaan) merupakan generator dinamika sosial yang mana individu dan kelompok dimobilisasi atau memobilisasi. Pada saat bersamaan *power* (kekuasaan) menjadi sumber dari konflik, dan dalam kebanyakan kasus terjadi kombinasi kepentingan dari setiap struktur sosial sehingga menciptakan dinamika konflik.

Emile Durkheim dalam salah satu teorinya gerakan sosial menyebutkan kesadaran kolektif yang mengikat individu-individu melalui berbagai simbol dan norma sosial. Kesadaran kolektif ini merupakan unsur mendasar dari

terjaganya eksistensi kelompok. Anggota kelompok ini bisa menciptakan bunuh diri altruistik untuk membela eksistensi kelompoknya (Novri Susan 2009: 45). Walaupun tidak secara tersirat membahas teori konflik namun teori Weber ini pada dasarnya berusaha untuk menganalisa gerakan sosial dan konflik. Gerakan sosial bagi Weber dapat memunculkan konflik seperti yang terjadi pada masa Revolusi Prancis.

George Simmel berangkat dari asumsinya yang bersifat realis dan interaksionalis. Bagi Simmel ketika individu menjalani proses sosialisasi mereka pada dasarnya pasti mengalami konflik. Ketika terjadinya sosialisasi terdapat dua hal yang mungkin terjadi yaitu, sosialisasi yang menciptakan asosiasi (individu berkumpul sebagai kesatuan kelompok) dan disosiasi (individu saling bermusuhan dalam satu kelompok). Simmel menyatakan bahwa unsur-unsur yang sesungguhnya dari disosiasi adalah sebab-sebab konflik.

Sedangkan menurut Adam Kuper (1994:155), dalam bukunya Mansour Fakhri "*Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*" bahwa konflik adalah prespektif yang mewarnai setiap aspek interaksi manusia dan struktur sosial atau pertikaian terbuka seperti perang, revolusi, pemogokan dan gerakan perlawanan. Jadi jelas bahwa konflik adalah konsep untuk menggeneralisasikan berbagai analisis yang menggunakan pendekatan konflik agar dapat dibedakan dari pendekatan fungsionalis pertukaran atau sistematis. Pada dasarnya pendekatan ini mencoba untuk menjelaskan bukan hanya bagaimana suatu tatanan sosial terpelihara meskipun didalamnya terdapat banyak kesenjangan, namun juga bagaimana struktur sosial mengalami perubahan.

Simmel berargumen ketika konflik menjadi bagian dari interaksi sosial, maka konflik menciptakan batas-batas antara kelompok dengan memperkuat kesadaran internal (Novri Susan 2009: 48). Permusuhan timbal balik tersebut mengakibatkan terbentuk stratifikasi dan divisi-divisi sosial, yang pada akhirnya akan menyelamatkan dan memelihara sistem sosial.

Memahami Konflik Sosial

Bima secara spesifiknya seakan-akan menjadi arena konflik antar Desa. salah satu yang menjadi sampel Desa yang lajimnya sering melakukan konflik adalah Desa Ngali dan Renda. Konflik dalam kontek horisontal (perang antar Desa) maupun konflik-konflik lain yang jenis dan ragamnya berbeda. Yang pada dasarnya antara kedua Desa ini memiliki kebudayaan yang lajim dirayakan setiap selesai musim panen petani dalam bentuk adu jotos rame-rame (*ndempa ndiha*), teknik dalam realisasi budaya ini dibentuklah dua kelompok yang umur dan jumlahnya tidak menentu untuk adu jotos tanpa menggunakan alat bantu lain selain hanya tangan kosong.

Dalam pantauan, yang menjadi hal utama sebagai pematik dalam memilih judul ini adalah kedua Desa ini merupakan Desa yang sudah lajim merutinitaskan konflik sosioial dalam bentuk tawuran, sehingga membuat efek-efek negatif yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Kesulitan masyarsakat antara kedua Desa dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya yang berahir pada kesenjangan sosial, tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi, mandeknya proses pendidikan, tertekanya generasi terhadap perkembangan psikologis dan meningkatkan rasa dendam antara kedua Desa. Disamping itu, konsekuensi negatif yang sama akan dialami oleh Desa-Desa tetangga dan semua masyarakat pengguna jalan raya penghubung kedua desa yang mutlak diblokir mati jika konflik sedang terjadi.

konflik Desa Lain adalah Konflik yang terjadi pada kasus berdarah Sape-Lambu. kasus ketidakcocokan penggunaan lahan/SDA ini disinyalir karena Pemerintah tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga perihal rencana penambangan di daerah tersebut. Hal inilah yang menimbulkan perspektif masyarakat bahwa ada kemungkinan kepentingan politis dan pribadi dari pengesahan Izin Usaha Penambangan di Lambu tersebut begitu juga dengan kasus yang terjadi di Kecamatan Parado yang menewaskan beberapa orang masyarakat Parado.

Sebab-Sebab Terjadinya Konflik Sosial

Ada beberapa teori penyebab konflik menurut James W. Vander Zanden, beberapa teori tersebut sebagai berikut: a) Teori Hubungan Masyarakat, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat; b) Teori Negosiasi Prinsip, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik; c) Teori Kebutuhan Manusia, berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan; d) Teori Identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan; e) Teori Kesalahpahaman Antar budaya, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda; f) Teori Transformasi Konflik, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Ada beberapa faktor penyebab konflik menurut Leopold von Wiese dan Howard Becker (1989:86), beberapa faktor tersebut sebagai berikut: a) Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang

merasa terhibur; b) Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik; c) Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda; d) Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Secara substansi, pointer yang menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam bentuk perang ataupun tawuran ini adalah: a) Kenakalan remaja, Kenyataan sosial muncul karena dibentuk oleh kesadaran dan tidakan seseorang. Karenanya, mereka berusaha menyelami jauh kedalam kesadaran dan subjektivitas pribadi

manusia untuk menemukan pengertian apa yang ada di balik kehidupan sosial. Sungguhpun demikian, anggapan dasar akan adanya beberapa kelebihan strategis dalam sebuah domain wilayah tertentu sebagai kelemahan yang berlawanan bagi komunitas lainnya, memacu pula tindakan kebebasan kehendak dan didukung oleh darah muda yang tidak memiliki pertimbangan konsekuensi negatif yang akan di alami secara pribadi maupun oleh kelompok; b) Watak keras masyarakat kedua desa, kebiasaan dalam aktifitas keharian atau dalam waktu tertentu secara konsisten, akan membentuk karakter sesuai kebiasaan tersebut di lengkapi pula oleh kondisi alam dalam waktu yang bersamaan. Melekatnya dominasi karakter kekerasan pada masyarakat, bukan hal yang hadir secara sederhana, akan tetapi atas dasar budaya *ndempa* pada tahun 80'an kebelakang, bentukan watak atas dasar kebiasaan menanamkan polafikir yang terus melekat dari generasi ke-generasi. Di sisi lain di pengaruhi oleh mayoritas petani yang cenderung kerja keras dibawah terik matahari; c) Pergeseran budaya, Setiap penyimpangan nilai-nilai normatif budaya satu unit analisa sosial pada waktu tertentu dari keadaan pada waktu sebelumnya disebut perubahan kebiasaan masyarakat dan sejauh perubahan itu melibatkan posisi strategis yang mempengaruhi unit tertentu dalam aktifitas masyarakat (Ralf Dahrendorf, 1986: 297). Budaya *ndempa* yang digelar setiap selesai musim panen padi pada tahun 80-an kebelakang, sebagai ajang persahabatan dan kebersamaan antara masyarakat desa. Aktifitas *ndempa* berlangsung lama setiap tahunnya karna tidak ada aktifitas pertanian lagi pasca panen padi, inilah sebuah warisan budaya Bima yang sudah tinggal cerita saja. Seiring perkembangan jaman dan modernisasi, budaya *ndempa* bertangan kosong dan hiburan bergeser pada konflik sosial berjenis perang menggunakan senjata tradisional seperti ketapel batu/kawat runcing, tombak, golok, parang dan batu sebgai media upaya melukai dan membunuh satu sama lain". Menurut peneliti bahwa dalam prgeseran budaya tentang penyebab konflik kedua desa ini juga tidak terkontrolnya perubahan sosial yang baik itu

sudah ada kesiapan atau tidak oleh masyarakat tersebut. Sebagaimana disebutkan sebelumnya mengenai hilangnya kebiasaan aktifitas kebudayaan seperti *ndempa* yang menciptakan ruang hampa aktifitas dan bergeser pada aktifitas-aktifitas moderen yang terus tidak terkontrol; d) Kinerja struktur pemerintah, Setiap antar hubungan antagonis antara kolektifitas individu yang terorganisir yang dapat diterangkan menurut pola-pola struktur sosial, hingga mengindikasikan adanya pertentangan kelompok (Ralf Dahrendorf, 1986:297). “Minimnya komunikasi emosional antara pemerintah desa, terutama tidak adanya langkah-langkah antisipatif terhadap kemungkinan pecahnya perang”. Pihak pemerintah desa jarang bahkan hampir tidak pernah melaporakan kepihak kepolisian manakala ada peristiwa pemicu konflik dengan alasan kekurangan personil kepolisian; e) Lambanya tindakan pihak keamanan, Dengan terus berlarutnya konflik yang begitu lama, menonjolkan pula minimnya kinerja pihak keamanan yang lebih dominan pihak kepolisian. Lemahnya upaya penenangan ini membuat masyarakat kedua desa kecewa terhadap pihak berwenang. Mestinya ada upaya yang sifatnya institusional yang di upayakan oleh pihak hukum, terlepas dari adanya unsur paksaan atau perlawanan dari subyek hukum. Di sini tidak menafikan kinerja pihak kepolisian akan tetapi mereka menonjolkan kinerja yang mengecewakan masyarakat”. Mestinya atas rujukan konflik terus terjadi, maka pihak kepolisian jangan terlalu kaku mesti menunggu laporan resmi dari korban, harus langsung ambil sikap pengamanan terhadap beberapa pihak pemicu konflik”; f) Identitas dasar yang masing-masing dimiliki masyarakat kedua desa, Menurut peneliti bahwa “Dalam konteks definisi bahwa sebuah identitas itu merupakan ciri pembeda satu sama lain walaupun dalam waktu bersamaan ada persamaan di sisi lain. Identitas sebagai karakter statusquo yang lajim dipertahankan dalam karakter atas dasar ke’egoan semata”. Menurut M. Wildan (Selasa, 02/09/14) “susah dipertemukan antara masyarakat Ngali -Renda, terutama para anak muda karena memiliki perbedaan pandangan

kehidupan dalam hitungan rata-rata, oarang Ngali tidak mau dikuasai orang lain dalam hidupnya, apalagi mereka merasa lebih cerdas dalam dunia pendidikan, juga kenyataanya memang lebih banyak yang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. Tapi masyarakat renda lebih dekat dengan pelayanan publik juga lebih menguasai ekonomi perdagangan bawang. Sesungguhnya masing-masing ego inilah yang masing-masing dipertahankan”. Namun, faktor-faktor penyebab konflik sosial tidak pernah bersifat sederhana dan tunggal, melainkan bersifat kompleks dan berkait secara rumit. Faktor tersebut dapat sekaligus menyangkut dimensi ideologi politik, ekonomi, sosial-budaya maupun agama. Pendekatn terhadap permasalahan berakar pada hal-hal mendasar yang kerakumulasi secara komplit. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa konflik sifatnya insidensial dalam artian terjadinya tidak dapat diprediksi kapan, bagaimana dan seperti apa.

Dampak Konflik Sosial

Ada beberapa dampak konflik sosial menurut Soerjono Soekanto (1989:90), sebagai berikut: a) Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (*ingroup*) yang mengalami konflik dengan kelompok lain; b) Terjadinya keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai; c) Terjadinya perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga dan lain-lain; d) Terjadi kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia, serta terhambatnya segala aktifitas sosial; e) Lahirnya unsur dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

Dari keterangan-keterangan di atas peneliti berpendapat bahwa memperlihatkan akibat konflik sebagai bentuk interaksi disosiatif. Walaupun begitu tidak selamanya akibat konflik bersifat negatif. Sebagai contohnya, konflik dalam bentuk lunak biasanya digunakan dalam seminar-seminar dan diskusi-diskusi sebagai media penajaman konsep-konsep atau persoalan ilmiah. Selain itu, konflik dijadikan sebagai sarana untuk mencapai suatu keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat,

dapat pula menghasilkan suatu kerja sama di mana masing-masing pihak melakukan introspeksi yang kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dan konflik dapat memberi batas-batas yang lebih tegas, sehingga masing-masing pihak yang bertikai sadar akan kedudukannya dalam masyarakat.

Upaya Mengatasi konflik Sosial

Teori tentang upaya meminimalisir terjadinya konflik James W. Vander Zanden, dalam bukunya *Sociology: Teori-Teori Konflik*, antara lain: a) Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik; b) Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya; c) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap; d) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.

Menurut Murtada Muthahari (1996:143) “Manusia pada dasarnya individu-individu yang merdeka secara pribadi sehingga berkebebasan berkehendak, berperilaku, bertindak sesuai kebutuhan dan keinginannya. Sewalaupun manusia sebagai individu yang merdeka namun tidak bisa diabaikan pula unsur kemanusiaan yang tidak saling merampas hak satu sama lain dan mesti saling penuh kewajiban terhadap individu lain, berikutnya dalam perkembangan kesadaran manusia. Secara sosial manusia saling membutuhkan satu sama lain yang melegitimasi sebagai makhluk sosial atas dasar keterbatasan manusia dalam memenuhi keseluruhan kebutuhan pribadi tanpa bantuan pribadi-pribadi lainnya”.

Simbiosis mutualisme yaitu hubungan yang saling menguntungkan dalam bentuk interaksi sesama makhluk hidup yang hidup berdampingan. Merupakan teori dasar dalam menyelesaikan konflik pada akar dasarnya.

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang artinya saling membutuhkan satu dengan lainnya. Tanpa adanya manusia lain yang membantu atau hidup bersama-sama, maka manusia tak akan berkembang. Karena pada hakikatnya manusia tercipta untuk saling bersama-sama mewujudkan rasa cinta kasih dan kedamaian. Aristoteles dalam bukunya Rustam Efendi Tamburaka (999: 35) pernah mengungkapkan teori bahwa “Manusia merupakan makhluk sosialis yang akan selalu berdampingan hingga perkembangan zaman terus terjadi berkat tindakan sosialis makhluk tersebut”.

Menurut peneliti bahwa jika konflik dikaitkan dengan simbiosis mutualisme sebenarnya istilah ini sangat cocok mengungkapkan realita kehidupan sehari-hari manusia yang sosialis namun bergejolak. Dalam hal ini kaitannya dengan simbiosis mutualisme adalah suatu nilai ketergantungan yang terjadi antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Dalam pembentukan karakter kesadaran saling membutuhkan dan menguntungkan satu sama lain dalam interaksi sosial maka akan secara alami terhindar dan terselesainya secara alami sesuatu yang disebut konflik. Simbiosis komensalisme (yang satu diuntungkan, yang lain tidak dirugikan) pada hakikatnya adalah sebuah jenis simbiosis yang baik. Jika dikaitkan dengan agama terutama agama Islam sebagai rahmat seluruh alam maka simbiosis ini cocok untuk menjadikan kita pribadi yang sabar, bijaksana dan mampu menghadapi suatu kondisi yang cukup sulit.

Pendekatan ini memandang masyarakat, organisasi dan berbagai system sosial lainnya sebagai ajang pertandingan perorangan dan kelompok. Kesesuaian kepentingan dan kerjasama tidak diabaikan, namun perhatian memang lebih diberikan pada karakter persaingan atau ketidaksesuaian. Pemaksaan dipandang sebagai cara utama bagi setiap orang untuk mencapai keinginannya. Di dalam pihak diasumsikan pula bahwa manusia pada umumnya tidak ingin didominasi atau dipaksa, sehingga setiap kali ada pemaksaan mereka akan berusaha melawan.

Islam juga memiliki pandangan yang sama terhadap konflik. Meskipun Islam yang notabene lebih mengutamakan perdamaian, sesuai dengan makna kata Islam sendiri yakni “salam”. Namun bukan berarti Islam tidak memberikan makna dan pandangan terhadap konsepsi konflik. Dalam agama Islam pemaknaan konflik bisa dalam bentuk yang lebih ramah dan damai. Dalam Islam konflik tidak harus difahami sebagai gejala yang destruktif, dan kontra-produktif, namun bisa menjadi gejala yang konstruktif bahkan produktif. Konflik merupakan bagian dari tabiat manusia yang telah dibawa oleh manusia dari sejak dia dilahirkan. Keberadaan konflik sebagai unsur pembawaan sangat penting dalam kehidupan manusia. Kehidupan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada konflik. Manusia yang memiliki tuntutan serta keinginan yang beraneka ragam dan manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi keinginan tersebut. Namun untuk bisa mendapatkannya, mereka akan berkompetisi untuk mendapatkan keinginan tersebut.

Dari sini maka dengan adanya konflik akan mengajarkan manusia untuk dapat berfikir lebih maju untuk mendapatkan keinginannya tersebut sehingga akan bermanfaat bagi kehidupannya. Oleh karena itu, Allah membekali nilai-nilai moral pada setiap makhluk dalam kepentingan-kepentingannya sendiri. Selagi konflik masih dibutuhkan oleh manusia, maka mereka pun dibekali oleh Allah dengan kemampuan untuk berkonflik, baik dalam fisik, roh maupun akal, dan sekaligus kemampuan untuk mencari solusinya.

Sesungguhnya konflik terjadi dalam bentuk dan jenis yang beragam baik secara elite yang sifatnya universal dengan hubungan vertikal maupun dalam konteks regional lokal yang hubungannya horisontal. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada konflik horisontal antar desa yang berbentuk lebih spesifik dengan hubungan horisontal yaitu tawuran antar desa. Tawuran antar desa adalah perilaku agresi dari seorang individu atau masyarakat suatu desa terhadap masyarakat desa lainnya, yang berlaku sikap yang samajuga oleh masyarakat suatu desa lain tersebut secara berlawanan dalam waktu

bersamaan. Agresi itu sendiri diartikan sebagai suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, menyerang, membunuh atau menghukum orang lain, dengan kata lain agresi secara singkat didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain.

Konflik Sosial dalam Perspektif Sejarah di Bima

Sejarah panjang peradaban manusia selalu diwarnai konflik dari level komunitas terkecil hingga komunitas terbesar yang disebabkan dan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, motif dan kepentingan. dari kadar sejarahnya konflik sudah terjadi sebelum Indonesia lahir, Bima dikenal dengan Perang Ngali 1908 yang diprakarsai oleh Salasa (ompu Kapa'a), perang antara orang-orang Bugis dengan orang Ngali dengan masalah dasar orang Ngali tidak membayar upeti terhadap kompeni Belanda. Pada tahun 1911 telah terjadi konflik Kong Sing Cinadengan Kong Sing Jawa, isu yang memicu konflik tersebut ialah persaingan dagang dan ras. Begitu juga konflik pada tahun 1918-1923 terjadi sehubungan munculnya gerakan radikal di Jawa yang menentang feodalisme dan kapitalisme. Isu yang memicu konflik ialah penolakan terhadap Gubernur yang membatasi luas tanah yang ditanami tebu. Bahkan jauh sebelum itu Sultan Hasanuddin (1631-1670), Pangeran Diponegoro (1827-1830), Teuku Umar (1854-1899), dan lain-lain telah melakukan pertempuran melawan penjajahan Belanda, yang kemudian mereka dilantik oleh pemerintah Indonesia menjadi pahlawan nasional.

Pada tahun 1926, PKI memimpin peperangan melawan Belanda di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Sesudah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, konflik terus terjadi seperti pergolakan anti swapraja pada tahun 1946-1950. Isu yang memicu konflik ialah pro-kontra feodalisme. Selain itu terjadi konflik bersenjata seperti Permesta, Andi Aziz, Darul Islam/TII Kartosuwiryo yang diproklamirkan 12 Syawal 1368 (7 Agustus 1949) di Jawa Barat, DI/TII Kahar Muzakkar di Sulsel, DI/TII Daud Beureuh di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka

(GAM) di Aceh, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, dan berbagai konflik lainnya.

Melihat dari perjalanan sejarah kehidupan masyarakat, Bima yang dalam skup kecil bagian dari Negara Indonesia sangat rentan dengan problem konflik social. akhir-akhir Bima pasca reformasi berjalan, Bima dianggap paling rawan dengan persoalan konflik social. misalnya dengan persoalan yang tidak layak diperdebatkan akan berakhirkan dengan konflik. kita melihat pada tahun 2000 terjadi konflik antara Desa Ngali dengan Desa Renda, kemudian pada tahun 2012 terjadi perang antar desa Lido dengan Desa Ncera, sampai dengan tahun 2013 terjadi perang antar desa Roi dengan Desa Roka.

Begitu pula hasil pemilukada di era Orde Reformasi banyak menimbulkan konflik seperti hasil pemilukada di Kabupaten pada tahun 2010 menimbulkan konflik yang berlangsung dari. Konflik pemilukada, ada yang menimbulkan bentrokan fisik antara pendukung dari calon yang kalah dan pendukung dari calon yang menang. Akan tetapi, pada umumnya konflik hasil pemilukada disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diadili perkara konflik tersebut. Dalam masalah ini, Georg Sorensen (2003) seorang pemikir politik telah mengingatkan bahwa dalam sebuah demokrasi tidak ada satu kelompokpun yang semestinya yakin bahwa kelompoknya yang akan menang. Bahkan kelompok yang paling kuat sekalipun, harus siap menghadapi kemungkinan bahwa mereka bisa saja kalah dalam kompetisi dengan pihak lainnya. Dalam kompetisi harus siap menang dan siap kalah. Namanya saja kompetisi, pasti ada yang menang dan kalah. Jadi dalam pemilukada serbakemungkinan bisa terjadi, menang atau kalah harus siap mental.

Catatan Akhir

Penyebab Terjadinya Konflik Sosial Antara Desa adalah *Pertama* faktor kenakalan para remaja, kebiasaan para remaja dan anak muda desa yang duduk di pinggir jalan sambil mengganggu masyarakat desa lain yang melintasi di jalan tersebut. Bentuk gangguannya seperti perampasan, penganiayaan, bahkan pelecehan. *Kedua* watak keras masyarakat desa, kebiasaan dalam aktifitas keharian atau dalam waktu

tertentu secara konsisten, akan membentuk karakter sesuai kebiasaan tersebut di lengkapi pula oleh kondisi alam dalam waktu yang bersamaan.

Ketiga pergeseran budaya, budaya *ndempa* yang digelar setiap selesai panen padi, karena perkembangan jaman dan modernisasi, budaya *ndempa* bertangan kosong dan hiburan bergeser pada konflik sosial berjenis perang menggunakan senjata. *Ke'empat* kinerja struktur pemerintah setempat, minimnya komunikasi emosional antara pemerintah desa setempat, terutama tidak adanya langkah-langkah antisipasif terhadap kemungkinan pecahnya perang. *Kelima* lambanya tindakan pihak keamanan, dengan terus berlarutnya konflik yang begitu lama, menonjolkan pula minimnya kinerja pihak keamanan yang lebih dominan pihak kepolisian. Namun, faktor-faktor penyebab konflik sosial tidak pernah bersifat sederhana dan tunggal, melainkan bersifat kompleks dan berkait secara rumit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdullah BA. 1992. *Kerajaan Bima dan Keberadaannya*.
 Tajib, H. Abdullah. 1995. *Sejarah Bima Dana Mbojo*. Jakarta: Harapan Masa PGRI.
 E. Tamburaka, Rustam Takhir. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat & Iptek*. PT. RINEKA CIPTA. Jakarta.
 Fakhri, Mansour. 2001. *Sesat Pikir "Teori Pembangunan dan Globalisasi"*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
 Gottchalk, Louis. 1975. "Understanding History" *Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto Mengerti Sejarah*. Jakarta. UI- Pres.
 Muslimin Hamzah. 2004. *Ensiklopedia Bima*. Pemerintah Kabupaten Bima.
 Saridjo, Marwan. 2012. *Perang Ngali "Sebuah Perang Sabil"* Yayasan Ngali Aksara. Bogor.
jeckprodeswijaya.blogspot.co./pengertian-dan-teori-konflik-sosial.html

PEMBENTUKAN KULTUR SEKOLAH MELALUI PEMBELAJARAN IPS (STUDI DESKRIPTIF DI SMPN 5 SAPE)

Ida Waluyati

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
idawaluyati2017@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah membangun kultur sekolah yang baik. Kultur sekolah merupakan kultur organisasi dalam konteks persekolahan. Kultur sekolah sebagai kualitas kehidupan sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan semangat dan nilai yang dianut sekolah. IPS sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan memegang peran dalam upaya menciptakan kultur yang positif, mengingat dalam program pembelajaran di sekolah, IPS dapat mengembangkan kemampuan berpikir, inkuiri, pemecahan masalah, keterampilan sosial, serta meningkatkan kemampuan berkompetensi dan bekerjasama dalam masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pembentukan kultur sekolah melalui pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMPN 5 Sape. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan desain *emaded case study*. Subjek penelitian terdiri dari Guru IPS dan siswa kelas IX. Sedangkan informan penelitian terdiri dari Kepala Sekolah, anggota MGMP IPS SMPN 5 Sape. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data dengan teknik triangulasi metode dan sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif (*interactive model analysis*) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran IPS di SMPN 5 Sape telah menanamkan kultur sekolah. Pada akhir pembelajaran tumbuh kesadaran yang esensial dalam membentuk siswa menjadi manusia yang optimis, berani tampil, berperilaku kooperatif serta memiliki kecakapan personal dan akademik sehingga diharapkan peserta didik menjadi *smart and good citizenship*. Pemahaman dan pembentukan kultur sekolah dapat ditransformasikan melalui pembelajaran IPS secara simultan dan terus menerus ditanamkan kepada peserta didik, sehingga mempunyai karakter yang responsif terhadap realitas yang ada. Pembentukan kultur sekolah melalui pembelajaran IPS ini, secara psikologis membawa dampak kepada perkembangan sikap sosial sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dan mengakui keberagaman.

Kata kunci: Pembelajaran IPS, Kultur Sekolah

PENDAHULUAN

Era globalisasi dengan segala implikasinya menjadi salah satu pemicu cepatnya perubahan yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan bila tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk mengantisipasinya, maka hal tersebut akan menjadi masalah yang sangat serius. Dalam hal ini, dunia pendidikan mempunyai tanggung jawab yang besar terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh sehingga mampu hidup selaras didalam perubahan itu sendiri. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat dilihat dan dirasakan secara instan sehingga sekolah sebagai ujung tombak

dilapangan harus memiliki arah pengembangan jangka panjang dengan tahapan pencapaiannya yang jelas dan tetap mengakomodir tuntutan permasalahan faktual kekinian yang ada di masyarakat.

SMPN 5 Sape yang didirikan pada tahun 2007 dengan No. SK Pendirian: 817/Tahun 2007, tertanggal 15/07/2007 sebagai lembaga pendidikan menengah pertama yang memperoleh tingkat akreditasi B, SMPN 5 Sape terus memperbaharui semangat dan komitmen untuk menjadi yang terbaik dalam pelayanan pendidikan sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan

penanaman nilai karakter yang kuat sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan di SMPN 5 Sape diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar tenaga pendidikan dan kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan. Peningkatan mutu pendidikan tentunya mengacu kepada peningkatan 8 (delapan) standar pendidikan tersebut, serta penciptaan lingkungan dan kultur sekolah.

SMPN 5 Sape sebagai sebuah institusi pendidikan mempunyai budaya (kultur) yang mendefinisikan standar-standar perilaku karakter yang baik dan tersirat dalam budaya dominan sekolah. Setiap sekolah merupakan suatu sistem yang khas, mempunyai kepribadian dan jati diri sendiri, sehingga memiliki kultur yang khas pula. Kultur sekolah dapat merupakan bagian atau subkultur masyarakat atau bahkan bagian kultur bangsa dan negara.

Lingkungan dan kultur sekolah inilah yang memberi ciri khas dan warna tersendiri bagi SMPN 5 Sape di mata masyarakat luas dan membuat sekolah ini diminati masyarakat sejak berdiri hingga saat ini. Disinilah pentingnya membangun budaya mutu sebagai sebuah filosofi dan pijakan dasar sekolah dalam mengembangkan diri secara berkesinambungan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah membangun kultur sekolah yang baik. Kultur sekolah merupakan kultur organisasi dalam konteks persekolahan. Kultur sekolah sebagai kualitas kehidupan sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan semangat dan nilai yang dianut sekolah, yakni dalam bentuk bagaimana warga sekolah seperti komite sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa bekerja, belajar, dan berhubungan satu sama lain.

Kultur sekolah merupakan faktor yang esensial dalam membentuk siswa menjadi manusia yang optimis, berani tampil, berperilaku

kooperatif serta memiliki kecakapan personal dan akademik.

Saat ini mata pelajaran IPS pada tingkat SMP telah menyatukan seluruh kompetensi ilmu sosial dalam satu mata pelajaran. Model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan. Melalui pembelajaran terpadu, peserta didik dapat memperoleh pengalaman yang sesuai dengan kenyataan di masyarakat, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan dan mereproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara holistik, bermakna, otentik, dan aktif.

Berdasarkan Standar Proses Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 19 Ayat (3) dan pasal 20 disebutkan bahwa:

Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran yang efektif dan efisien....Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Memahami amanah peraturan pemerintah tersebut, IPS sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah, dinilai memerlukan guru-guru yang mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif, dalam arti menguasai materi, mampu memilih permasalahan yang layak diangkat sebagai bahan belajar, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan pencapaian kompetensi. Melalui pembelajaran terpadu dalam IPS, siswa belajar memahami kenyataan hidup di masyarakat dengan berbagai ragam masalahnya yang tidak dapat dipecahkan menggunakan kata kerja keilmuan secara terpisah. Pembelajaran terpadu dinilai sebagai alternatif untuk menjawabnya.

Mengacu pada kajian *Social Studies*, *National Council for Social Studies* (NCSS) menjelaskan konsep IPS sebagai berikut.

Social studies are the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and the natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.(1994: 3).

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial adalah studi integrasi dari ilmu-ilmu sosial dalam kemanusiaan untuk meningkatkan kemampuan warganya. Dalam lingkup program sekolah, Ilmu Pengetahuan Sosial memberikan studi yang terkoordinasi dan sistematis yang menekankan pada disiplin-sisiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama dan sosiologi maupun isi terapan dari humaniora, matematika dan ilmu murni.

Melalui pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, siswa diajarkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik dan penuh kedamaian. Ilmu Pengetahuan Sosial diperlukan bagi keberhasilan transisi kehidupan menuju pada kehidupan yang lebih dewasa dalam upaya membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan prinsip dan semangat nasional. Dengan demikian para siswa dalam pembelajaran IPS terlatih untuk menyelesaikan persoalan sosial dengan pendekatan secara holistik dan terpadu dari berbagai sudut pandang.

Ellis (1997: 6) menjelaskan hakikat pembelajaran IPS sebagai berikut "*social studies is the area of the curriculum dedicated to the study of human beings, it lends it self quite naturally to the care and nurturing of the individual child*". Pengertian tersebut menggambarkan bahwa lingkup wilayah IPS dalam kurikulum

diabdikan pada pembelajaran umat manusia secara alami menjaga dan mengembangkan karakter dan pribadi anak. Oleh karena itu, pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang menyangkut segala aspek hubungan dalam kehidupan manusia. Numan Sumantri (2001: 95) menjelaskan bahwa pendidikan IPS bersumber dari beberapa disiplin ilmu, humaniora, disiplin ilmu pendidikan, kegiatan dasar manusia dalam masyarakat serta tujuan pendidikan nasional yang semuanya harus dipikirkan dan dikembangkan secara integrasi.

Menurut pendapat Ellis tersebut dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat.

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang diberikan mulai dari pendidikan dasar, Ellis (1997: 6) menjelaskan tujuan pembelajaran IPS adalah:

Social studies is designed to help children explain their world. By organization he basically meant the ability to understand and classify things with respect to how they work. Adaptation refers to the process of accommodating one self to one's environment. A child who enters school has already adapted considerably to the environment through speech, dress, rules at home, and so forth but school is designed to expand such adaptation greatly through formal learning processes, social, emotional, and physical.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar mampu beradaptasi, peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan

yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik.

Sejalan dengan itu, Barth (1990: 41) menjelaskan bahwa: *“Proposed that one way to integrated social studies in a scope and sequence was to apply the four skill objective: (1) gaining knowledge, (2) Processing information, (3) clarifying values and (4) engaging in social participation, in every social studies classroom.”*

Sesuai pendapat Barth tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran IPS yaitu memperoleh pengetahuan, siswa belajar tentang diri mereka sendiri dan lingkungannya, kemudian kemampuan menggunakan dan mengamalkan pengetahuan dan ide-ide melalui ketrampilan berfikir. Tujuan yang lain adalah membentuk sikap yang diperlukan untuk tingkah laku berfikir (*intellectual behavior*) dan tingkah laku sosial (*social behavior*). Tujuan-tujuan tersebut bermuara pada tujuan utama IPS yaitu untuk melatih siswa untuk bertanggung jawab sebagai warga Negara yang baik serta mempersiapkan generasi muda untuk menjadi seorang humanis, rasional, berpartisipasi dalam kehidupan dunia dan menjadi meningkat kesadaran untuk saling membutuhkan dalam hidupnya.

Berdasarkan tujuan pembelajaran IPS tersebut, maka IPS sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah memegang peran dalam upaya menciptakan kultur yang positif dimana dalam program pembelajaran di sekolah, IPS dapat mengembangkan kemampuanberpikir, inkuiri, pemecahan masalah, keterampilan sosial, serta

meningkatkan kemampuan berkompetensi dan bekerjasama dalam masyarakat yang beranekaragam/majemuk.

Berdasarkan observasi awal di kelas IX SMPN 5 Sape pada bulan April 2015 bahwa terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kultur sekolahdalam pembelajaran IPS antara lain, siswa tidak disiplin dalam mengikuti pembelajaran, siswa kurang mampu bekerjasama dalam pembelajaran di kelas, siswa kurang memiliki sikap saling menghargai proses interaksi di kelas, dan siswa pasif dalam pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini difokuskan padastudi deskriptif tentang pembentukan kultur sekolah melalui pembelajaran IPS di SMPN 5 Sape. Penelitian ini dijadikan input berharga bagi para guru IPS, kepala sekolah, Komite Sekolah serta seluruh stakeholderspendidikan dalam upaya pembentukan dan pengembangan kultur sekolah melalui pelaksanaan program pembelajaran IPS pada masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metodeologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif yangterjadi di SMPN 5 Sape. Data yang diperoleh diolah sedemikian rupa untuk memberikan diskripsi hasil penelitian.

Sumber data terpenting yang dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat dipergunakan berasal dari hasil; wawancara, pengamatan dan dokumen sekolah yang dimanfaatkan sebagai pendukung simpulan penelitian. Sumber data digali dari berbagai sumber.

Subyek dan informan dalam penelitian ini adalah guru dan peserta didik SMPN 5 Sape. Aktivitas dan kegiatan pembelajaran adalah sumber data utama untuk mendalami pembentukan kultur sekolah melalui pembelajaran IPS. Akitivitas pembelajaran yang diamati dalam penelitian ini adalah seluruh aktivitas dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas IX SMPN 5 Sape.Arsip dan dokumen adalah sumber data

penting dalam penelitian pembentukan kultur sekolah melalui pembelajaran IPS. Arsip dan dokumen yang didalami dalam penelitian ini adalah perangkat pembelajaran, baik silabus, RPP dan sintak pembelajaran, prestasi akademik, dan evaluasi guru terhadap peserta didik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi berperan pasif, dan analisis dokumen.

Wawancara mendalam dipilih karena sifat wawancara dalam penelitian kualitatif lentur dan terbuka, tidak berstruktur secara ketat, serta tidak pada suasana formal. Melalui wawancara mendalam akan didapatkan konstruksi informasi, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, kepedulian, dan harapan. Wawancara informal mengandalkan pertanyaan spontan yang muncul pada saat interaksi dengan informan, sedangkan pada penggunaan pedoman wawancara telah dipersiapkan pertanyaan sebelum interaksi dengan informan. Pedoman wawancara disusun berpijak pada permasalahan penelitian yang sudah ditentukan. Sementara itu pada wawancara terbuka, terdapat pertanyaan secara terperinci yang ditujukan untuk mengambil respons informan dalam proses evaluasi, yakni pembelajaran IPS dalam pembentukan kultur sekolah di kelas IX SMPN 5 Sape.

Observasi berperan pasif dalam penelitian ini adalah untuk mengamati proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru IPS. Dalam hal ini akan dilakukan pengamatan secara langsung sejauhmana pembentukan kultur sekolah terimplementasi dalam kegiatan pembelajaran IPS. Objek yang diamati adalah: (1) kegiatan guru dan peserta didik selama proses kegiatan pembelajaran IPS, (2) materi pembelajaran yang dikembangkan guru, (3) metode dan media yang dipergunakan selama proses pembelajaran, (4) evaluasi pembelajaran, (5) sarana dan prasarana penunjang, (6) kondisi dan lingkungan sekolah.

Analisis dokumen dalam penelitian ini adalah penyelidikan terhadap data-data tertulis pembelajaran IPS. Data-data itu meliputi perangkat pembelajaran, catatan insidental pada saat pembelajaran berlangsung, dan data evaluasi pembelajaran. Analisis diarahkan pada muatan

perangkat silabus, sintak atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), evaluasi dan catatan-catatan insidental guru IPS. Melalui analisis dokumen ini untuk mengetahui pembentukan kultur sekolah dalam satu proses kegiatan pembelajaran IPS.

HASIL PENELITIAN

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa ada hubungan pembelajaran IPS secara konsep dan implementasi dengan pembentukan kultur sekolah. Tujuan pembentukan kultur sekolah sejalan dengan tujuan utama IPS yaitu untuk melatih siswa untuk bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik serta mempersiapkan generasi muda untuk menjadi seorang humanis, rasional, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan meningkatkan kesadaran untuk saling membutuhkan dalam kehidupan nyata. Berdasarkan tujuan pembelajaran IPS tersebut, maka IPS sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah memegang peran dalam upaya menciptakan kultur yang positif dimana dalam program pembelajaran di sekolah, IPS dapat mengembangkan kemampuan berpikir, inkuiri, pemecahan masalah, keterampilan sosial, serta meningkatkan kemampuan berkompetensi dan bekerjasama dalam masyarakat yang majemuk. Dalam pembelajaran IPS, guru mengeksplorasi nilai-nilai kultur sekolah.

Kedua, Pelaksanaan pembelajaran IPS di SMPN 5 Sape. Pengintegrasian materi tentang pembentukan kultur dalam pembelajaran IPS yang dideskripsikan pada kajian teori sangat bermanfaat untuk membentuk kultur sekolah. Pemahaman terhadap kultur sekolah dapat ditransformasikan melalui pembelajaran IPS secara simultan dan terus menerus ditanamkan kepada peserta didik, sehingga mempunyai karakter yang responsif terhadap realitas yang ada, secara psikologis akan membawa dampak kepada perkembangan karakter dan rasa kebersamaan, membangun kultur sekolah yang positif dan mengakui keberagaman dalam meminimalkan konflik sosial. Pada akhir pembelajaran diharapkan tumbuh karakter peserta didik sesuai tujuan pembelajaran IPS

yaknimenjadi warga negara yang baik (good citizenship) dan memiliki kecakapan sosial dalam konteks membangun kultur sekolah yang positif. Untuk membentuk kultur sekolah yang positif tersebut, peserta didik dididik dan dilatih dalam proses pembelajaran melalui penerapan berbagai metode dan pendekatan pembelajaran, antara lain pendekatan kontekstual, inkuiri, problem solving, cooperative learning, problem based learning, karyawisata, maupun metode penuturan cerita, sehingga peserta didik mempunyai kemandirian dalam sikap, kreatifitas dan partisipasi. Pada dasarnya, penggunaan metode atau model pembelajaran yang akan mendorong peserta didik berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dampak pengiringnya akan terinternalisasi nilai-nilai kultur sekolah dalam pembelajaran IPS. Pada dasarnya, penggunaan metode atau model pembelajaran yang akan mendorong peserta didik berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dampak pengiringnya akan terinternalisasi nilai-nilai kultur sekolah dalam pembelajaran IPS. Arahnya adalah peserta didik mempunyai pengetahuan tentang kultur sekolah tidak secara doktrinal, tetapi melalui upaya penyadaran melalui proses pembelajaran, sehingga kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dapat tercapai. Budaya SMPN 5 Sape memiliki kultur sekolah yang tercermin dalam proses pembelajaran IPS, antara lain: 1) Budaya 3 S : senyum, sapa, salam dimana setiap kali bertemu dan masuk kelas (antar siswa, antar guru, antar siswa dan guru) dengan mottonya : iman, ilmu dan amal. 2) Melakukan doa bersama (doa belajar) sebelum dan sesudah pembelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas. Doa bersama juga dilakukan sebelum Ujian Nasional dan Ujian Sekolah oleh seluruh siswa kelas IX di mesjid sekolah yang dipimpin oleh beberapa guru agama islam dan melakukan sujud syukur setelah Ujian Nasional. 3) Pembacaan ayat suci Al Qur'an setiap hari Jumat sebelum pembelajaran dimulai oleh guru agama islam yang dapat didengar oleh seluruh siswa melalui pengeras suara yang berada di setiap ruang kelas. 4) Sholat dzuhur berjamaah di mesjid sekolah bersama

guru dan seluruh siswa usai pembelajaran IPS. 5) Hasil karya portofolio siswa dalam pembelajaran IPS di tampilkan dalam majalah dinding sekolah sebagai bentuk pelatihan bakat jurnalistik siswa. 6) Guru menerapkan metode pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran melalui metode *cooperatif learning*, *problem solving*, *inkuri*, *kontekstual*, *problem based learning* sehingga dapat mengasah kompetensi sosial siswa sekaligus melatih jiwa kepemimpinan siswa. 7) Studi lapangan (*field Trip*) ke tempat-tempat yang berhubungan dengan materi pembelajaran IPS, misalnya ke pasar, kantor bank. 8) Penggunaan IT/ICT dalam proses pembelajaran IPS agar siswa memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi. 9) Pentas seni untuk melatih siswa melaksanakan kegiatan bernuansa seni, baik tradisional maupun modern. 10) Sebelum melaksanakan kegiatan kebersihan kelas, guru IPS yang mengajar pada jam tersebut memberikan pengarahan kepada siswa untuk membersihkan halaman dan ruang kelas, merapihkan dan menata seluruh peralatan kelas. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk menjaga kebersihan kelasnya sehingga tidak terdapat sampah yang tercecer di dalam kelas. Sebelum memulai pembelajaran guru mendata kehadiran siswa. Seluruh alat dan prasarana berada pada tempatnya dan setiap sarana yang ada di dalam kelas siap untuk digunakan. Pada saat di dalam kelas selama kegiatan belajar mengajar siswa diharapkan menjaga kebersihan kelas. Setiap pergantian jam belajar, siswa membiasakan diri untuk membersihkan dan merapihkan kelas dan tempat duduknya masing-masing. Jika terdapat sampah yang tercecer didalam kelas di harapkan ada kesadaran diri untuk membersihkan dan merapihkannya tanpa intruksi dari siapapun. Setelah jam belajar berakhir sebelum meninggalkan kelas, di harapkan seluruh siswa untuk tetap menjaga ketertiban dan kebersihan kelas.

Ketiga, Evaluasi pembelajaran IPS dalam pembentukan kultur sekolah di SMPN 5 Sape. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada

standar penilaian yang dilakukan meliputi penilaian proses dan penilaian hasil. Untuk mengetahui hal tersebut, guru melakukan dua cara penilaian, yaitu tes dan non tes. Bentuk tes, peserta didik diberikan soal yang terstruktur dan terukur. Di samping itu, penilaian non tes diperoleh melalui observasi di luar kelas terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang mencerminkan kultur sekolah. Adapun hasil evaluasi terhadap pembelajaran IPS menunjukkan baik, sedang dan kurang.

Keempat, Hambatan pembelajaran IPS di SMPN 5 Sape. Hambatan pertama, faktor keterbatasan waktu atau jumlah jam waktu mengajar bagi para guru yaitu dua jam setiap minggu. Sementara beban tujuan pembelajaran (Kompetensi inti dan kompetensi dasar) sesuai kurikulum 2013 yang harus dicapai begitu berat, sehingga hal tersebut berakibat pada peserta didik yang tidak mampu mengelaborasi materi pembelajaran secara optimal dalam pembentukan kultur sekolah. Solusi yang ditempuh oleh para guru IPS adalah dengan memasukkan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler yang bisa menambah penguatan kultur sekolah. Hambatan kedua, faktor keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kesulitan siswa dalam mengakses sumber-sumber belajar di luar kelas dalam penguatan kultur sekolah.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Terdapat hubungan antara pembelajaran IPS secara konsep dan implementasi dengan pembentukan kultur sekolah mengingat tujuan pembentukan kultur sekolah sejalan dengan tujuan utama IPS yaitu untuk melatih siswa untuk bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik serta mempersiapkan generasi muda untuk menjadi seorang humanis, rasional, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan meningkatkan kesadaran untuk saling membutuhkan dalam kehidupan nyata. 2) Pemahaman terhadap kultur sekolah dapat ditransformasikan melalui pembelajaran IPS secara simultan dan terus menerus ditanamkan kepada peserta didik, sehingga mempunyai karakter yang responsif terhadap

realitas yang ada, secara psikologis akan membawa dampak kepada perkembangan karakter dan rasa kebersamaan, membangun kultur sekolah yang positif dan mengakui keberagaman dalam meminimalkan konflik sosial. 3) Evaluasi pembelajaran IPS dalam pembentukan kultur sekolah di SMPN 5 Sape. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian yang dilakukan meliputi penilaian proses dan penilaian hasil. 4) Hambatan pembelajaran IPS di SMPN 5 Sape berupa keterbatasan waktu atau jumlah jam mengajar bagi para guru serta faktor keterbatasan sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. (2009). *Perencanaan pembelajaran: Mengembangkan standar kompetensi guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Asep Jihad & Abdul Haris. (2010). *Evaluasi pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Asri Budiningsih, C. (2005). *Belajar dan pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Barth, James, L. (1990). *Methods of instruction in social studies education*. Lanham: University Press of America.
- Depdiknas. (2005). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- _____. (2006). *Permendiknas RI Nomor 22, Tahun 2006, tentang Standar Isi*.
- Ellis, Arthur, K. (1997). *Teaching and learning elementary social studies*. United States: A Viacom Company.
- Etin Solihatin & Rahardjo. (2008). *Cooperative learning: Analisis model pembelajaran IPS*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Grondlund, Norman, E. (1985). *Measurement and evaluation*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Heinich, Molenda, et al. (1996). *Instructional media and technologies for learning*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Massialas, G. Byron & Allen, F. Rodney. (1996). *Critical issues in teaching social studies K-12*.

- United States: Wadsworth Publishing Company.
- Purwanto. (2010). *Instrumen penelitian sosial dan pendidikan: Pengembangan dan pemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rossi, P. H. & Freeman, E. Howard.(1985). *Evaluation systematic approach*.California: SAGE Publications, Inc.
- Skeel, Dorothy, J. (1995). *Elementary social studies: Challenges for tommorrow's world*. United States of America: Harcourt Brace College.
- Suharsimi Arikunto & Cepi Safruddin Abdul Jabar. (2009). *Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoretis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, (2009). *Manajemen penelitian*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Tayibnapis, Y. Farida. (2008). *Evaluasi program dan instrumen evaluasi untuk program pendidikan dan penelitian*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Wina Sanjaya. (2009). *Kurikulum dan pembelajaran: Teori dan praktik pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Ady Irawan

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima
adyirawan652@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum, tidak terkecuali hukum pidana memiliki beberapa tahap yakni pada tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam rangka mencapai tujuan penegakan hukum secara maksimal yaitu dengan memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan jelas tidak bisa dikotomikan dari hal yang bernama ekonomi. Mengingat dalam seluruh aspek kehidupan faktor ekonomi jelas memegang peran penting, tidak terkecuali dalam penegakan hukum pidana. Analisis ekonomi dalam kebijakan penegakan hukum ini sangat penting, mengingat tindak pidana yang dilakukan khususnya dalam era globalisasi ini mengandung berbagai motif dan karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan tindak pidana konvensional yang biasa terjadi pada umumnya. Tindak pidana sebagai produk globalisasi ini sering disebut kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang jelas tidak akan efektif jika hanya ditangani secara konvensional. Efek globalisasi dapat menghasilkan tindak pidana yang bersifat nasional, transnasional, dan internasional. Oleh karena itu analisis ekonomi terhadap hukum tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat para pelaku tindak pidana *white collar crime* lebih khawatir akan kerugian secara ekonomi jika dibandingkan dengan sekedar dihukum dan mendekam di penjara.

Kata Kunci: Analisis Ekonomi, Penegakan Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Bidang Analisis Ekonomi Atas Hukum, atau yang umumnya dikenal sebagai “*Economic Analysis of Law*” dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham (1789), yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan mengevaluasi hasilnya menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial (*social welfare*). Pemikiran utilitarianisme hukum Bentham tersebut tersebar dalam tulisan-tulisannya berupa analisis atas hukum pidana dan penegakannya, analisis mengenai hak milik (hukum kepemilikan), dan ‘*substantial treatment*’ atas proses-proses hukum. Namun pemikiran ala Bentham tersebut terhambat sampai tahun 1960-an, kemudian muncul kembali pada tahun 1990-an.

Secara garis besar Analisis Ekonomi Atas Hukum menerapkan pendekatannya untuk memberikan sumbangan pikiran atas dua permasalahan dasar mengenai aturan-aturan hukum. Yakni analisis yang bersifat ‘**positive**’ atau ‘**descriptive**’, berkenaan dengan pertanyaan apa pengaruh aturan-aturan hukum terhadap

tingkah laku orang yang bersangkutan (*the identification of the effects of a legal rule*); dan analisis yang bersifat ‘**normative**’, berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan-aturan hukum sesuai dengan keinginan masyarakat (*the social desirability of a legal rule*). Pendekatan yang dipakai Analisis Ekonomi Atas Hukum terhadap dua permasalahan dasar tersebut, adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi secara umum, yakni menjelaskan tingkah laku, baik manusia secara perorangan maupun perusahaan-perusahaan, yang berwawasan ke depan (*forward looking*) dan rasional, serta mengadopsi kerangka kesejahteraan ekonomi untuk menguji keinginan masyarakat.

Steven Shavell, professor di Harvard Law School, menjelaskan lebih lanjut mengenai analisis yang bersifat deskriptif dan normatif dari Analisis Ekonomi Atas Hukum dengan mengemukakan manfaat atau tujuan akhir dari analisis dimaksud. Dengan analisis deskriptif dapat dikatakan rasional, bilamana orang bertindak untuk memaksimalkan tujuan atau keuntungan yang diharapkannya. Sebagai

contoh adalah pertanyaan mengapa orang sangat berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya, walaupun misalnya orang tersebut mempunyai asuransi, dapat dijawab dengan kemungkinan bahwa ia tidak mau mengalami luka akibat kecelakaan, adanya ketentuan mengenai tanggung jawab atau adanya resiko diajukan ke pengadilan. Sedangkan dengan analisis normatif dapat diterangkan bahwa satu aturan hukum tertentu lebih baik dari aturan hukum lain bilamana memberikan level tertinggi bagi ukuran kesejahteraan sosial. Contoh yang dapat diberikan misalnya bilamana masyarakat menghendaki untuk meminimalisasi jumlah kecelakaan lalu lintas, maka aturan hukum yang terbaik adalah yang memberikan hukuman atau sanksi bagi penyebab-penyebab kecelakaan. (Mahrus Ali, 2011 : 186)

Perkembangannya sekarang, Analisis Ekonomi Atas Hukum tidak terbatas pada dua permasalahan dasar sebagaimana dijelaskan di atas, namun meluas pada setiap penggunaan prinsip-prinsip ekonomi terhadap permasalahan-permasalahan hukum dan kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari pengertian *Economic Analysis of Law* yang diberikan oleh William and Mary School of Law. (Riski Wijaya, 2015)

Berangkat dari eksplanasi di atas, tulisan ini hanya memfokuskan kajian pada analisis ekonomi terhadap hukum khususnya dalam kebijakan penegakan hukum pidana dari mulai tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi peraturan perundang-undangan pidana. Walaupun disajikan secara umum, namun tulisan ini setidaknya memberikan penahaman kepada kita tentang betapa pentingnya analisis ekonomi terhadap penegakan hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Selintas Tentang Analisis Ekonomi Terhadap Penegakan Hukum Pidana

Analisis ekonomi atas hukum membangun asumsi baru bahwa manusia secara rasional akan berusaha mencapai kepuasan maksimum bagi dirinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa prinsip utama yang digunakan untuk memahami analisis ekonomi atas hukum pidana adalah prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi. Analisis

ekonomi atas hukum bekerja dengan menggunakan metode ilmu ekonomi sebagai kerangka teoritis guna menganalisis aturan dan hukum yang digunakan pada kalangan masyarakat tertentu. (Mahrus Ali, 2013 : 88).

Dari beberapa macam sanksi pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, jika diselaraskan dengan prinsip efisiensi sebagaimana dalam kajian ekonomi terhadap penegakan hukum untuk tindak pidana *white collar crime*, maka sanksi pidana denda dan sanksi hukuman mati bisa dikatakan memiliki ciri efisiensi tersebut.

Adapun sanksi pidana denda (*fines*), yang merupakan bentuk sanksi keuangan, adalah pidana yang efisien karena penjatuhannya tidak memerlukan biaya apapun. Negara sendiri tidak mengeluarkan biaya apapun ketika menjatuhkan sanksi pidana denda. Pidana denda dianggap sangat efisien dalam mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan. Selain pidana denda, pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang efisien karena tidak memerlukan ongkos apapun. Tetapi pidana mati baru bisa dikatakan efisien jika jarak antara penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan pelaksanaan pidana mati itu tidak terlalu lama (singkat). Artinya, jika jarak tersebut lama (antara vonis dan eksekusi) maka tidak bisa dikatakan efisien mengingat narapidana yang dijatuhkan vonis mati tersebut akan menunggu eksekusi di dalam penjara.

Menurut Mahrus Ali, penggunaan sanksi pidana penjara pada kenyataannya tidak efisien, memerlukan ongkos sosial yang sangat tinggi (*high social cost of imperisonment*), dan itu semua harus ditanggung oleh negara. Ongkos ini meliputi untuk membangun suatu gedung penjara, pemeliharannya, menggaji para pegawai yang bertugas dipenjara, dan ongkos kesempatan yang hilang dari produktivitas bagi mereka yang dipenjara. Selain itu pidana penjara lebih banyak menguntungkan terpidana yang memiliki kekayaan dan dekat dengan kekuasaan. Sebagai contoh kasus Artalyta Suryani yang mendapatkan fasilitas mewah seperti hotel berbintang lima di Lapas. Padahal Lapas itu sendiri adalah tempat yang tidak nyaman bagi siapapun yang tinggal didalamnya. Realitas yang

demikian tentu saja menurut analisis ekonomi atas hukum pidana tidak efisien dan menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Dengan demikian pidana penjara sangat ditolak pemikir analisis ekonomi atas hukum pidana. (Mahrus Ali, 2013 : 89)

Hal senada dikemukakan oleh Posner yang menyatakan bahwa hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan *white collar crime* hanyalah hukuman yang bersifat moneter yakni denda daripada penjara atau hukuman dera yang lain. Hal ini didasarkan karena biaya untuk mengumpulkan denda dari seseorang yang bisa membayarnya dalam (kualifikasi penting) adalah lebih rendah (lebih murah) daripada biaya untuk memenjarakannya. Sehingga akhirnya, membebaskan denda terhadap pelaku (*ewhite collar crime*) yang kaya adalah lebih baik daripada mengasingkan dia dari sisi masyarakat karena sistem tersebut tanpa biaya dan juga manjur. (Salman Luthan, 2007 : 54)

Perkembangan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum di Indonesia serta Prinsip-Prinsip Ekonomi

Memang secara teoritis konseptual, aliran Analisis Ekonomi Atas Hukum belum fenomenal dan melembaga di Indonesia, sebagaimana menimpa juga aliran-aliran hukum lain. Sehubungan dengan gejala tersebut, relevan mengemukakan pendapat Idris Kasim, bahwa di Indonesia kajian-kajian yang merupakan kritik-teori atau doktrin atas suatu paradigma atau pendekatan tertentu dalam kajian hukum kurang berkembang. Ahli-ahli hukum di Indonesia kurang bergairah dalam melakukan penjelajahan teoritis atas berbagai paradigma dalam ilmu hukum atau *taking doctrine seriously*. Meskipun demikian perbincangan mengenai Analisis Ekonomi Atas Hukum bukannya sama sekali tidak ada. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam teks oratio dies Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1995, dengan mengemukakan kerangka berpikir: a) Berdasarkan pengamatan empiris upaya perlindungan lingkungan yang hanya digantungkan pada penggunaan instrumen hukum (*legal instruments*) terbukti kurang efektif.

b) Praktek-praktek perlindungan lingkungan di negara lain, ternyata sudah menerapkan konsep *mixed-tools of compliance*, dimana instrumen ekonomi (*economic instruments*) merupakan salah satu insentif yang membuat potensial pencemar mematuhi ketentuan Hukum Lingkungan. c) Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan konsep *mixed-tools of compliance*. (<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2031089-perkembangan-analisis-ekonomi-atas-hukum/>, diakses tanggal 13 April 2015.

Guna mencapai efektifitas dan efisiensi, terutama dalam kebijakan penegakan hukum, khususnya hukum pidana maka sangat relevan apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Adapun prinsip-prinsip ekonomi tersebut adalah sebagai berikut: a) Kita selalu melakukan *Trade Off*; b) Biaya adalah segala sesuatu yang anda korbankan untuk memperoleh sesuatu; c) Orang rasional berpikir secara bertahap; d) Orang selalu bereaksi terhadap insentif; e) Perdagangan dapat menguntungkan semua pihak; f) Pasar secara umum merupakan wahana yang baik guna mengkoordinasikan kegiatan ekonomi; g) Pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil kerja mekanisme pasar; h) Standar hidup di suatu negara tergantung pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa; i) Harga-harga akan meningkat apabila pemerintah mencetak uang terlalu banyak; j) Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran.

(<http://analisisekonomi.blogspot.com/2008/08/10-prinsip-ekonomi.html>, diakses tanggal 10 Mei 2015, jam 19.15 WIB.)

Dengan berdasarkan kepada sepuluh prinsip ekonomi sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang dikenal dengan analisis ekonomi terhadap hukum dapat diterapkan, khususnya dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Kebijakan Penegakan Hukum Dari Perspektif Ekonomi

Masalah penegakan hukum pidana merupakan hal yang urgen dalam rangka

mewujudkan supremasi hukum. Indonesia yang mengaku dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi logisnya adalah menempatkan hukum di atas segala-galanya. Oleh karena itu komitmen tersebut harus dijaga. Untuk menjaga martabat dan keagungan hukum itu sendiri, jelas masalah penegakan hukum (*law enforcement*) tidak boleh dipandang sebelah mata, tak terkecuali hukum pidana.

Penegakan hukum pidana berangkat dari suatu proses yang disebut dengan proses kebijakan. Artinya, ada tahap-tahap tertentu yang harus dilalui sebelumnya. Berangkat dari hal tersebut, Muladi mengatakan bahwa penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. (Muladi, 1995 : 13): a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini yang akan datang. Kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif; b) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif; c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam

putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana ini dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan formulasi oleh legislatif adalah merupakan masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, termasuk pidana penjara. Kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan, merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana. (Barda Nawawi Arief, 2010 : 3)

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto : 2)

Terkait hal ini, Satjipto Rahardjo berpendapat, pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan,

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara mengenai ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang pada hakekatnya merupakan hakekat dari penegakan hukum. (Satjipto Rahardjo : 15)

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa penegakan hukum tidak lain sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum kedalam peristiwa-peristiwa yang nyata. Jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu kedalam perbuatan-perbuatan kongkrit. Penegakan hukum pidana demikian dapat pula dilihat sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan. (Barda Nawawi Arief, 1998 : 2)

Bertolak dari uraian tentang penegakan hukum pidana di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ekonomi dalam pembuatan kebijakan, baik pada tingkat pembentukan perundang-undangan (tahap formulasi), tahap aplikasi maupun tahap eksekusi telah sangat berpengaruh di Indonesia. Melalui analisis ekonomi terhadap hukum, hal tersebut secara garis besar akan disampaikan dibawah ini.

Mahalnya Biaya Formulasi Peraturan Perundang-Undangan

Penegakan hukum yang dimulai dari proses legislasi yang terkristalisasi dari tahap formulasi sebuah peraturan perundang-undangan, ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini akan menjadi ironi dikalangan masyarakat, bila ternyata hasil yang dicapai dari proses tersebut tidak dapat memberikan tingkat kesejahteraan bagi rakyat. Artinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham tentang analisis ekonomi terhadap hukum yang bersifat *normative* apakah peraturan hukum yang dibuat tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak. Jika peraturan perundang-undangan tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, maka biaya banyak yang

digunakan dalam proses formulasi tersebut, bukanlah sebuah persoalan. Sebaliknya, apabila ternyata peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia (tidak ditanggapi kepentingan-kepentingan tertentu, lebih-lebih kepentingan asing), maka jelas hal tersebut akan menjadi sebuah persoalan tersendiri bagi bangsa yang akan menjadi sebuah bom waktu yang siap menghancurkan dan menjauhkan kita dari cita-cita bangsa menuju bangsa dengan masyarakat sejahtera.

Berikut ongkos proses legislasi suatu Undang-Undang inisiatif DPR sejak 2004 sampai tahun 2010.

(<http://politikana.com/baca/2009/11/12/sarapan-politikana-mahalnya-harga-sebuah-undang-undang.html>)

Tabel 1. Ongkos legislasi pembuatan Undang-Undang inisiatif DPR tahun 2004-2010

2004	2005	2006-2008	2009	2010
300	500	2,4	3	5,8
Juta	Juta	Milyar	Milyar	Milyar

Terlepas dari berbagai kontroversi yang mengiringinya, memang tidak dapat dinafikan bahwa upaya penegakan hukum “hanya” dalam tahap formulasi sebuah peraturan perundang-undangan memang sangat mahal.

Oleh karena itu, dalam kebijakan-kebijakan dalam ranah hukum pidana seperti kriminalisasi suatu perbuatan, maka penting untuk memperhatikan prinsip *cost and benefit* sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Sudarto terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kriminalisasi. (Sudarto, 1977 : 44). Hal ini urgen dilakukan demi efektifitas dan efisiensi dalam rangka penegakan hukum pidana.

Tahap Aplikasi Peraturan Perundang-Undangan

Tahap aplikasi yang merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pada tingkat pengadilan merupakan bagian kinerja dari sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana

penanggulangan kejahatan yang didalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. (Mardjono Reksodipuro, 1994 : 140)

Bila dipandang dari sudut ekonomi, maka operasionalisasi dari sistem peradilan pidana ini jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit. Apalagi jika yang ditangani adalah tindak pidana yang dalam pengusutannya sangat rumit, terutama dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau lembaga lain yang diberi kewenangan untuk itu oleh Undang-Undang.

Salah satu contohnya misalnya pada kasus *money laundering* dimana uang hasil kejahatannya tersebut tersebar diberbagai bank di luar negeri. Belum lagi jika tersangkanya melarikan diri ke luar negeri, tentu untuk memproses kasus ini jelas membutuhkan biaya banyak. Terkait hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang setidaknya telah mengakomodir prinsip ekonomi terhadap hukum yang mengutamakan efisiensi dalam penegakan hukum. Dikatakan demikian karena UU ini mengisyaratkan bahwa untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang merupakan kejahatan lanjutan dari kejahatan lainnya, tidak perlu membuktikan terlebih dahulu kejahatan yang terjadi sebelumnya, melainkan membolehkan langsung pada upaya penyusutan terhadap kasus *money laundering* nya. Selain itu, UU ini juga telah menerapkan sanksi denda yang lebih tinggi dibanding regulasi terdahulu. Karena menurut prinsip ekonomi terkait masalah sanksi (khususnya kejahatan dibidang ekonomi), bahwa sanksi denda lebih efektif dibanding sanksi penjara.

Selain Undang-Undang *money laundering* yang menerapkan prinsip ekonomi dalam regulasinya, juga terdapat Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2000 Tentang Perpajakan, dimana dalam UU tersebut mengharuskan mengganti kerugian negara sebesar dua kali lipat sampai empat kali lipat dari hasil kejahatannya. (UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perpajakan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3)). Permasalahannya sekarang, memang dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dua hal tersebut prinsip ekonomi telah diakomodir, namun dalam tahap aplikasinya masih dirasa kurang.

Tahap Eksekusi Peraturan Perundang-Undang

Tidak cukup sampai pada dua tahap sebelumnya yakni tahap formulasi dan tahap aplikasi peraturan perundang-undangan, sesungguhnya penegakan hukum pidana juga memerlukan biaya yang sangat mahal dalam tahap eksekusi. Dalam hal ini misalnya menyangkut pemberian logistik bagi para narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Sekalipun ini merupakan bagian dari hak narapidana (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Namun tetap saja dibutuhkan biaya banyak dalam usaha pemenuhannya oleh negara.

Hal diatas diperparah lagi dengan masalah kelebihan kapasitas penjara, maka beban negara juga otomatis akan membengkak. Sebagaimana diketahui, saat ini ada sekitar 135.000 narapidana, sedangkan kapasitas penjara hanya 90.000 narapidana, atau ada sekitar 45.000 narapidana yang melebihi kapasitas. Dari kelebihan itu, Kementerian Hukum dan HAM baru dapat menangani sebanyak 10.000 narapidana. (KOMPAS, edisi 30 April 2015). Hal ini tidak terlepas dari paradigma yang menyatakan bahwa penjara masih menjadi penyelesaian hukum yang utama di negeri ini. Orang yang terlibat dalam masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan mediasi cenderung langsung ditahan.

Salah satu solusi yang perlu diperhatikan guna menghadapi masalah ini adalah dengan tidak menjadikan penjara sebagai primadona hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya, perlu terobosan baru dalam penjatuhan pidana

ini, misalnya dengan betul-betul memanfaatkan sanksi lain, semisal sanksi denda.

Menurut Salman Luthan (2011), perlu diperhatikan pandangan ekonomi terhadap hukum terkait masalah sanksi, yaitu sebagai berikut: a) Sanksi dilihat seperti harga; b) Dengan harga mahal (sanksi) yang notabene bukan penjara, bagi kalangan menengah ke atas (tindak pidana ekonomi banyak melibatkan kalangan menengah ke atas), lebih efektif jika dibandingkan pidana penjara. Hal ini dikarenakan ketakutan mereka terhadap kerugian dari pada pidana penjara; c) Jika harga (sanksi) naik, maka secara individual orang akan mengurangi konsumsi terhadap barang itu; d) Sementara dalam hukum, bila harga (sanksi) naik, maka kebijakan tidak akan tergantung pada individual, melainkan akan tergantung pada yang lain dalam diri aparat penegak hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim.

Lebih lanjut menurut Salman Luthan, analisis ekonomi terhadap hukum ini memiliki kekurangan dan kelemahan, yang dapat dikemukakan sebagai berikut: a) Analisis ekonomi terhadap hukum ini tidak mempunyai standar nilai-nilai utama dalam menentukan kapan sesuatu itu dikatakan efisien; b) Negara disini dijadikan sebagai makhluk ekonomi; c) Cost murah, dapat diterima. Namun dalam konteks tertentu analisis ekonomi terhadap hukum adalah imoral; d) Motif negara melalui sanksi denda adalah mencari uang (motif ekonomi).

KESIMPULAN

Analisis ekonomi terhadap penegakan hukum pidana sangat urgen untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum yang dalam hal ini adalah hukum pidana. Hal ini dikarenakan pidana penjara yang selama ini menjadi primadona hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana dirasa kurang efektif dan efisien terutama dalam mencegah terulangnya tindak pidana.

Penjatuhan pidana denda dan hukuman mati yang telah mencerminkan efektifitas dan efisiensi dalam penanganan perkara pidana khususnya dalam tindak pidana *white collar crime*

harus intens dijatuhkan, mengingat kejahatan produk globalisasi ini jelas memiliki motivasi dan karakteristik yang berbeda, baik dalam jenis tindak pidananya maupun yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana itu sendiri. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana ini bukan semata-mata melakukan kejahatan atas desakan ekonomi dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan memang karena dilandasi rasa serakah dan tamak dari pelaku. Sehingga, hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana ini tidak akan menghambatnya dalam berusaha maupun mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan memaparkan perkembangan Analisis Ekonomi Atas Hukum, serta melibatkannya dalam kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, maka menjadi lebih terbuka kemungkinan perubahan paradigma serta lebih banyak alternatif pemikiran yang dapat disumbangkan dalam pengkajian hukum di Indonesia. Tulisan ini merupakan pengantar bagi studi yang lebih jauh terhadap Analisis Ekonomi Atas Hukum, namun demikian pada tingkatnya yang sangat minimal telah dapat memunculkan salah satu kritik penting berkenaan dengan masalah *economic efficiency* yang secara tidak sadar ada dalam perkembangan hukum di Indonesia. Oleh karena itu relevan kiranya untuk masa yang akan datang, memfungsikan model Analisis Ekonomi Atas Hukum disamping model teori hukum lain ke segenap proses hukum di Indonesia, baik dalam tingkat pembentukan, penerapan atau penegakan hukum dan dalam menganalisis doktrin serta menguji keabsahan suatu sistem sosial dan kebijakan-kebijakan tertentu. Namun demikian, layaknya hal-hal lain, analisis ekonomi terhadap hukum ini tentunya tak bisa dilepaskan dari berbagai kekurangan dan kelemahan, baik dalam tatanan teori maupun dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- _____. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana*

- Penjara. ctk ke-4. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Mahrus Ali. (2011). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- _____. (2013). *Membumikan Hukum Progresif*. ctk I. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Mardjono Reksodipuro. (1994). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. ctk-I. buku ke-2. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Muladi, (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Salman Luthan. (2007). *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Disertasi)*. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- _____. (2011). *Materi Kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi* Magister Hukum UII. Yogyakarta : Tanpa Penerbit.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Sudarto. (1977). *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta: Tanpa Penerbit.
- KOMPAS. (2015). edisi 30 April 2015.
- Undang-Undang Dasar RI (Amandemen) 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perpajakan
- Riski wijaya, *Analisis Ekonomi Atas Hukum*, dalam <http://msofyanlubis.wordpress.com/2010/08/22/analisis-ekonomi-atas-hukum/>, diakses tgl 13 April 2015, jam 13.30 WIB.
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2031089-perkembangan-analisis-ekonomi-atas-hukum/>, diakses tanggal 13 April 2015, jam 14.15 WIB.
- <http://analisisekonomi.blogspot.com/2008/08/10-prinsip-ekonomi.html>, diakses tanggal 10 Mei 2015, jam 19.15 WIB.
- Sarapan Politikana ; *Mahalnya harga sebuah Undang-Undang*, dalam <http://politikana.com/baca/2009/11/12/sarapan-politikana-mahalnya-harga-sebuah-undang-undang.html>, diakses tanggal 9 Mei 2015, jam 14.40 WIB.

PENGARUH PENERAPAN KOMPARASI METODE NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) DAN METODE DRIIL TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH SEJARAH INDONESIA ABAD XIX-XX

¹Zuriatin, ²Roni Irawan

^{1,2}Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima

¹atinamin57@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Sejarah Indonesia Abad XIX-XX dengan menerapkan komparasi metode number head together dengan metode driil. Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksperimen. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes berbentuk esay. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis penelitian digunakan uji-t pada taraf signifikan 5%, sebelum menggunakan uji-t terlebih dahulu dilakukan perhitungan prasyarat yaitu menguji normalitas data. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig (2-tailed) sebesar 0,00 dan nilai ini lebih kecil dari 0.05 ($0,00 < 0,05$) maka dapat diketahui hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif (H_a) dan H_0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan komparasi NHT dengan driil terhadap pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Sejarah Indonesia Abad XIX-XX di STKIP Taman Siswa Bima

Kata kunci: number head together, driil, pemahaman

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan wahana untuk mempersiapkan manusia menjadi insan yang berilmu pengetahuan dan memiliki keterampilan. Pemerintah telah merumuskan tujuan pendidikan yang diatur dalam undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berahlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri menjadi warga negara indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab.

Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan, tentu memiliki tujuan untuk menghasilkan output yang berkualitas tinggi, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan zaman yang terus berkembang saat ini

Untuk mencapai tujuan yang diamanatkan dalam UU No 20 tahun 2003 di atas, tentu dibutuhkan berbagai terobosan-terobosan baru. Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan dan kemajuan yang diberlakukan di perguruan tinggi seperti peningkatan kualitas pengajar

melalui program sertifikasi dosen, tidak diberlakukan lagi tenaga S1 untuk mengajar S1, serta diberikan kesempatan bagi dosen untuk mengikuti berbagai hibah penelitian.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kemajuan-kemajuan tersebut belum semuanya berbanding lurus dengan kenyataan yang terjadi, seperti masih rendahnya prestasi belajar mahasiswa 2 tahun terakhir pada mata kuliah sejarah Indonesia Abad XIX-XX. Seperti data yang diperoleh dari dosen pengampu berikut terkait persentase ketuntasan belajar mahasiswa dari hasil ujian semester (UAS) sebagai berikut:

Tabel 1. persentase ketuntasan mahasiswa

No	Tahun	% ketuntasan
1	2014	54 %
2	2015	56%

Selain persentase ketuntasan yang masih rendah, mahasiswa juga sebagian besar kurang aktif berpartisipasi dalam proses perkuliahan, akibat kemampuan mahasiswa yang heterogen mengakibatkan penyampaian materi membutuhkan waktu lebih lama.

Dari berbagai permasalahan di atas, sangat diperlukan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan pemahaman mahamahasiswa

yang memiliki kemampuan yang heterogen. Terdapat metode yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut yaitu komparasi metode NHT dan metode *Number Head Together* (NHT) merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif berbasis *student centre* yang dapat memfasilitasi para peserta didik untuk saling membagi ide-ide mereka dalam proses pembelajaran. Metode NHT juga tidak hanya digunakan pada mahasiswa-mahasiswa SD, SMP, maupun SMA, akan tetapi dapat juga digunakan pada tingkat pemahaman mahasiswa. Menurut Lie menyebutkan bahwa metode *Numbered Heads Together* dapat digunakan dalam semua matapelajaran dan dalam semua tingkatan usia. Adapun keunggulan dari NHT seperti anggota kelompok harus menguasai materi karena dalam sistem pembelajaran akan dipanggil secara acak satu dari anggota kelompok untuk maju mempresentasikan materi hasil diskusi, saling berbagi pengetahuan, dan saling menghargai serta saling berinteraksi. Sedangkan metode *Number Head Together* menurut Zain merupakan metode mengajar yang melatih mahasiswa agar memperoleh ketangkasan, ketepatan, kesempatan dan keterampilan (Zomrotul, 2013: 47). Dari komparasi dua metode ini sangat diyakini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa karena akan diberikan latihan secara terus menerus dalam kelompok untuk didiskusikan bersama.

Metode Number Head Together (NHT)

Menurut Arends (2008: 16), bahwa *number head together* merupakan pembelajaran yang dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1998 dengan tujuan agar lebih banyak melibatkan peserta didik dalam mereviu berbagai materi yang dibahas dalam pelajaran dan untuk memeriksa pemahaman peserta didik tentang isi pelajaran tersebut. Empat langkah dari NHT yang dapat diterapkan antara lain: 1) *numbering*, 2) *questioning*, 3) *heads together*, 4) *answering*. Sedangkan menurut Arends & Kilcher (2010: 315), bahwa metode NHT, dimana peserta didik dikelompokkan beberapa kelompok (kelompok A, B, C, dll), setiap anggota kelompok diberi nomor (1, 2, 3, dll). Semua mahasiswa bertanggung jawab secara individu maupun

kelompok, saling berdiskusi dan mempelajari terkait bahan yang diberikan dosen, dan dipastikan setiap anggota kelompok memahami serta mengetahui yang dipelajari materi yang didiskusikan, kemudian dosen memanggil salah satu mahasiswa (seperti 5B) atau semua kelompok B dimintai komentar tentang pertanyaan yang diajukan dosen.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa metode NHT dapat dilaksanakan empat tahap yaitu penomoran, pengajuan masalah, diskusi, dan presentasi dengan pemanggilan nomor secara acak.

Metode *Number Head Together*

Menurut Roestiyah (2001;125), metode drill adalah “suatu teknik yang dapat diartikan dengan suatu caramengajar dimana siswa melaksanakan latihan-latihan agar memiliki ketangkasan atau ketrampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari”.

Sedangkan menurut salahuddin (Muradi,2016;4) penggunaan istilah “Latihan”, sering disamakan dengan istilah “Ulangan”, padahal maksudnya berbeda. Latihan yang dimaksudkan agar pengetahuan dan kecakapan tertentu dapat menjadi milik anak didik dan dikuasai sepenuhnya. Sedangkan ulangan adalah hanya sekedar untuk mengukur sudah sejauh mana siswa menyerap pelajaran tersebut.

Metode drill adalah suatu model pembelajaran dengan jalan melatih mahasiswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan, dengan latihan yang terus menerus, maka akan tertanam dan kemudian akan menjadi kebiasaan.

Pemahaman mahasiswa

Depdiknas (2006) menjelaskan salah satu tujuan diberikannya pembelajaran sejarah di sekolah adalah memahami konsep sejarah, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. Hal ini menjadikan pemahaman sebagai aspek yang penting dalam pembelajaran sejarah.

Skemp (1971) menyatakan bahwa “*To understand something means to assimilate it into an appropriate schema*”. Berarti, untuk memahami

sesuatu diperlukan asimilasi ke dalam suatu skema yang cocok.

Pemahaman merupakan suatu kemampuan untuk membangun koneksi kognitif. Seseorang merasa memahami sesuatu ketika mereka dapat menghubungkan pengalaman baru dengan pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya.

Barmby, dkk (2007) mendefinisikan pemahaman sebagai berikut: 1) *“To understand mathematics is to make connections between mental representations of mathematical concept.”*; 2) *“Understanding is the resulting network of representations associated with that mathematical concept.”*

Dengan kata lain, untuk memahami sejarah diperlukan suatu hubungan antara representasi mental dari konsep-konsep sejarah.

Pada pelaksanaan pembelajaran sejarah di sekolah, pemahaman relasional dan pemahaman instrumental memiliki keuntungan dalam penerapannya masing-masing. Skemp (1976) dalam artikelnya menuliskan tiga keuntungan dari pemahaman instrumental, yaitu: 1) Pemahaman instrumental biasanya lebih mudah untuk dipahami; 2) Mahasiswa dapat memperoleh jawaban benar dengan cepat, karena melibatkan sedikit pengetahuan; 3) *Reward* atau penghargaan yang diperoleh lebih cepat dan lebih jelas.

Lebih lanjut, Skemp (1976) juga mengemukakan paling tidak ada empat keuntungan dari pemahaman relasional, yaitu: 1) Lebih mudah disesuaikan dengan tugas yang baru; 2) Lebih mudah untuk diingat. Dapat menjadi tujuan yang efektif dalam pembelajaran; 3) Memiliki skema yang dapat diperluas.

Seiring dengan berjalannya waktu, Skemp (1987) mengembangkan jenis pemahaman ke dalam tiga kategori, yaitu: 1) *Instrumental understanding is the ability to apply an appropriate remembered rule to the solution of a problem without knowing why the rule works*; 2) *Relational understanding is the ability to deduce specific rules or procedures from more general mathematical relationships*; 3) *Formal understanding is the ability to connect mathematical symbolism and notation with relevant mathematical ideas and to combine these ideas into chains of logical reasoning.*

Secara lebih sederhana, pemahaman instrumental dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan aturan/prosedur dalam pemecahan masalah, tanpa mampu mengungkapkan alasan dapat digunakannya aturan/prosedur tersebut.

Pemahaman relasional diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan suatu aturan/prosedur dalam pemecahan masalah dan mengetahui alasan digunakannya prosedur tersebut. Sedangkan pemahaman formal dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dengan menghubungkan konsep dan maknasejarah dengan peristiwa-peristiwasejarah dan menggabungkannya ke dalam rangkaian penalaran yang logis.

Sebagai contoh, ketika mahasiswa dihadapkan pada kajian tentang waktu peristiwa sejarah, mahasiswa dengan pemahaman instrumental hanya memanfaatkan kemampuannya dalam menghafal satu peristiwa sejarah saja untuk menyelesaikannya. Sehingga apabila mahasiswa lupa dengan tahun, maka mahasiswa tidak dapat menjelaskan masalah tersebut. Sedangkan mahasiswa dengan pemahaman relasional maupun formal, dapat menghubungkan konsep sejarah dengan peristiwa dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga apabila mahasiswa lupa dengan tahun atau peristiwa yang akan dibahas, maka mahasiswa tersebut dapat menerapkan konsep eksponen untuk menguraikan suatu peristiwa dengan mengaitkan peristiwa yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Lebih lanjut, mahasiswa dengan pemahaman formal bahkan dapat menggunakan konsep-konsepsejarah lain yang juga relevan dan dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa pemahaman akan suatu konsep memiliki peran yang penting dalam pemecahan suatu masalah. Karena melalui pemahaman konsep, mahasiswa dapat merencanakan strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah.

Pemahaman siswa dalam pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini

mengadopsi jenis pemahaman yang diungkapkan oleh Skemp (1987) yaitu pemahaman instrumental, pemahaman relasional, dan pemahaman formal dan diartikan sebagai kemampuan siswa dalam menghubungkan konsep-konsep sejarah yang telah diperoleh sebelumnya untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan fase yang dikemukakan Polya yaitu:

memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali.

Adapun indikator yang digunakan untuk melihat pemahaman siswa dalam pemecahan masalah sejarah berdasarkan fase yang dikemukakan Polya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Indikator Pemahaman Siswa dalam Pemecahan Masalah Sejarah

No	Fase Pemecahan Masalah	Jenis Pemahaman	Indikator
1.	Memahami masalah	Intrumental	Menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan sama persis dengan dalam soal.
		Relasional	Menyatakan kembali masalah dengan kata-kata sendiri.
		Formal	Menyatakan kembali masalah dengan kata-kata sendiri dan merepresentasikannya dengan gambar atau simbol yang cocok dengan menggunakan penalaran yang logis.
2.	Menyusun rencana	Instrumental	Membuat rencana berdasarkan prosedur yang telah dihafal tanpa mengetahui apakah rencana tersebut dapat bekerja atau tidak.
		Relasional	Membuat rencana dengan cara menurunkan suatu aturan dari masalah yang pernah diselesaikan sebelumnya disertai alasan yang rasional.
		Formal	Membuat rencana dengan cara menurunkan suatu aturan dari masalah yang pernah diselesaikan sebelumnya dan menggunakan penalaran yang logis dalam mengeliminasi rencana yang tidak diperlukan.
3.	Melaksanakan rencana	Instrumental	Melaksanakan prosedur yang telah direncanakan pada fase-2 tanpa mengetahui mengapa prosedur tersebut dapat diterapkan.
		Relasional	Melaksanakan prosedur yang telah direncanakan pada fase-2 disertai dengan pengetahuan mengapa prosedur tersebut dapat diterapkan.
		Formal	Melaksanakan prosedur yang telah direncanakan pada fase-2 disertai dengan pengetahuan mengapa prosedur tersebut dapat diterapkan dan mampu menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwasejarah yang relevan.
4.	Memeriksa kembali	Instrumental	Memeriksa jawaban yang diperoleh dengan memperhatikan apakah langkah yang diterapkan sudah sesuai dengan prosedur yang direncanakan pada fase-2.
		Relasional	Memeriksa jawaban disertai alasan yang rasional.
		Formal	Memeriksa jawaban dengan menggunakan konsep/ide sejarah yang relevan.

Sumber: Diadaptasi dari Baroody (1993), Polya (1973), dan Skemp (1987).

Pada penelitian ini, pemahaman siswa ketika memahami suatu masalah dapat dilihat dari: bagaimana siswa menyatakan kembali masalah yang diberikan. Pada fase selanjutnya, yaitu fase menyusun rencana, pemahaman siswa dapat

dilihat dari: bagaimana cara siswa membuat rencana penyelesaian.

Ketika dalam fase melaksanakan rencana, siswa dengan pemahaman instrumental akan melaksanakan prosedur/aturan yang telah direncanakan pada fase-2 tanpa mengetahui

mengapa prosedur/aturan tersebut dapat diterapkan. Pada fase terakhir, yaitu fase memeriksa kembali, pemahaman siswa dapat dilihat dari cara siswa tersebut memeriksa jawaban yang telah diperoleh.

Komparasi NHT dan driil

Komparasi metode NHT dan metode driil dalam penelitian ini adalah penerapan kedua metode sekaligus dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang digunakan nantinya yaitu 1) fase penomoran, 2) fase latihan (dosen mengajukan pertanyaan melalui latihan secara terus menerus minimal 3 kali memberikan latihan), 3) fase diskusi, 4) fase presentasi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu (quasi eksperiment) yang melibatkan dua kelompok, yaitu satu kelompok sebagai eksperimen I dan satu kelompok sebagai kelas kontrol. Kelompok eksperimen diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) berkomparasi dengan model pembelajaran Drill. Sedangkan kelompok kontrol menggunakan pembelajaran biasa/konvensional

Desain Penelitian

Adapun desain penelitian yang digunakan adalah “pree test-Posttest Control Group Deign” yang modelnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Desai Penelitian

E	Pre test	T1	Post test
---	----------	----	-----------

Ket :

E: Kelompok Eksperimen

T1 : Perlakuan (Treatment) dengan menggunakan model pembelajaran NHT berkomparasi dengan model Drill

Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semesterIV yang terdiri dari 1 kelas di STKIP Taman Siswa Bima dengan jumlah mahasiswa 23 orang.

Sampel

Karena populasi di STKIP taman Siswa Bima hanya 1 kelas, maka 1 kelas ini langsung dijadikan sampel penelitian

Instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes esay untuk mengukur pemahaman mahasiswa pada matakuliah sejarah Indonesia Abad XIX-XX. Tes ini dimaksudkan untuk mengetahui dan membandingkan pemahaman mahasiswa terhadap matakuliah sejarah Indonesia Abad XIX-XX pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Validitas instrumen penelitian untuk variabel pemahaman mahasiswa dilakukan validasi ahli melalui forum diskusi (FGD)

Teknik analisa data

Uji prasyarat analisis

Menurut sudjana uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui distribusi sampel yang normal, perhitungan uji normalitas dilakukan melalui uji liliefors dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Dalam penelitian ini untuk uji normalitas menggunakan program SPSS. Adapun hasil uji normalitas data sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		pretes	postes
N		23	23
Normal Parameters ^a	Mean	48.9565	63.6957
	Std. Deviation	1.14037E1	9.28065
Most Extreme Differences	Absolute	.106	.128
	Positive	.094	.104
	Negative	-.106	-.128
Kolmogorov-Smirnov Z		.507	.613

Asymp. Sig. (2-tailed)	.960	.846
------------------------	------	------

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas, diperoleh nilai sig. (2-tailed) untuk pretes sebesar $0,960 > 0,05$ dan nilai sig. (2-tailed) untuk postes sebesar $0,846 > 0,05$. Ini menandakan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikansi melebihi $0,05$.

Uji hipotesis

Ha : Terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan komparasi NHT dengan driil terhadap pemahaman mahasiswa

Ho : Tidak terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan komparasi NHT dengan driil terhadap pemahaman mahasiswa

Data yang didapat dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji-t satu sampel. Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis menggunakan bantuan SPSS 16 dengan kriteria Jika nilai sig (2-tailed) $< 0,05$ maka H_a diterima.

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis dekskripsi dari data pretest dan postes diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Deskripsi Data Hasil Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
pretes	23	48.9565	11.40366	25.00	70.00
postes	23	63.6957	9.28065	45.00	85.00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pretes dan postes berbeda. Dimana nilai rata-rata pretes hanya 48,96 dan postes naik menjadi 63,7. Begitupun dengan nilai minimum yang diperoleh dari data pretes hanya 25 dan nilai maksimum 70, sedangkan postes untuk nilai minimum naik menjadi 45 dan nilai maksimum naik menjadi 85

Uji Hipotesis

Ha : Terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan komparasi NHT dengan driil terhadap pemahaman mahasiswa

Ho : Tidak terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan komparasi NHT dengan driil terhadap pemahaman mahasiswa

Data yang didapat dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji-t satu sampel. Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis menggunakan bantuan SPSS 16 dengan kriteria jika nilai sig (2-tailed) $< 0,05$ H_a diterima dan H_o ditolak

Adapun hasil uji dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Hipotess Pertama
Paired Samples Test

	Paired Differences						t	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference					
				Lower	Upper				
Pair 1 pretes - postes	-1.47391E1	7.25645	1.51308	-17.87706	-11.60120	9.741	22	.000	

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel diatas diperoleh nilai sig (2-tailed) sebesar 0,00 dan nilai ini lebih kecil dari 0.05 ($0,00 < 0,05$) maka dapat diketahui hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif (H_a) dan H_o ditolak, yang berarti terdapat pengaruh pembelajaran

dengan menggunakan komparasi NHT dengan driil terhadap pemahaman mahasiswa

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji dua hipotesis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat

pengaruh pembelajaran dengan menggunakan komparasi NHT dengan drill terhadap pemahaman mahasiswa Pada Mata Kuliah Sejarah Indonesia AbadXIX-XX

DAFTAR PUSTAKA

- Barmby, P., Harries, T., Higgins, S., Suggate, J. 2007. "How Can Asses Mathematical Understanding?". *Proceedings of the 31st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education*. pp. 41-48. Seoul: PME.
- Baroody, A. J. 1993. *Problem Solving, Reasoning, and Communicating*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Depdiknas. 2006. *Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BSNP.
- K, Roestiyah N.1989. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta:Rieneka Cipta
- Mousley, J. tt. *What Does Mathematics Understanding Look Like?*. Deakin University.
- Polya, G. 1973. *How To Solve It*. New Jersey: Princeton University Press.
- Skemp, R. R. 1971. *The Psychology of Learning Mathematics*. Middlesex: Penguin Books.
- Skemp, R. R. 1976. *Relational Understanding and Instrumental Understanding*. *Mathematics Teaching*, 77 , 20-26.
- Skemp, R. R. 1987. *The Psychology of Learning Mathematics (Expanded American Edition)*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Rusman, Dr. 2011. *Model-model Pembelajaran*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

PERAN KESULTANAN BIMA PADA MASA SULTAN ISMAIL TAHUN 1819-1854

Dewi Ratna Muchlisa Mandyara

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
dratnamuchlisa@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pada masa pemerintahan Sultan Ismail, hubungan Kesultanan Bima dengan Belanda bagaikan api dalam sekam, hanya menunggu melahirkan satu peranan. Perjanjian sudah dilaksanakan, namun tidak dapat meredakan suasana, maka penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui Gambaran Umum Bima Pada Masa Sebelum Pemerintahan Sultan Ismail, 2) untuk mengetahui Latar Belakang Kehidupan Sultan Ismail, 3) Untuk mengetahui Peran Kesultanan Bima Masa Pemerintahan Sultan Ismail Pada Tahun 1819-1854. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosial dan pendekatan agama. Metode penelitian sejarah dalam penulisan skripsi ini ada empat langkah yaitu heuristik, kritik sumber, interprestasi dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Sultan Ismail adalah putra dari Sultan Abdul Hamid, dilahirkan pada tanggal 1 Zulhijah 1211 H. di lantik menjadi Sultan yang ke X (sepuluh) pada tanggal 26 November 1819 atau Safar 1235 H. kemudian di beri gelar *Ma Wa'a Alu* karena beliau berbudi luhur dan bersikap sopan santun, disamping bergelar *Ma Wa'a Alu* Sultan Ismail juga diberi gelar "*Manuru Sigi*", atas jasa dan pengabdianya dalam pembangunan Mushalla dan Masjid di seluruh Wilayah Kesultanan Bima, 2) Pada masa pemerintahan Sultan Ismail pada tahun 1819-1854 sejarah mencatat karya besar sultan Ismail bagi perekonomian dan keamanan tanah Bima, karena Sultan Ismail diberi gelar *Ma Wa'a Alu* serta sifat dan pembawaan Sultan Ismail sangat halus dan lembut. Pada masa pemerintahan Sultan Ismail, Bima berada dalam kekuasaan Inggris. Sultan Ismail di beri gelar *Ma Wa'a Alu* karena beliau berbudi luhur dan bersikap sopan santun dan *Manuru Sigi* atas jasa dan pengabdianya dalam pembangunan masjid di seluruh wilayah Kesultanan Bima. Sultan Ismail Wafat pada tahun 1854 M dan dimakamkan di halaman masjid Kesultanan Bima, 3) Pada awal pemerintahan Sultan Ismail, Kesultanan Bima baru saja lepas dari kemiskinan dan kelaparan akibat meletusnya gunung Tambora, serangan bajak laut, dan musim kemarau panjang. Pada saat itu Kesultanan Bima laksana seorang yang baru saja sembuh dari penyakit kemiskinan. Sultan Ismail bersama Ruma Bicara Abdul Nabi bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat.

Kata Kunci: Kesultanan Bima, Sultan Ismail

PENDAHULUAN

Bima adalah Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan kerajaan yang terpenting di pulau Sumbawa maupun di kawasan pulau-pulau Sunda Kecil pada kurun waktu abad ke 17-19. Kesultanan Bima mempunyai batas wilayah di sebelah utara Laut Flores, sebelah selatan Samudera Hindia, sebelah timur Selat Sape, sedangkan batas sebelah barat adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu. Secara fisiografi terletak pada 117° 40' 19" 10' Bujur Timur dan 70° 30' - 70° 91' Lintang Selatan. Luas wilayahnya 459.690 km persegi atau sama dengan dua puluh persen dan luas

wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dan hanya 138.924 km persegi berupa dataran rendah (Hendry Chambert Loir, 2004:16).

Kerajaan Bima berada di pulau Nusa Tenggara Barat tepatnya di Bima. Kerajaan Bima ini sudah diperintah oleh 26 raja kemudian setelah raja yang ke 27 barulah berubah menjadi Kesultanan karena pada saat itu pemerintahan mulai berdasarkan pada syari'at Islam. Kesultanan Bima sebelum masa Kesultanan Ismail yaitu sekitar tahun 1817 para sultan lebih banyak fokus untuk memperbaiki keadaan rakyat karena pada saat Bima sedang dijajah oleh

Belanda. Belanda sebagai penjajah banyak melakukan hal sewenang-wenang yang merugikan masyarakat Bima, selain itu banyak terjadi perang antara masyarakat dengan penjajah. Sultan Ismail adalah putra dari Sultan Abdul Hamid, dilahirkan pada tanggal 1 Zulhijah 1211 H (\pm tahun 1795 M). Kemudian di lantik menjadi Sultan ke sepuluh pada tanggal 26 November 1819 atau Safar 1235 H. dan wafat pada tahun 1854, kemudian di beri gelar *Ma Wa'a Alu* karena beliau berbudi luhur dan bersikap sopan santun, disamping bergelar *Ma Wa'a Alu* Sultan Ismail juga diberi gelar “*Manuru Sigi*”, atas jasa dan pengabdianya dalam pembangunan Mushalla dan Masjid di seluruh Wilayah Kesultanan Bima (Abdullah Tajib, 1995:63).

Kontak pertama antara Bima dan orang-orang Belanda telah dimulai pada tahun 1605, ketika terjadi perjanjian lisan antara Raja Bima, Salasi, dan orang Belanda bernama Steven van Hegen pada tahun 1605. Dalam sumber lokal, perjanjian ini disebut *Sumpah Ncake*. Hubungan Bima dan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) mulai berlangsung dengan ditandatanganinya perjanjian pada 8 Desember 1669 dengan Admiral Speelman. Bima memberikan terobosan pada Kompeni untuk berdagang di Bima dan Raja atau Sultan tidak boleh meminta atau menarik cukai pelabuhan terhadap kapal dan barang-barang Kompeni yang keluar masuk pelabuhan (M. Hilir Ismail, 1996:146).

Setiap terjadinya pergantian Raja atau Sultan, Kompeni akan membuat kontrak baru untuk memperkuat kontrak-kontrak sebelumnya, dan juga untuk menjadikan Bima dan kerajaan-kerajaan lain di Pulau Sumbawa di bawah kekuasaan Kompeni secara perlahan-lahan. Pertikaian di antara elit penguasa di Pulau Sumbawa, baik yang sengaja direkayasa oleh Kompeni atau bukan, pada dasarnya memberikan kesempatan bagi *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) untuk memperluas pengaruh serta kekuasaannya di wilayah itu. Untuk mewujudkan keinginannya, *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) mengadakan

pendekatan melalui pembuatan kontrak atau perjanjian secara paksa.

Pada awal pemerintahan Sultan Ismail, Kesultanan Bima baru saja lepas dari kemiskinan dan kelaparan akibat meletusnya gunung Tambora, serangan bajak laut, dan musim kemarau panjang. Pada saat itu Kesultanan Bima laksana seorang yang baru saja sembuh dari penyakit kemiskinan. Sultan Ismail bersama Ruma Bicara Abdul Nabi bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Keberhasilan utusan yang di kirim pada tahun 1820, merupakan peluang bagi Belanda untuk mengikat Bima dalam perdagangan, beberapa saat setelah itu Sultan Ismail dipaksa untuk menanda tangani perjanjian yang isinya antara lain, yaitu angkatan laut Bima tidak boleh mengganggu dan menyerang kapal-kapal dagang Belanda, angkatan laut Bima harus membantu angkatan laut Belanda dalam menyerang pelaut-pelaut Makassar, Kesultanan Bima harus menyerahkan upeti berupa beras, ternak, dan hasil bumi lainnya terhadap Belanda. Di samping itu pelabuhan Lawa Due harus di serahkan kepada Belanda untuk mendirikan Benteng (Hendry Chambert Loir, 2004:28).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosial dan pendekatan agama. Metode penelitian sejarah dalam penulisan skripsi ini ada empat langkah yaitu heuristik, kritik sumber, interprestasi dan historiografi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Empat tahun setelah letusan dahsat gunung Tambora, perairan laut utara pulau Sumbawa dan sekitarnya dipenuhi para bajak laut yang dikenal dengan tabelo. Pada awal pemerintahan Sultan Ismail, Kesultanan Bima baru saja lepas dari kemiskinan dan kelaparan akibat meletusnya gunung tambora, serangan bajak laut, dan musim kemarau panjang. Pada saat itu kesultanan Bima laksana seorang yang baru saja sembuh dari penyakit yang cukup parah. Sultan Ismail bersama Ruma bicara Abdul Nabi bekerja

keras untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat (H. Abdullah Tajib, 1995:86).

Keberhasilan utusan yang di kirim pada tahun 1820, merupakan peluang bagi Belanda untuk mengikat Bima dalam perdagangan, beberapa saat setelah itu sultan Ismail dipaksa untuk menanda tangani perjanjian yang isinya antara lain. Yaitu Angkatan laut Bima tidak boleh mengganggu dan mengerang kapal-kapal dagang Belanda, Angkatan laut Bima harus membantu angkatan laut Belanda dalam menyerang pelaut-pelaut Makasar, Kesultanan Bima harus mengerahkan upetik berupa beras, ternak, dan hasil bumi lainnya terhadap Belanda. di samping itu pelabuhan lawa due harus di serahkan kepada Belanda untuk mendirikan banteng.

Menanggapi isi perjanjian itu, sultan Ismail bersama ruma bicara Abdul Nabi pada mulanya menunjukkan sikap menentang dan tidak setuju. kalau isi perjanjian itu di terima, berarti hilang kedaulatan Bima, sebaliknya kalau di tolak akan di serang oleh Belanda, tak itu amat memojokan posisi sultan, sebab pada hakekatnya isi perjanjian itu sama saja merampas kedaulatan secara terselubung. dalam keadaan yang serba sulit itu, sultan Ismail yang di juluki *Ma Wa,a Alu* beserta ruma bicara Abdul Nabi yang sudah berusia lanjut terpaksa menerima isi perjanjian, dengan perhitungan apabila di tolak akan menimbulkan peperangan yang melibatkan seluruh rakyatnya, hal ini tidak di inginkan oleh sultan yang terkenal memiliki budi yang halus (*Ma Wa'a Alu*). Sebaliknya kalau di terima, masih ada kesempatan bagi sultan untuk membina dan membimbing rakyat dengan satu keyakinan bahwa di suatu saat nanti rakyat akan mampu melawan Belanda (Syair Kerajaan Bima, 1982:94).

Sejak saat itu hubungan Bima dengan Belanda semakin panas, Sultan Ismail dan Wasir Ruma Bicara Muhammad Yakub tidak loyal lagi terhadap perjanjian dengan Belanda. Kesultanan Bima tidak mungkin menyerang para pelaut makasar yang merupakan teman seperjuangan dalam melawan Belanda. Penyerahan upeti yang diharapkan oleh Belanda tidak berjalan lancar, kesultanan bima tetap menjalankan politik

dagang bebas. Para pedagang dalam dan luar negeri tetap menjalankan kegiatan perdagangan dengan kesultanan bima, hal ini pasti mengundang kemarahan Belanda (Chambert Loir Henry, 1999:60).

Sultan Ismail dan Wasir Ruma Bicara Muhammad Yakub memahami taktik tersebut, sebelum Belanda melakukan penyerangan kesempatan itu dimanfaatkan guna menyusun langkah-langkah menghadapi segala kemungkinan. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain yaitu, Meningkatkan kembali kestabilan ekonomi yang terganggu akibat letusan Gunung Tambora, musin kemarau panjang dan serangan bajak laut yang terjadi pada masa pemerintahan sultan abdul haid, Memajukan perdagangan, Sultan bersama ruma bicara melaksanakan pembangunan dalam bidang pertanian dan peternakan, disamping memajukan pertanian dan peternakan sultan bersama ruma bicara mulai meningkatkan pengembangan perikanan laut, Disamping bidang ekonomi Sultan bersama ruma bicara berusaha meningkatkan penyempurnaan dan pembinaan di bidang pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu dengan Bapak Syarifuddin, BA mengatakan bahwa:

“Pada masa pemerintahan sultan sultan Ismail, hubungan kesultanan bima dengan Belanda bagaikan api dalam sekam, hanya menunggu saat untuk melahirkan satu peranan. Perjanjian sudah dilaksanakan, namun tidak dapat meredakan suasana, karena kesultanan Bima dengan Belanda memiliki latar belakang politik dan pandangan hidup yang amat berbeda. Kesultanan Bima adalah Kesultanan islam yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan keadilan, sebaliknya Belanda adalah penjajah yang menginjak-nginjak kemerdekaan dan keadilan. Sultan sultan Ismail dan wasir Ruma Bicara armada Daeng Manasa adalah dua tokoh yang mempunyai prinsip yang sama dalam melanjutkan kebijakan politik sultan Abdullah dan Wasir Ruma Bicara Muhammad Yakub. Belanda menyadari sikap tegas dari kedua pemimpin itu namun untuk sementara waktu

belum berani menyerang Bima karena sibuk menghadapi perang Aceh. Kebijakan sultan bersama Ruma Bicara ahmad Daeng Manasa, ternyata menimbulkan reaksi pro-kontra yang menyebabkan timbulnya dua kelompok yang berbeda prinsip dalam menangani perjanjian dengan Belanda (Wawancara, 28 Juli 2017)".

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan di atas disimpulkan bawa Sultan Ismail di beri gelar *Ma Wa'a Alu* karena beliau berbudi luhur dan bersikap sopan santun dan *Manuru Sigi* atas jasa dan pengabdianya dalam pembangunan masjid di seluruh wilayah Kesultanan Bima. Sultan Ismail Wafat pada tahun 1854 M dan dimakamkan di halaman masjid Kesultanan Bima.

Sultan Ismail dan Wasir Ruma Bicara Muhammad Yakub memahami taktik tersebut, sebelum Belanda melakukan penyerangan kesempatan itu dimanfaatkan guna menyusun langkah-langkah menghadapi segala kemungkinan. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain yaitu, Meningkatkan kembali kestabilan ekonomi yang terganggu akibat letusan Gunung Tambora, musin kemarau panjang dan serangan bajak laut yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul hamid, Memajukan perdagangan, Sultan bersama ruma bicara melaksanakan pembangunan dalam bidang pertanian dan peternakan, Di samping memajukan pertanian dan peternakan sultan bersama rumah bicara mulai meningkatkan pengembangan perikanan laut, Disamping bidang ekonomi Sultan bersama ruma bicara berusaha meningkatkan penyempurnaan dan pembinaan di bidang pertahanan dan keamanan (Hendry Chambert Loir, 2004:68).

Demi terpeliharannya keamanan di laut diusahakan pula peningkatan kemampuan dan penyempurnaan armada laut, baik dari segi personil maupun struktur organisasi. Sejalan dengan itu armada laut Bima di bagi menjadi dua bagian yaitu armada yang menangani keamanan perdagangan armada pertahanan keamanan yang bertugas untuk menjaga serangan-serangan yang datang dari luar. Dalam keseruan angkatan laut Bima terdapat pula pelaut-pelaut makassar dan pelaut ternate yang

datang menggabungkan diri dengan suka rela. Dengan demikian angkatan laut Bima merupakan gabungan dari laskar Bima bersama pelaut Makassar, Ternate dan Tidore.

Berkaitan dengan keadaan ekonomi pada masa pemerintahan Sultan Ismail, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad di ASI Mbojo, menyatakan bahwa:

"Sepengetahuan saya bahwa pada awal pemerintahan Sultan Ismail, Kesultanan Bima baru saja lepas dari kemiskinan dan kelaparan akibat meletusnya gunung Tambora, serangan bajak laut, dan musim kemarau panjang. Pada saat itu kesultanan Bima laksana seorang yang baru saja sembuh dari penyakit yang cukup parah. Sultan Ismail bersama Ruma bicara Abdul Nabi bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Keberhasilan utusan yang di kirim pada tahun 1820, merupakan peluang bagi Belanda untuk mengikat Bima dalam perdagangan, beberapa saat setelah itu sultan Ismail dipaksa untuk menanda tangani perjanjian yang isinya antara lain yaitu: Angkatan laut Bima tidak boleh mengganggu dan mengerang kapal-kapal dagang Belanda, Angkatan laut Bima harus membantu angkatan laut Belanda dalam menyerang pelaut-pelaut Makassar, Kesultanan Bima harus mengerahkan upetik berupa beras, ternak, dan hasil bumi lainnya terhadap Belanda. Disamping itu Pelabuhan Lawa Due harus di serahkan kepada Belanda untuk mendirikan banteng (Wawancara, 27 Juli 2017)".

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Sultan Ismail masyarakat Bima baru terlepas dari kemiskinan dan kelaparan akibat meletusnya gunung Tambora, serangan bajak laut, dan musim kemarau panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Sultan Ismail adalah putra dari Sultan Abdul Hamid, dilahirkan pada tanggal 1 Zulhijah 1211 H. di lantik menjadi Sultan yang ke X (sepuluh) pada tanggal 26 November 1819 atau Safar 1235 H. kemudian di beri gelar *Ma Wa'a Alu* karena beliau berbudi

luhur dan bersikap sopan santun, disamping bergelar *Ma Wa'a Alu* Sultan Ismail juga diberi gelar "*Manuru Sigi*", atas jasa dan pengabdianannya dalam pembangunan Mushalla dan Masjid di seluruh Wilayah Kesultanan Bima. 2) Pada masa pemerintahan Sultan Ismail pada tahun 1819-1854 sejarah mencatat karya besar sultan Ismail bagi perekonomian dan keamanan tanah Bima, karena Sultan Ismail diberi gelar *Ma Wa'a Alu* serta sifat dan pembawaan Sultan Ismail sangat halus dan lembut. Pada masa pemerintahan Sultan Ismail, Bima berada dalam kekuasaan Inggris. Sultan Ismail di beri gelar *Ma Wa'a Alu* karena beliau berbudi luhur dan bersikap sopan santun dan *Manuru Sigi* atas jasa dan pengabdianannya dalam pembangunan masjid di seluruh wilayah Kesultanan Bima. Sultan Ismail Wafat pada tahun 1854 M dan dimakamkan di halaman masjid Kesultanan Bima. 3) Pada awal pemerintahan Sultan Ismail, Kesultanan Bima baru saja lepas dari kemiskinan dan kelaparan akibat meletusnya gunung Tambora, serangan bajak laut, dan musim kemarau panjang. Pada saat itu Kesultanan Bima laksana seorang yang baru saja sembuh dari penyakit kemiskinan. Sultan Ismail bersama Ruma Bicara Abdul Nabi bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan, Jahiban, dan Kamaludin, 1999, "Studi Inventarisasi Naskah Kesusasteraan Islam Sebagai Peninggalan Sejarah di Kabupaten Bima dan Dompu", FKIP Universitas Mataram, Mataram.

Dudung, Abdurahman. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.

Hamidsyukrie, Z. M. Adan N. M. Ali, 1994, "Struktur dan Fungsi Cerita Prosa Rakyat Bima", FKIP Universitas Mataram, Mataram.

Ismail, M. hillir. 1996. *Sejarah Mbojo Bima: Dari Zaman Naka Sampai Zaman Kemerdekaan*. Bima-NTB: Agung Perdana.

Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

Loir, Hendry Chambert. 2004. *Kerajaan Bima: Dalam Sastra dan Sejarah*: Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Mulyadi, S. W. R dan S. M. R. Salahuddin, 1993, "Upacara dan Busana Adat Bima dalam Naskah Abad ke-18 dan ke-19 Daerah Nusa Tenggara Barat", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Nasution, H. 1974. *Sejarah dan Sastra Bima*. Yogyakarta. Pustaka Cendekia Press.

Pranoto, Suhartono W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Syamsudin, Helius. 2008. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. Ombak.

Tajib, Abdullah. 1995. *Sejarah Bima Dana Mbojo*. Jakarta. Harapan Masa.

UGM PRESS. 2008 *Pemikiran Islam Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Cendekia Press.

ANALISIS KONFLIK ANTAR DESA SAMILI DENGAN MASYARAKAT DESA DADIBOU DI KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA TAHUN 2016

M. Tahir

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
tahirbima74@gmail.com

ABSTRAK

Analisis konflik antar desa samili dengan masyarakat desa dadibou di kecamatan woha kabupaten bima. Tujuan penelitian ingin mengetahui penyebab konflik antar desa. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Konflik samili dan dadibou akibat persoalan antar pelajar, sehingga merambat kepada pemuda dan masyarakat dan pada akhirnya konflik antar kampung. Hasil penelitian bahwa konflik di Bima bukan karena tidak lapangan kerja, tetapi “ada satu sikap yang mewarisi dari generasi ke generasi yaitu ingin mencoba sesuatu yang baru”. Karena hampir masyarakat Bima memiliki aktifitas yang memadai, hanya pada tingkat anak mereka memang malas untuk pergi menaman bawang merah, panen padi. Konflik muncul akibat satu tradisi pembiaraan secara kolektif’.

Kata kunci: Konflik Sosial, Masyarakat

PENDAHULUAN

Suatu Daerah bisa dikatakan maju ketika banyak sumber daya manusia yang produktif, kenapa kemudian Bima sering terjadi konflik karena tidak banyak pengetahuan yang memadai di dalam kehidupan masyarakat dan beragama. Kalau generasi produktif tentu dia bisa menciptakan lapangan kerja ataupun bekerja di perusahaan. Di lihat pihak juga Pemerintah Daerah belum memiliki pikiran yang produktif dalam membuat kesibukan masyarakat dan pemuda, salah satunya menciptakan lapangan kerja.”hal itulah belum terjawab sampai sekarang”. Dalam pemberitaan di beberapa media salah satunya media online kahabat net (2016) “bahwa angka pengangguran di Bima mencapai 20 ribu orang”. Kalau lihat data tersebut menunjukkan bahwa angka pengangguran pemuda semakin meningkat, baik yang sekolah tamatan SMA ataupun SMP dan bahkan yang sarjana (S1) ada yang nganggur, misalnya perguruan tinggi sudah mencetak sumber daya manusia yang produktif. Maka yang menjemput itu adalah daerah berdasarkan indeks prestasi yang dimiliki oleh individu-individu yang dihasilkan dari berbagai perguruan tinggi di Bima.

Kalau dibiarkan pengangguran semakin meningkat maka konflik pun tidak akan pernah selesai, karena mereka melakukan perang antar kampung sebagai pengganti pekerjaan mereka. Hal itu terukur di beberapa desa yang sering terjadi perang misalnya konflik di Desa Kalampa dan Desa Dadibou pada tahun 2006 dan pada tahun 2014 konflik Desa kalampa dengan Desa Godo Kecamatan Woha, hal lain juga konflik Desa Risa dengan Desa DadiBou. Perang Desa Ngali dengan Desa Rendah, Desa Sai dengan Desa Kala, Desa Laju dengan Tanjung Mas. Dengan melihat persoalan perang antar kampung menjadi catatan semua pihak dan selalu bertanya kenapa sering terjadi konflik dan perang antar kampung?. Maka pisau analisa dapat dilihat, karena banyak yang tidak memiliki pekerjaan, dari pada yang bekerja, hal lain karena krisis tokoh dan pengaruh teknologi. Karena keberadaan tokoh di tiap desa hanya pelengkap perangkat sosial, baik itu tokoh agama, politik, pemuda dan masyarakat. Dapat di lihat setiap peristiwa sosial para tokoh hanya dijadikan sebagai simbol bukan dijadikan sebagai panutan dalam menentukan sesuatu yang baik. Kalau pun para tokoh semuanya produktif dalam hal pengetahuan tentu akan mampu mengatasi gejala sosial, karena pemuda sebelum

melakukan tindakan sudah pasti mereka akan melakukan konsultasi dengan para tetua-tetua yang ada di desa, oleh karena kesimpulan yang berikan oleh para tokoh tidak ada yang jelas, sehingga pemuda dan masyarakat mengambil jalannya masing-masing berdasarkan cara pandang mereka.

Kalau di lihat karena pengaruh teknologi tidak juga, ambil saja contohnya di Jawa tidak ada masyarakat yang perang antar kampung karena pengaruh teknologi, justru Jawa jauh lebih maju ketimbang Bima, Dompu dan bahkan NTB pada umumnya. Cuman kelemahannya konsumsi masyarakat terhadap teknologi dalam hal Facebook atau Twitter mereka lebih suka promosi Bima dengan upload persoalan pembunuhan, pemerkosaan, sehingga masyarakat di luar Bima akan mengetahui bahwa Bima sebagai pariwisata konflik. Kalau pendekatan teori Konflik bahwa ada status sosial yang menjadi awal konflik, sehingga muncul benturan kepentingan yang kaya dan miskin, pejabat tinggi dan pegawai rendah”. Konflik bisa saja terjadi karena dorongan kepentingan individu yang ingin memiliki kuasa dalam kehidupan sosial, kalau dilihat karena kaya dan miskin efek dari konflik di Bima tidak juga, karena masyarakat Bima banyak yang memiliki pekerjaan. Persoalan di era sekarang yang menonjol adalah gensi Desa, misalnya Risa Vs Dadibou, persoalan tersebut berawal dari anak-anak atau pemuda sehingga merambat ke masyarakat, sehingga diperkuat bahwa masalah nyawa harus di balas dengan nyawa itulah kata-kata yang sering kita dengar ketika ada pembunuhan atau perang antar kampung.

Setiap konflik di Bima saya selalu mengamati baik melalui media cetak dan media online, tidak saya temukan bahwa terjadi konflik karena kemiskinan, tetapi yang sering terjadi konflik karena persoalan gesekan antar pemuda. Sehingga merambat dikalangan tua, yang tua juga bukan hadir sebagai solusi tetapi hadir untuk mendukung kegiatan tersebut. Dengan melihat persoalan tersebut pemerintah juga bukan hadir sebagai penonton, tetapi ada langkah strategi dalam mencegah konflik antar kampung. Kalau kita dibiarkan persoalan ini

terus menerus kapan kita bisa bicara kemajuan. Sementara visi misi “Bima ramah” yang diutamakan adalah kesadaran sepiritualisme dan mental generasi, kalau mental generasi sekarang hanya konflik dan minuman keras, maka visi misi H. Indah Dama Yanti Putri (Bupati Bima) tidak bermakna. Maka pemerintah daerah harus membangun kemitraan dengan perguruan tinggi pendidikan di daerah yang melakukan penelitian berbagai persoalan yang ada, tanpa dukungan dari civitas akademika, mustahil kita bisa mengendalikan keadaan, hasil rekomendasi dari perguruan tinggi itulah yang menjadi acuan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dengan perguruan tinggi Bima selama ini seperti tidak bisa ketemu secara pemahaman. Sementara kalau kita cerminan di Jawa pemerintah daerah dengan perguruan tinggi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Konflik komunal antar kampung menjadi tren sosial di Bima hal itulah yang terdorong di beberapa di desa wilayah bagian selatan, karena hampir semua desa di wilayah bagian selatan memiliki sejantan rakitan, salah satu alat perang yang digunakan selain dari busur, parang dan senjata rakitan itu sesungguhnya motif kejahatan kolektif yang tidak mampu diberantas oleh aparat keamanan. Kalau merujuk pemikiran Max Weber dalamnya George Ritzer (2014) tokoh sosiologi Prancis mengatakan “bahwa reaksi itu muncul berdasarkan ada yang memulai meskipun atas dasar dugaan.

Maka pada konteks ini juga masyarakat konflik tidak ada tokoh yang bisa diandalkan di masing-masing Desa apakah tokoh sudah masuk arus modernisme atau apalah, tetapi itu terjadi bukan sifat alamiah manusia melainkan kehendak buta tanpa memikirkan manusia yang lain. Namun anehnya lagi di suatu desa ada saja yang menjadikan dirinya raja kecil di atas kelemahan temanya yang lain dengan menggunakan kekuatan fisik dan berani melakukan pembunuhan, perampokan dan minuman keras, narkoba serta kejahatan lainnya. Pemuda masing-masing Desa yang menganggap dirinya adalah preman dan ditakuti oleh pemuda-pemuda yang lain dan apapun perkataannya seperti ayat suci dan harus ikuti

oleh kawanya yang lain. selain dari pada itu ketika terjadi perang antar desa maka kedua desa tersebut mencari dukungan kepada desa-desa yang lain untuk meminta dukungan baik melalui alat perang ataupun makanan dan minuman, artinya ada hubungan emosional secara kejahatan yang muncul,"kalau kondisi tersebut dibiarkan maka konflik akan merambat sampai ke pemerintah dengan jalan revolusi ditingkat daerah". Semua orang menganggap dengan kehadiran H. Indah Dama Yanti Putri (Bupati Bima), mampu memberikan warna baru terhadap kondisi yang ada, baik persoalan konflik, minuman keras, narkoba, pencabulan.

Fenomena konflik yang terjadi di Kecamatan Woha, dengan melihat informasi tentang jumlah penduduk dan massa yang terlibat didalam konflik pada masa krisis tersebut maka dapat dilihat bahwa di dalam konflik tersebut terdapat sebuah mekanisme dan manajemen konflik yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Dengan kata lain, konflik yang terjadi di Desa Samili Kalampa dan Desa Dadiboi ini bukan merupakan sebuah gerakan spontanitas, dan patut diperhatikan bagaimana konflik yang terjadi. Berdasarkan masalah di atas maka judul yang diangkat dalam penelitian terkait dengan Analisis Konflik Antar Desa Samili Dengan Masyarakat Desa Dadibou Di Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang artinya setiap permasalahan yang akan muncul selalu diungkapkan secara lebih mendalam dan terperinci dengan menggunakan deskriptif kualitatif secara sistematis. Pendekatan kualitatif ini merupakan pemahaman berperan serta observasi partisipasi, wawancara mendalam merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Marshal dan Rossman, menyebutkan” bahwa penentuan tempat sebagai latar kajian selain dibingkai dalam teoritik yang dikaji, juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasionalnya, Setya yuwana Sudikan (2000). Penelitian akan dilaksanakan di Desa Samili dan Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten dan akan di laksanakan pada tanggal 06 desember 2016. Subyek penelitian, penentuan subyek penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti, terdiri dari 3 orang tokoh masyarakat. Peneliti ini menggunakan penelitian *snowball sampling* agar penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Penentuan sampel dipilih dulu satu orang atau dua orang, (Sugiyono , 2011). Sumber data, Lofland, dalam Lexi J. Moleong (2002) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data untuk menjawab konflik antar kampung yang adalah hasil wawancara, analisis dokumen berupa peraturan daerah.

Data, yang Perolehan data dalam penelitian yang luas serta mendalam. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui. Observasi yang dimaksudkan dalam penelitian adalah peneliti mengamati aktifitas-aktifitas yang ada disekitar lingkungan Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Wawancara, pengumpulan data dalam penelitian ini akan melalui wawancara terhadap masing-masing subyek penelitian yang telah ditentukan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang konflik antar kampung. Dokumentasi, terlepas dari observasi dan wawancara pada penelitian ini dokumen yang digunakan peneliti berupa foto, rekaman, video.

Dalam hal ini peneliti merupakan perencanaan, pelaksana pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian (Maleong, 2014) instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sisi lain instrumen pendukung yaitu pedoman wawancara dan dokumentasi. Uji Keabsahan Data melakukan Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu

bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif. Yanuar, Ikba (2012), pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi teknik: 1) uji Kredibilitas; 2) uji Transferabilitas; 3) uji Konfirmabilitas, dan 4) uji dependabilitas. Teknik Analisis Data, Sugiyono, (2011) teknik analisis data yang digunakan adalah deksriptif naratif. teknik ini Miles dan Haberman dalam Sugiyono, (2011) dengan secara interaktif melalui proses data reduksi, Displai Data, verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Konflik Sosial

Bahwa penyebab konflik dapat di sebabkan oleh individu maupun kelompok yang pada dasarnya terjadi kesalah pahaman antara komunikasi dan sikap seseorang atau lebih sehingga apa yang di jumpai oleh kelompok masyarakat merupakan tindakan kriminalitas pada tingkat kekerasan sereta penyimpangan sosial sebagaimana konflik sosial melibatkan masyarakat banyak dalam bentuk peperangan antar Desa. Terkadang hal itu sering kali terjadi dalam kehidupan sosial kita, bahwa persoalan konflik merupakan akumulasi sikap individu yang memanfaatkan momentum demi meraih status sosial. Kriesberg yang dikutip oleh Dean G. Pruitt (2004), mengatakan “bahwa *individuous comparison* sangat mungkin terjadi ketidak konsistenan status”. Kalau dilihat bahwa konflik Desa Sami dengan Dadibou, bukan saja pada hari ini namun konflik tersebut merupakan terjadi sejak pada tahun 2006, baik persoalan antar pelajar, maupun persoalan pemuda.

“Sebenarnya, siapapun tidak ada yang menginginkan konflik terjadi sebab masyarakat yang ada di bagian Kecamatan Woha Kabupaten Bima merupakan mayoritas petani lahan pangan sayur maru, terutama di Desa Samili di kenal masyarakat petani menyadari bahwa konflik itu bencana bagi mereka seperti misalnya masyarakat antar Desa pernah merusak tanaman padi, bawang, jagung dan membakar rumah pondok”, (Wawancara dengan Bapak M. H selaku kepala Desa Samili, tanggal 10 Desember 2016).

Kalau di lihat kondisi masyarakat yang maroritas petani tentu, kita dapat menilai bahwa konflik tersebut, merupakan suatu tindakan berdasarkan cara pandang dan cara bertindak, pemuda yang tidak memiliki lapangan pekerjaan, hal itu akan memeperngaruhi kondisi lingkungan sosial, kalau memang Pemerintah Daerah tidak mau melibatkan diri dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam kehidupan masyarakat Desa Samili dan Dadibou, yang awalnya aman-aman saja, setelah berkembangnya dunia modern, maka dapat memperngaruhi cara sikap masyarakat untuk mencari sesuatu yang baru, misalnya konflik dengan menggunakan alat senjata rakitan.

Konflik Sosial, sebagai penghambat pembangunan.

Secara umum sejak konflik sosial mulai menguasai perubahan pada tatanan sosial sampai pada sikap - sikap alamiah masyarakat, warga Negara di perlukan untuk hidup dalam kesatuan bernegara hal ini berkaitan dengan filsafat hidup dari suatu bangsa atau masyarakat yang sudah tentu mendapatkan keharmonisan dan keutuhan sosial namun pengaruh timbalik antara lingkungan sosial dan budaya dengan masyarakat pada umumnya sering mengalami adaptasi yang kurang tepat atau suatu keadaan yang membawa pengaruh terhadap berlangsungnya proses konflik, seperti biasa istilah sebab dan akibat sudah di anggap biasa - biasa saja oleh masyarakat walaupun akibatnya sangatlah fatal. konflik sosial dapat di pandang sebagai akibat gejala suatu proses sosial yang di mana pertikaian tersebut menghasilkan dampak besar pada lingkungan masyarakat seperti kerawanan lingkungan dan kerusakan maupun kerugian dari berbagai aspek pendapatan ekonomi serta sarana prasarana pertumbuhan pada kesehatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

”konflik sosial itu sering terjadi dari tahun ke tahun karena adanya pengaruh atau penekanan pada silsilah kekeluargaan (profokator), misalnya: salah satu warga Desa Samili memukul atau membacok kepala seseorang yang merupakan salah satu dari warga Desa Dadibou hingga terluka dan

berdarah, maka keluarga korban tersebut tidak serta - merta membiarkan tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku tersebut, melainkan di ancam, di kejar dan di buruh dll, kemudian dari pihak pelaku tidak bisa tinggal diam ketika keluarganya di ancam”, (Wawancara dengan Bapak T selaku Kaur Pemerintahan Desa Dadibou, tanggal 01 desember 2016).

Persoalan muncul bukan sikap alamiah masyarakat namun persoalan tersebut akibat sikap arogansi kelompok yang selalu memaksakan kehendak. Dalam suatu kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai masalah dan juga banyak peristiwa yang terjadi dari berbagai penyimpangan sosial, kondisi suatu masyarakat sejatinya tergantung pada masyarakat itu sendiri jika masyarakat itu tidak lagi menghargai norma-normanya maka tujuan suatu masyarakat tidak dapat di junjung tinggi secara bersama namun pada kondisi yang terjadi bahwa senantiasa masyarakat slalu berhadapan dengan keadaan yang kurang stabil dalam arti masyarakat sering mengalami dilematis sosial bahwa terjadi kelemahan di dalam struktur sosial, oleh sebab itu adapun metode ataupun cara untuk mengatasi masalah kepincangan sosial.

Hasil Penelitian Dan Implikasi Teori

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konflik tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama, kemiskinan, minuman keras, narkoba. Sementara kondisi yang terjadi di samini dan Dadibou konflik muncul akibat sikap arogansi kelompok yang ingin selalu menguasai, dan sama hal seperti seorang penjajah. Thibaut dan Kelley yang dikutip oleh Dea G. Fruitt dkk (2004) “bahwa masyarakat dan kelompok yang ada di dalamnya secara konstan mengembangkan berbagai aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Aturan yang lebih meluas dan berlaku lebih lama di sebut norma. Fungsi utama aturan-aturan tersebut adalah, untuk mengantisipasi aspirasi, pihak-pihak oposal sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik”. Konflik tentu perilaku yang melanggar aturan sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, bisa dipahami persoalan tersebut akibat tidak ada wilayah kontrol yang memadai

antara orang tua dengan anak dan anak dengan lingkungan sosial serta anat dengan pendidikan. Hasil penelitian bahwa konflik di Bima bukan karena tidak lapangan kerja, tetapi “ada satu sikap yang mewarisi dari generasi ke generasi yaitu ingin mencoba sesuatu yang baru”. Karena hampir masyarakat Bima memiliki aktifitas yang memadai, hanya pada tingkat anak mereka memang malas untuk pergi menaman bawang merah, panen padi. Konflik muncul akibat satu tradisi pembiaraan secara kolektif”.

KESIMPULAN

Bahwa konflik di Bima bukan karena tidak memiliki pekerjaan tetapi memang muncul akibat sikap arogansi kelompok pemuda di salah Desa tersebut yang suka minuman keras, dan membuat onar diberbagai kegiatan baik olah raga, hiburan malam. Konflik Samili dan Dadibou tentu muncul adalah persoalan pemuda, sehingga merambat sampai kepada masyarakat. Tidak kalah saingnya juga masyarakat setempat bukan merespon positif namun mereka justru mendorong dalam melakukan aktifitas yang sama. Bahwa cara untuk mengatasi terjadinya konflik sosial bisa di lakukan dengan mengadakan penyuluhan atau seminar forum diskusi ilmiah, baik yang berkaitan dengan konflik maupun dengan sosialisasi tentang hukum sebagai upaya mendidik dan membangun hubungan komunikasi yang sehat antara sesama guna dalam menyusun suatu pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi agar tetap melestarikan nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Dean G. Pruitt, jeffrey Z. Rubin. 2004. *Teori konflik sosial* :Pustaka pelajar.
- George ritzer. 2014. *Teori sosiologi modern* : Kencana preadamedia group.
- Lexi J. Moleong 2002. *Metologi Penelitian Kualitatif*.Bandung : PT. Remaja Rosda karya.
- Media online kahabat net (2016)
- Setya, Yuwana Sudikan.2000. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Surabaya: citra Wacana.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yanuar, Ikbal. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Reifika Aditama.

PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

Suherman

STKIP Taman Siswa Bima
email: suherman_sh.mdjafar@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisa model pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Wanita. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor Apa Sajakah yang menjadi Penghambat pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita dan Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologi hukum karena untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pembinaan Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan beberapa hal, yaitu: Kualitas Sumber Daya Manusia, Kurangnya Kerja sama dengan Pihak ketiga, serta sarana dan prasarana yang belum memadai serta beberapa faktor penghambat pelaksanaan Pembinaan yaitu: Faktor Intern (Sarana Gedung Lapas, Kualitas dan Kuantitas Petugas, Kesejahteraan Petugas, Sarana/Fasilitas, Anggaran Lapas, SDM, Ragam Program Pembinaan) serta Faktor Ekstern (Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan). Untuk itu disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para Petugas/Pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan, serta melaksanakan pembinaan secara optimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan diharapkan kepada pemerintah pusat untuk membetuk peraturan-peraturan yang khusus dalam mengatur tentang pembinaan Narapidana wanita agar tepat sasaran

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana Wanita, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus

PENDAHULUAN

Dahulu, jenis hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau digantung. Dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh Hakim. Seiring dengan itu, eksistensi bangunan tempat penahanan sementara semakin

diperlukan, apalagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan untuk waktu yang ditentukan oleh hakim tersebut yang tentunya memerlukan waktu yang lama, sehingga diperlukan wadah atau tempat untuk menahan pelaku tindak pidana

Berbicara tentang penjara, di Indonesia secara kronologisnya sudah ada sejak zaman Belanda. Ini dapat dirujuk pada *Destichten Reglement*

Tahun 1917. Dalam Pasal 28 ayat (1) *Reglement* tersebut dinyatakan bahwa: Penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana ” “Tujuan pidana penjara tersebut adalah pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya” yang harus diutamakan, tetapi pada akhir Tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan dan hak tersebut lebih mengarah atau mengutamakan “pembinaan” (*re-educatie and re-socialisatie*). Sebenarnya “pemasyarakatan” tersebut bisa diartikan secara umum memasyarakatkan kembali seorang pelaku tindak pidana yang selama ini salah jalan dan merugikan orang lain/masyarakat dan mengembalikannya kembali kejalan yang benar dengan cara membina orang yang bersangkutan tersebut sehingga menguntungkan atau berguna bagi orang lain/masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya, sistem Pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 1964 tersebut harus ditunjang oleh payung hukum supaya lebih berarti keberadaannya yaitu Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan..

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana Wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap Narapidana Pria karena wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis, hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995:

Ayat 1: Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar; a. Umur, b. Jenis kelamin, c. Lama Pidana yang dijatuhkan; d. Jenis Kejahatan, e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan.

Ayat 2: Pembinaan Narapidana Wanita dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita

Didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah narapidana wanita tidak disebutkan pengaturannya. Karena yang disebutkan hanya narapidana, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun narapidana wanita, ini berarti telah terjadi kekosongan norma, sehingga kedepan hal ini perlu mendapat pengaturan norma antara narapidana laki-laki dan narapidana wanita tidak bisa diperlakukan sama, mengingat perbedaan fisik maupun psikologis antara laki-laki dan wanita.

Untuk mengakomodasi tempat khusus untuk menghukum atau membina Narapidana/Tahanan Wanita, maka Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 dan 2, dibuatlah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita. Tujuan didirikan Lembaga Pemasyarakatan Khusus wanita tersebut adalah untuk memisahkan antara narapidana pria dan narapidana wanita dengan alasan faktor keamanan dan psikologis. Adapun cara pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan wanita pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Hanya sedikit kekhususan, dimana Lembaga Pemasyarakatan Wanita lebih banyak diberikan keterampilan, misalnya menjahit, menyulam, dan memasak yang identik dengan pekerjaan wanita sehari-hari. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Wanita memberikan cuti haid bagi narapidanya yang mengalami menstruasi. Dalam hal melakukan pekerjaan, narapidana wanita diberikan pekerjaan yang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dijabarkan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah model pembinaan terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Faktor apa Saja yang menjadi Penghambat pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita dan Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Dompu dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi?

Teori hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Teori Keadilan

Teori Keadilan Adam Smith.

Alasan Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan adalah: keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang/ pihak dengan orang/pihak yang lain.

Teori Keadilan Distributif John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls diakhir abad ke-20, seperti *a Theory of justice, Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Keadilan yang dikemukakan adalah sebagai berikut: Keadilan Komutatif, Keadilan Distributif, Keadilan Kodrat Alam, Keadilan Konvensional, Keadilan Perbaikan.

Teori keadilan berdasarkan pandangan Pancasila

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.

- (1) "Adil" ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- (2) "Adil" ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- (3) "Adil" ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran".

Teori Pidana

Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retribution Theory*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*qui peccantum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Teori Pencegahan

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan tertentu yang lebih bermanfaat.

Teori Rehabilitasi

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, pelaksanaannya bukan pidana badan, akan tetapi pidana hilang kemerdekaan, tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Teori Gabungan (*Integratif Theory*)

Muladi mengkategorikan tujuan pidana ke dalam 4 (empat) tujuan, antara lain:

- a) Pencegahan (umum dan khusus).
- b) Perlindungan Masyarakat,
- c) Memelihara Solidaritas Masyarakat,
- d) Pidana bersifat Pengimbangan.

Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Teori*)

Feminis Legal Theory muncul sekitar Tahun 1970-an. Teori hukum feminis menyatakan bahwa, keberlakuan hukum semata-mata dipandang dari sudut laki-laki, dengan maksud bahwa hukum adalah milik laki-laki, laki-laki yang menyusun hukum dan teori hukum, dan selanjutnya hukum dan hasil putusannya merefleksikan nilai Laki-laki Teori feminis melihat dunia dari sudut pandang perempuan. Teori Feminis adalah sistem gagasan umum

dengan cakupan luas tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Dalam perjalanan sejarahnya, teori feminis secara konstan bersikap kritis terhadap tatanan sosial yang ada dan memusatkan perhatiannya pada variabel-variabel sosiologi esensial seperti ketimpangan sosial, perubahan sosial, kekuasaan, institusi politik, keluarga, pendidikan, dll.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk Penelitian Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Metode Penelitian Hukum Yuridis Empiris dikatakan juga Penelitian sosiologi hukum karena untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini: (1) Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). (2) Pendekatan Konsep (*Konsep Approach*), (3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan (4) Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*).

Pembahasan

Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu

Secara formal Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu mulai beroperasi pada Tahun 1980 dengan bangunan kantor berlantai dua seluas 36.000 m² yang berdiri diatas lahan seluas 40.500 m² yang mulai dibangun Tahun 1978 artinya bangunan tersebut bukan peninggalan pemerintah kolonial Belanda melainkan buah karya bumi putra. Menurut data dan informasi pada awalnya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu merupakan lahan pertanian Rumah Tahanan Negara Raba-Bima yang berada daerah Dompu. Secara geografis Lapas Dompu terletak di lereng perbukitan Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kondisi tanah yang

berbukit dengan kemiringan 20-30 cm dengan karakteristik tanah jenis lilin yang labil dengan ciri khasnya pada musim panas pecah-pecah dan pada musim hujan becek dan rekat sehingga bangunan seringkali mengalami pergeseran yang mengakibatkan bangunan retak. Disebelah Barat berbatasan dengan areal persawahan milik Lapas, sebelah Timur dengan pemukiman penduduk, sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Nowa dan sebelah Selatan dengan Jalan Trans Lintas Sumbawa-Bima. Struktur bangunan dari LAPAS Kelas IIB Dompu yang terdiri dari, antara lain:

1. Luas tanah : 40.500 m²
2. Luas bangunan: 3.600 M² dengan keadaan bangunan permanen yang dikelilingi oleh tembok lebih kurang 6 (enam) meter dan setiap sudut tembok mempunyai pos jaga, berjumlah 4 Pos.

Menurut penempatan pegawai pada masing-masing unit kerja (*Staffing*) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Penempatan Pegawai LAPAS

No	Satuan Unit Kerja	Jumlah
1	Ka Lapas	1 orang
2	Sub Bagian Tata Usaha	13 orang
3	Ka.KPLP	4 orang
4	Binadik dan Giatja	14 orang
5	Adm. Kamtib	5 orang
6.	Penjagaan dan P2U	26 orang
Jumlah		63 orang

Sumber Data: Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu NTB Tahun 2016

Tabel 2 : Kapasitas Penghuni Lapas per Mei 2016

No	Golongan	P	W	Jumlah
Narapidana				
1	Pidana mati	-	-	
2	Seumur hidup	-	-	
3	B.I	135	6	141
4	B.IIA	12	3	15
5	B.IIB	-	-	-
6	B.III	3	-	3
7	B.IIIS			
JUMLAH		150	9	159
Tahanan				
1	A.I	-	2	-
2	A.II	4	1	5

3	A III	41	5	46
4	A IV	1	-	1
5	A V	-	-	

Jumlah	46	8	54
--------	----	---	----

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu NTB Tahun 2016

Tabel 4 : Nama-nama Narapidana Wanita dan Jenis Kejahatan

No	Nama	Pasal	Tindak Pidana / Lama Pidana
1	Siti Hajar Aksa	340 KUHP	Pembunuhan Berencana/14 Tahun
2	Siti Rugaya	338 KUHP	Pembunuhan / 11 Tahun
3	Nunung Nurhayati	UU No.20 Tahun 2001	Tindak Pidana Korupsi / 4 Tahun
4	Fitriani Alias Fitri	UU No.35 Tahun 2009	Narkotika dan Psikotropika/ 4 Tahun
5	Riana Alias Ria	UU No.35 Tahun 2009	Narkotika dan Psikotropika/ 5 Tahun
6	Ayu Andira Alias Ayu	UU No.35 Tahun 2009	Narkotika dan Psikotropika/ 4 Tahun
7	Sarfiah	363 KUHP	Pencurian dengan Pemberatan/7 Bulan
8	Nuraeni	UU No.42 Tahun 1999	Pengalihan benda yang menjadi objek Fidusia / 8 bulan
9	Ernawati	UU No.35 Tahun 2009	Narkotika dan Psikotropika/ 1 Tahun
10	Hafsah	303 KUHP	Perjudian / 9 Bulan
11	Ferawati	UU No.35 Tahun 2009	Narkotika dan Psikotropika/ 4 Tahun
12	Desi Susanti	UU No.35 Tahun 2009	Narkotika dan Psikotropika/ 4 Tahun
13	Nurhasanah	UU No.39 Tahun 2004	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri / 9 Bulan
14	Tati Sulianti	362 KUHP	Pencurian / 7 Bulan
15	Ririn Afriani	372 KUHP	Penggelapan / 1 Tahun 7 Bulan
16	Bunga Mawarni	UU No.35 Tahun 2009	Narkotika dan Psikotropika/ 4 Tahun
17	Irfani alias Iin	UU No.35 Tahun 2009	Narkotika dan Psikotropika/ 3 Tahun

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu NTB Tahun 2016

Model Pembinaan terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan

Di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Dompu menerapkan model pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam kegiatan Pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIB Dompu dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara

lain:

Pembinaan Kesadaran Beragama.

Usaha ini dilakukan agar narapidana dapat tersentuh hatinya dengan siraman keagamaan terutama memberikan pengertian agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Menurut Bapak Hermanturi, S.Sos (Kasi Binadik dan Keg. Kerja), penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara mengadakan pengajian dan Siraman Rohani. Jadwal kegiatan tersebut dilakukan disetiap Hari Jum'at.

Pembinaan Berbangsa dan Bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui Pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan para narapidana agar dapat menjadi warga negara yang baik dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanturi, S.Sos (Kasi Binadik) Lapas Kelas IIB Dompu, penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara

lain adalah dengan dilakukannya apel setiap harinya upacara bendera setiap hari senin dan setiap hari-hari besar Nasional dan hari LAPAS Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanturi, S.Sos, Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan pendidikan non-formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan, dsb.

Pembinaan Kesadaran Hukum.

Dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat narapidana menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayat, Bc.Ip,SH.MH (Ka Lapas Dompus), penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (selanjutnya disebut KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan oleh Bagian Hukum Pemkab Dompus, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan Dompus, dan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) secara langsung, hal tersebut juga dibenarkan oleh Nurhasanah (NAPI Wanita), biasanya penyuluhan hukum tersebut tentang masalah narkoba, HIV/AIDS, kesadaran hukum, dan sebagainya.

Pembinaan mengintegrasikan diri dengan Masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial masyarakat, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana wanita mudah diterima kembali oleh

masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Syarif Hidayat, Bc.Ip,SH.MH, untuk mencapai hal tersebut kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di lingkungannya. Program integrasi diri dengan masyarakat. Namun untuk Program Asimilasi ini, dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus belum menerapkannya walaupun Program Asimilasi tersebut merupakan bagian dari hak narapidana di setiap lembaga pemasyarakatan yang ada jika telah memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih ada kekhawatiran dari pihak petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus jika narapidana yang bersangkutan tidak dapat diterima ataupun kurang mendapat perlakuan yang baik dari masyarakat luar, sehingga berpengaruh pada psikologis Narapidana Wanita tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh seluruh Narapidana Wanita, yang diwakilkan kepada Ibu Nunung Nurhayati, bahwa selama berada dalam Lapas, belum pernah ada bentuk kegiatan Asimilasi Keluar, dengan alasan Keamanan dan pandangan miring masyarakat terhadap Narapidana ataupun Tahanan, terutama Narapidana dan Tahanan Wanita.

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program yaitu:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri. Keterampilan tersebut misalnya kerajinan tangan seperti menyulam atau menjahit, industri rumah tangga seperti Masak-memasak, membuat aneka macam kue, Keterampilan Salon Kecantikan dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayat, Bc.Ip,SH.MH, keterampilan tersebut misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan

bahan jadi, contohnya membuat tikar, topi dan tas dari pandan yang dibimbing dari pihak LSM dan Ibu-ibu PKK.

Untuk huruf a dan b, berdasarkan wawancara dengan Ibu Sarfiah (Napi Wanita), kegiatan yang dimaksud pada awalnya sering kali dilakukan dengan fasilitas dari Pihak Lapas sendiri yang menghadirkan Ibu-ibu PKK dari wilayah yang berada disekitar Lapas untuk mengadakan kegiatan yang dimaksud.

- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing. Hal tersebut belum dapat direalisasikan karena belum cukupnya sarana dan prasarana yang ada. Wawancara dengan Ibu Bunga Mawarni, bahwa setiap individu mempunyai bakat masing-masing yang berbeda dan ditambah lagi sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Adapula kekhususan model Pembinaan yang tidak diatur dalam peraturan yang telah disebutkan diatas, misalnya: di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompus kadang kala Narapidana dan Tahanannya di ikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan bercocok Tanam dan beternak yang merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh LAPAS Kelas IIB Dompus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanturi S.Sos, pada penelitian yang dilakukan, ada perbedaan antara pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana dan Tahanan Wanita di LAPAS Dompus. Dimana untuk Narapidana Wanita, pembinaan yang dilakukan telah diuraikan seperti diatas, sedangkan untuk pembinaan terhadap Tahanan tidak seperti model pembinaan terhadap Narapidana, ini disebabkan karena Tahanan Wanita adalah merupakan individu yang masih menjalani pemeriksaan yang ditempatkan dalam LAPAS guna menunggu proses persidangan. Tahanan juga ada yang menjadi titipan dari Rumah Tahanan dan Lapas lain, jika ada yang diikuti sertakan dalam pembinaan bersama dengan Narapidana tidak lebih karena mereka merupakan partisipan disebabkan karena model pembinaan yang dilakukan bersifat positif dan juga terdorong pada kesamaan ruangan dengan Narapidana Wanita yang lain, dimana di Lapas

Kelas IIB Dompus Blok Narapidana/Tahanan Wanita hanya 1 (satu) ruangan saja. Khusus bagi para tahanan, kegiatan yang diberikan kepada mereka bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif (seperti berusaha melarikan diri), tetapi harus lebih dititikberatkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan.

Setelah melihat model pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompus, maka model pembinaan tersebut sesuai dengan teori-teori tentang pemidanaan yang sebagaimana telah diutarakan sebelumnya dalam kerangka teori. Jadi teori yang dipergunakan dalam Model Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompus adalah Teori Pembalasan (Absolut), ini dapat dilihat dari tindakan dan sanksi hukum yang diberikan kepada beberapa Narapidana yang melakukan tindakan pidana yang di jatuhi hukuman berat (Vonis Pidana 4 sampai dengan 14 Tahun), dimana tujuan diberikan sanksi pidananya adalah agar mereka merasakan bagaimana tersiksanya hukuman dengan dihukum hilang kemerdekaan dalam waktu yang sangat lama dengan tujuan agar mereka menyadari dan jera akan perbuatan yang dilakukan.

Jika dilihat dari model pembinaan terhadap Narapidana Wanita yang telah diuraikan, juga berkaitan dengan Teori Pencegahan, Maksudnya teori pencegahan sesuai dengan model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompus karena penjatuhan hukuman bagi para narapidana sebagai upaya membuat efek jera yang berguna untuk mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan yang mereka perbuat sebelumnya.

Sedangkan maksud Teori Rehabilitasi sesuai dengan model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompus karena memang penempatan seseorang yang dikatakan sebagai narapidana di tempat tertentu yang dalam hal ini lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompus dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar berperilaku

wajar dan pantas dengan mencantumkan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dapat dikatakan merehabilitasi perilaku dari pelaku tindak kejahatan atau narapidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun dampak yang timbul dari model pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompus, antara lain:

Dampak Positif

- a. Diadakannya pembinaan beragama bagi para narapidana yang tidak pandai sholat, menjadi pandai dan paham tentang sholat yang baik dan benar.
- b. Bagi narapidana yang tidak pandai mengaji, setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompus menjadi pandai mengaji bahkan dapat mengajar mengaji untuk orang lain setelah yang bersangkutan keluar dari Lapas Dompus.
- c. Bagi narapidana yang buta huruf, menjadi bisa membaca dan menulis.
- d. Menyadari segala kesalahan yang telah diperbuat selama ini adalah perbuatan dosa dan menyesali segala perbuatannya.
- e. Diadakannya pembinaan kemandirian seperti menjahit, menyulam, membuat kue kering/basah, salon dan sebagainya.

Dampak Negatif

- a. Diadakannya pembinaan dalam hal penerimaan Remisi setiap hari besar agama (remisi khusus) dan remisi umum setiap Tanggal 17 Agustus serta pengajuan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan asimilasi, maka cara narapidana merasa hukuman menjadi tidak terasa.
- b. Berhubung karena pembinaan kemandirian hanya itu-itu saja membuat para narapidana tersebut merasa bosan dan menganggap hanya untuk mengisi waktu saja.
- c. Adanya narapidana yang dipekerjakan untuk membantu petugas dalam melakukan pekerjaan dan terkadang diberikan upah. Sehingga narapidana tersebut merasa enak dan tidak merasa sakit berada di Lembaga Pemasarakatan.
- d. Adanya perubahan sistim kepenjaraan ke sistim pemasarakatan yang membawa

dampak demokrasi pembinaan yang mengedepankan Hak Asasi Manusia. Narapidana menjadi kurang menghargai Petugas/Pegawai LAPAS) dan petugas/pegawai LAPAS terlalu berhati-hati dalam menindak narapidana yang melakukan pelanggaran karena apabila perlakuan diberikan sedikit keras, maka akan mendapatkan sanksi dari atasan (KA LAPAS).

Faktor Penghambat pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita dan Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompus dalam mengatasi Hambatan yang dihadapi

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita

Ada 2 (dua) faktor Penghambat Pembinaan NaPIa Wanita, yaitu:

Faktor-Faktor Interen

- a. Sarana gedung lembaga pemasarakatan.
- b. Kualitas dan kuantitas petugas.
- c. Kesejahteraan Petugas
- d. Sarana/Fasilitas Kesejahteraan
- e. Anggaran Lembaga Pemasarakatan
- f. Sumber Daya Alam
- g. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.

Tabel 4. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompus NTB Tahun 2016

No	Golongan	P	W	Jumlah
Narapidana				
1	Pidana mati	-	-	
2	Seumur hidup	-	-	
3	B.I	135	6	141
4	B.IIA	12	3	15
5	B.IIB	-	-	-
6	B.III	3	-	3
7	B.IIIS			
JUMLAH		150	9	159
Tahanan				
1	A.I	-	-	-
2	A.II	4	3	7
3	A III	41	5	46
4	A IV	1	-	1
5	A V	-	-	-
Jumlah		46	8	54

Sumber Data: LP Kelas IIB Dompus NTB 2016

Tabel 5. Jumlah Narapidana dan Tahanan Wanita 4 Tahun terakhir di Lapas Kelas IIB Dompu

No	Tahun	Jumlah Tahanan
1	2013	12
2	2014	13
3	2015	14
4	2016	17

Sumber Data: LP Kelas IIB Dompu NTB (Tahun 2013-2016)

Tabel 6. Latar belakang Pendidikan Petugas/Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu NTB Tahun 2016

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar SD)	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	32
4	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2
5	Diploma-3 (D3)	2
6	Sarjana/Srtata-1 (S1)	26
7	Strata-2 (S2)	1
Jumlah		63

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu NTB Tahun 2016

Tabel 7. Jumlah Petugas/Pegawai di LP Dompu yang pernah Mengikuti Pelatihan.

No	Jenis Pelatihan	Pria	Wanita
1	Petugas Kemasyarakatan	3	-
2	Samapta	60	3
3	Narkoba	12	3
4	Bimbingan Hukum	14	3
5	Pelayanan Masyarakat	24	3
6	Perawatan Kesehatan	3	1

Sumber Data: LP Kelas IIB Dompu (Tahun 2015-2016)

Faktor Eksteren

- a. Faktor Ekonomi.
- b. Faktor Pendidikan.

Tabel 8. Tingkat Pendidikan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu NTB Tahun 2016

No	Pendidikan	Jmlh
1	Buta Huruf	1
2	Sekolah Dasar (SD)	2
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	8
5	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	-
6	Diploma-3 (D3)	-
7	Sarjana/Srtata-1 (S1)	1
8	Strata-2 (S2)	-
Jumlah		17

Sumber data : LP Kelas IIB Dompu NTB Tahun 2016

Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dalam mengatasi Hambatan-Hambatan yang terjadi Upaya yang dilakukan berkaitan dengan Kebijakan:

- a. Reformasi dalam Proses Kebijakan Pemasyarakatan. Hal ini terkait dengan komitmen penuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pemsy) untuk mengambil kebijakan yang langsung tertuju pada penanggulangan yang mendesak adalah masalah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Reformasi dalam sistem pembinaan narapidana dengan membuat metode pemanfaatan waktu luang agar lebih bermanfaat bagi narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan dengan menciptakan kegiatan-kegiatan bagi narapidana yang lebih produktif dengan mengisi sebagian besar waktu mereka selama berada dalam lembaga pemasyarakatan agar mereka mampu menurunkan *deprivasi* (penderitaan) psikologis yang dialami narapidana, serta perlunya memperhatikan mekanisme *reward* dan *punishment*.
- c. Reformasi Paradigmatik pemasyarakatan harus dikembalikan konsepsi dasarnya sebagai upaya reintegratif atau mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan dengan masyarakatnya setelah menjadi konflik berupa kejahatan.

Hambatan-hambatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu harus diatasi dengan berbagai cara untuk dapat menuju suatu pembaruan sistem pemasyarakatan antara lain:

1. Pembenahan SDM, dalam hal ini petugas atau Pegawai LAPAS Kelas IIB Dompu yang berawal dari proses *rekrutmen*/penerimaan untuk petugas/pegawai LAPAS
2. Efektifisasi pengklasifikasian narapidana baik dari segi umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana dan lamanya pidana yang dijalani.
3. Pemberian motivasi kepada narapidana bahwa dalam melaksanakan program-program yang telah ditentukan disetiap LAPAS yang ada di Indonesia.
4. Terhadap petugas atau Pegawai LAPAS Kelas IIB Dompu yang berpendidikan Sarjana, maka diharapkan lebih diberdayakan lagi dalam pembinaan Narapidana dalam program-program kemandirian.
5. Terhadap Tim Pelatihan yang ada di LAPAS, agar memberikan masukan kepada Ka LAPAS untuk mengadakan kerjasama dengan pihak industri Kecil disekitar LAPAS.
6. Pihak Petugas/Pegawai LAPAS harus lebih optimal atau lebih sering melakukan pendekatan per individu ataupun kelompok-kelompok untuk memberikan pengarahan-pengarahan yang bersifat positif.

Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu NTB dalam Mengatasi *Over Capacity*.

- a. Mengajukan permohonan untuk merenovasi atau memperbaharui bangunan yang sudah ada
- b. Mengurangi atau membatasi narapidana ke lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara. Hal-hal yang dapat dilakukan melalui program antara lain yaitu :
 1. Mengintensifkan bentuk Tahanan Rumah dan Tahanan Kota, kegiatan ini dapat dilakukan dalam setiap tingkat Penahanan yaitu pada tingkat Penyidikan, tingkat Penuntutan dan tingkat Pemeriksaan oleh Pengadilan. Bentuk penahanan rumah dan penahanan Kota ini secara tegas diatur dalam pasal 22 ayat (1) KUHP.
 2. Mengintensifkan bentuk penjatuhan Hukuman Pidana Bersyarat.
 3. Mengintensifkan Pemberian Pidana Denda sebagaimana yang diatur pasal 10 huruf a angka 4c KUHP.

4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Bapas.
 5. Menyurati/menghubungi pihak kejaksaan agar segera mengirim putusan/vonis ke Lembaga Pemasyarakatan
- c. Mempercepat pengeluaran Narapidana.
Proses pemasyarakatan narapidana akan berjalan efektif apabila narapidana diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat melalui Proses Asimilasi dan Integrasi.

KESIMPULAN

Pada dasarnya Model pembinaan narapidana Wanita yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Dompu sama dengan Model Pembinaan di Lapas-lapas yang lain pada umumnya. Akan tetapi ada beberapa Pembinaan Khusus terhadap Narapidana Wanita di LAPAS Kelas IIB Dompu, yaitu: diikutsertakan dalam beberapa kegiatan yaitu, kegiatan bercocok tanam, pertanian, dan kerja sama dengan industri Rumahan, pengajian dan siraman rohani yang dilakukan setiap hari Jumat.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat berjalannya model pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIB Dompu antara lain, yaitu: Faktor Intern dan Faktor Ekstern. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, antara lain: Peningkatan Kualitas SDM, Rehabilitasi Bangunan atau Gedung LAPAS. Pengklasifikasian Narapidana, Mengurangi atau membatasi narapidana ke LAPAS/RUTAN, Mempercepat Pembebasan Bersyarat, Pemberian Remisi, dan pemindahan Napi/Tahanan ke Lapas yang masih sedikit Penghuninya

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar Agus Salim, *Tujuan Pidana Penjara sejak reglemen 1917 hingga lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Pustaka Bangsa, Medan, 2003;
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002;
- CJ. Harsono HS, *Sistem baru Pembinaan*

- Narapidana, Djembatan, Jakarta, 1995;
- David J. Cooke, Pamela J. badwin dan Jaquilie. *Menyikap Dunia Gelap Penjara*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008;
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2006;
- Ilmi Bisri, *sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Disertasi Program Pasca Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001;
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985;
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung: 1985;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Goup, Surabaya, 2005;
- Rodliyah, *Pidana Mati terhadap Perempuan. Suatu Kajian Perbandingan*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2014;
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983;
- Sudarto, *Hukum Pidana: Jilid I A*, Badan Penyedia Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1973
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi-Rekontruksi Model Pembinaan berbasis Kompetensi bagi terpidana Cybercrime*, CV. Aswaja Pressindo, 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009;
- Muzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam sistem peradilan pidana* Disertasi Program Pasca sarjana. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.
- Muzakkir, *Sistem Pengancaman Pidana dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Deskriminasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Juli 1993
- Suara Pembaharuan, *Reformasi Lembaga Pemasyarakatan*, Tanggal 2 Agustus 2007, hal 10
- <http://www.google-Tentang Teori Keadilan>.
- <http://www.nicic.org>.
- <http://:dewey/petra.ac.id>
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007
- A. Syukur, S.Sos (Kasi Kamtib) LAPAS Kelas IIB Dompu
- A. Azis, S.IP, (Kaur Umum) LAPAS Kelas IIB Dompu
- Bunga Mawarni (NAPI Wanita) LAPAS Kelas IIB Dompu
- Hermanturi, S.Sos (Kasi Binadik), LAPAS Kelas II B Dompu.
- Misponiran (Kasubsi Keamanan) LAPAS Kelas II B Dompu
- Muh. Akbar, A.Md.Kep (Pengelola Data Kesehatan) LAPAS Kelas IIB Dompu
- Muh. Said, S.Sos (Kasubsi Perawatan) LAPAS Kelas IIB Dompu
- Mustamin, ST (Kasubsi Reg dan Bimb Kemasy) LAPAS Kelas IIB Dompu
- Nunung Nurhayati (NAPI Wanita) di Lapas Kelas IIB Dompu
- Nurhasanah, (NAPI Wanita) di Lapas Kelas IIB Dompu
- Sarfiah (NAPI Wanita) di Lapas Kelas IIB Dompu
- Siti Hajar Aksa (Napi Wanita) di Lapas Kelas IIB Dompu
- Syarif Hidayat, Bc.Ip., SH.MH (Ka Lapas Kelas II B Dompu)